

**TRANSFORMASI SOSIAL
DI PERKOTAAN PANTAI UTARA JAWA**
STUDI PERBANDINGAN
PEKALONGAN DAN JEPARA

TRANSFORMASI SOSIAL DI PERKOTAAN PANTAI UTARA JAWA

**STUDI PERBANDINGAN
PEKALONGAN DAN JEPARA**

Oleh :
Thung Ju Lan
Riwanto Tirtosudarmo
Soewarsono
Aulia Hadi
Imelda



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2010 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Transformasi Sosial di Perkotaan Pantai Utara Jawa (Studi
Perbandingan Pekalongan dan Jepara)/Thung Ju Lan,
Riwanto Tirtosudarmo, Soewarsono, Aulia Hadi, Imelda-
Jakarta: LIPI Press, 2010.

vi hlm + 178 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-618-5

1. Dinamika Sosial - Kota

307.1

Penerbit: **LIPI Press, Anggota Ikapi**



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232

=====**KATA PENGANTAR**=====

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (BKPI) - LIPI yang telah mengorganisir program penelitian ini. Kedua, penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi (KEMENRISTEK) yang telah menyediakan dana untuk penelitian ini. Ketiga, apresiasi yang tinggi juga ingin kami sampaikan kepada berbagai instansi pemerintah maupun swasta yang telah bersedia memberikan bantuan pada seluruh proses penelitian, baik memberikan data maupun informasi yang bermanfaat, sehingga penelitian tentang transformasi sosial di perkotaan Pantai Utara Jawa melalui studi perbandingan Pekalongan dan Jepara dapat berjalan dengan baik.

Melalui penelitian ini telah dapat digambarkannya transformasi sosial yang terjadi di Pantura, khususnya pada kota-kota Pekalongan dan Jepara dengan industri-industri kreatifnya masing-masing. Keterjalinan antara ruang, penghuni kota, berikut kebudayaannya memiliki peran yang sangat penting dalam menyokong sebuah industri kreatif. Tim peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman bersama tentang pentingnya mendalami persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di daerah perkotaan, khususnya di sepanjang Pantura. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat

bermanfaat bagi masyarakat secara umum, para peminat studi perkotaan, dan tentunya pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Jakarta, Desember 2010

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Oleh <i>Tim Peneliti</i>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Pemikiran	5
1.5 Operasionalisasi Konsep dan Metodologi	9
BAB II MENUJU MASA LALU: CATATAN-CATATAN MENGENAI RUANG SOSIAL BERNAMA PEKALONGAN DAN JEPARA.....	12
Oleh <i>Soewarsono</i>	
2.1 Pengantar	12
2.2 Sebuah Pertanyaan.....	13
2.3 Pekalongan: Etimologi	15
2.4 Pekalongan yang “1 April 1906”: Kelanjutan Sebuah “Kota Kolonial Hindia Belanda?”	16
2.5 Pekalongan yang “25 Agustus 1622”: Sebuah Kabupaten “Mataram Islam”	30
2.6 Kabupaten dan “Kota” Jepara: Melihatnya dari Kabupaten dan Kota Pekalongan	39

BAB III	PEKALONGAN DAN JEPARA, KOTA-KOTA YANG “BERBATIK” DAN “BERUKIR”: “MODERN-ISASI” WARISAN TRADISIONAL	42
	Oleh <i>Thung Ju Lan</i>	
	3.1 Pendahuluan	42
	3.2 Kota Batik Pekalongan	42
	3.3 Penduduk Kota: Arab, Cina, Jawa	46
	3.4 Kota Pekalongan, Kota Batik ‘Jlamprangan’	50
	3.5 Jepara, Bumi Kartini dan Kota Ukir Dunia	54
	3.6 Wajah Jepara di Balik Ukiran	62
	3.7 ‘Modern-isasi’ Warisan Tradisional	65
	3.8 Penutup	69
BAB IV	PENGUSAHA DAN BURUH JAWA-MUSLIM DALAM INDUSTRI KREATIF DI PEKALONGAN DAN JEPARA.....	71
	Oleh <i>Riwanto Tirtosudarmo</i>	
	4.1 Pengantar	71
	4.2 Pekalongan-Jepara dan Pengusaha Jawa-Muslim.....	74
	4.3 Batik dan Mebel-Kayu sebagai Produk Kebudayaan ..	81
	4.4 Pekerja Batik dan Mebel-Kayu: Buruh Tanpa Hak-hak Perburuhan	88
	4.5 Penutup	93
BAB V	KONSTRUKSI IDENTITAS MASYARAKAT ARAB DI PEKALONGAN DAN JEPARA: SIGNIFIKANSI- NYA TERHADAP INDUSTRI KREATIF	96
	Oleh <i>Aulia Hadi</i>	
	5.1 Pengantar	96
	5.2 “Kampung Arab”: Sebuah “Ruang Sosial” di Kota Pekalongan.....	101
	5.3 Kelompok Masyarakat Arab Pekalongan: Sebuah Catatan Sejarah dan Perkembangan Ekonomi	108

5.4	<i>Asy Syabaab</i> : Diskursus Pemuda Irsyadi Pekalongan Masa Kini	116
5.5	Mohammad Basyir Ahmad Syawie: “Orang Arab Nomor 1” di Kota Pekalongan.....	123
5.6	Membaca Kelompok Masyarakat Arab di ‘Kota Ukir’ Jepara dari ‘Kota Batik’ Pekalongan	128
5.7	Penutup	132

BAB VI BAHASA JAWA PESISIRAN DAN PERKEMBANGANNYA DI PEKALONGAN DAN JEPARA 135
Oleh *Imelda*

6.1	Pengantar	135
6.2	Jawa Pekalongan dan Jepara dalam Peta Kebudayaan	137
6.2.1	Lokasi dan Orang Jawa	137
6.2.2	Bahasa di Tanah Jawa dan Pesisir Jawa	139
6.2.3	Bahasa Jawa di Pekalongan dan Jepara	141
6.3	Dinamika Bahasa Jawa: dari Kolonial hingga Orde Baru	143
6.4	Bahasa Jawa Pesisiran Era Otonomi Daerah	145
6.4.1	Bahasa Jawa-Pekalongan Membangun Wacana	146
6.4.2	Bahasa Jawa-Jepara: Masih Setia pada Masa Lalu ..	151
6.5	Wacana Identitas Kebahasaan di Kota Batik-Pekalongan dan Kota Ukir-Jepara dalam Konteks Otonomi Daerah	152

BAB VII KESIMPULAN 156
Oleh *Aulia Hadi dan Thung Ju Lan*

DAFTAR PUSTAKA 164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Provinsi Jawa Tengah Dilihat dari Kabupaten dan Kota	13
Gambar 2.2 Peta Kota Pekalongan	20
Gambar 2.3 Peta Kabupaten Pekalongan.....	34
Gambar 6.1 Peta Wilayah Etnis di Pulau Jawa.....	138
Gambar 6.2 Peta Dialek-dialek Bahasa Jawa.....	140
Gambar 6.3 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	142

BAB I

PENDAHULUAN¹

1.1 Latar Belakang

Melusuri jalan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa (Pantura) seperti mengikuti pita panjang yang menghubungkan tempat-tempat yang dilaluinya. Jalan ini semula dibangun sebagai jalan militer untuk mempertahankan kekuasaan Belanda atas Jawa. Sesuai dengan nama dan fungsinya, pos-pos dibangun di sepanjang jalan ini sebagai tempat peristirahatan, tempat penggantian kuda, serta tempat pengawasan, sehingga jalan tersebut dikenal sebagai Jalan Raya Pos. Keberadaan pos-pos tersebut memiliki implikasi dalam meramaikan dan mengembangkan daerah di sekitar pos, yang dalam perkembangan selanjutnya ada yang bertumbuh menjadi kota.

Selain dilalui Jalan Raya Pos, banyak kota di Pantura yang juga dikenal sebagai kota bandar. Keberadaan kota-kota bandar itu di Pantura tidak saja dikenal di Pulau Jawa sendiri, tetapi juga di Nusantara, Asia, dan bahkan dunia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kekayaan alam Pulau Jawa yang menghasilkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, seperti lada, kopi, teh, maupun gula. Sebagai kota bandar, tidak mengherankan apabila kota-kota di Pantura banyak disinggahi para pedagang, seperti pedagang-pedagang Cina, Arab, dan Eropa. Pedagang Cina dan Arab kemudian banyak yang menetap dan bahkan melakukan perkawinan campur dengan penduduk lokal sehingga keberadaan kedua kelompok etnis tersebut masih dapat ditemui di beberapa kota Pantura hingga kini.

Dalam konteks kekinian, kota-kota di sepanjang Pantura telah mengalami perubahan yang cukup besar seiring dengan pergantian

¹ Ditulis oleh Tim Pantura (Thung Ju Lan, Riwanto Tirtosudarmo, Soewarsono, Imelda, dan Aulia Hadi).

rezim politik dan aktor-aktor politik yang berkuasa, serta adanya modal atau kapital yang mengontrol. Dua kota di Pantura, yaitu Jakarta di sebelah barat serta Surabaya di sebelah timur, bertumbuh dengan pesat dan hari ini memimpin pertumbuhan ekonomi tidak saja di Jawa, tetapi juga di Indonesia. Kedua kota tersebut bahkan telah bertransformasi menjadi *mega-cities*. Kota-kota di sekitar Jakarta dan Surabaya umumnya menjadi daerah penyangga bagi kedua kota besar tersebut. Di sebelah barat, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bergabung dalam Jabodetabek. Di wilayah timur, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan bergabung dalam Gerbangkertosusilo. Namun demikian, ada pula kota-kota Pantura yang mengalami kemunduran. Kota-kota tersebut umumnya hanya menjadi daerah perlintasan atau singgahan yang tidak signifikan dalam lalu lintas perekonomian di kawasan Pantura. Sebagai contoh adalah Kota Cirebon di kawasan Pantura bagian barat yang hanya dilintasi arus orang, barang, dan modal yang sangat pesat, sementara kotanya sendiri mengalami kemandegan, apabila tidak bisa dikatakan kemunduran. Oleh karena itu, sangat menarik untuk meneliti kota-kota di Pantura agar bisa diketahui mengapa ada kota-kota yang sangat maju dan mengapa ada kota-kota yang cenderung mengalami kemunduran.

Penelitian yang dilakukan di Cirebon dan Gresik pada tahun 2009 menunjukkan bahwa, adanya perebutan posisi dominan dalam proses pemaknaan kota antara penghuni kota di satu sisi serta pemerintah kota dan kekuatan modal di sisi yang lain sangatlah menentukan perkembangan sebuah kota. Perebutan posisi dominan dalam pemaknaan kota yang tercermin dalam kelima hal berikut pada dasarnya merupakan bagian dari proses transformasi sosial perkotaan yang terjadi di setiap kota.

Pertama, setiap rezim politik yang berkuasa mengubah tata ruang kota, termasuk pola pemukiman penduduk, sesuai dengan kepentingan politik dan ekonominya. *Kedua*, kota sebagai ruang pertarungan bagi pemaknaan hampir selalu didominasi oleh kelompok elit ekonomi yang bekerja sama dengan kelompok elit politik. *Ketiga*,

sektor transportasi (kereta api, jalan raya, dan pelabuhan) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sektor perdagangan dan industri sehingga ketiganya secara bersama-sama menentukan bentuk transformasi sosial di perkotaan. *Keempat*, peran kelompok etnis Cina maupun Arab sebagai dua kelompok migran tertua di Indonesia dalam perkembangan kota mengalami pasang surut sejalan dengan proses transformasi sosial di perkotaan. *Kelima*, semakin termarginalnya warga kota tidak saja oleh kekuatan pemerintah, baik lokal maupun pusat, tetapi juga oleh kekuatan modal dan pasar. Dari temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tata kota sangat 'bias elit' sehingga penguasaan dan pemaknaan kota mengabaikan kepentingan penghuni kota dan memunculkan fenomena 'kota tanpa warga'. Bahkan, pengidentikkan kota Cirebon dan Gresik sebagai 'kota wali' cenderung sebagai 'identitas semu' yang ditempelkan oleh elit kota.

Berangkat dari hasil-hasil temuan di atas, penelitian pada tahun 2010 ini diarahkan untuk lebih memahami interaksi dan hubungan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertarungan memaknai kota, khususnya dalam proses pembentukan identitas kota. Pada tahun ini dipilih dua kota, yaitu Pekalongan dan Jepara. Pekalongan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kota Pekalongan yang terdiri dari empat kecamatan, yaitu Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Barat. Sementara itu, yang dimaksud dengan Jepara adalah wilayah urban di Kabupaten Jepara. Sebagaimana penelitian Cirebon dan Gresik, eksistensi kedua kota ini – Pekalongan dan Jepara – sebagai kota bandar dan pusat peradaban Islam juga menjadi acuan dalam penelitian ini.

Berbeda dengan Cirebon maupun Gresik yang mengidentikkan diri sebagai kota 'religius' (baca: kota wali), Pekalongan dan Jepara justru memilih identitas kota yang bersifat 'sekuler,' (baca: kota batik dan kota ukir), walaupun keduanya juga memiliki identitas Islam yang kuat. Kota Pekalongan mengidentifikasi diri sebagai 'kota batik' yang juga merupakan

singkatan dari bersih, aman, tertib, indah, komunikatif.² Sementara itu, Kota Jepara mengidentifikasi diri sebagai 'kota ukir'.³ Kedua label tersebut sekaligus menandai produksi utama dari kedua kota tersebut.

Industri kreatif yang berkembang di Pekalongan dan Jepara, yaitu batik dan mebel-kayu, merupakan bagian dari tradisi kesenian Jawa, yang telah mengalami transformasi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan masyarakat. Peran pasar sangat besar dalam menunjang produk kebudayaan ketika ruang tempat komoditas itu diproduksi bersifat "*place specific*", seperti halnya Pekalongan dan Jepara. Dalam hal ini kita bisa melihat keterjalinan antara tempat dan kebudayaan yang dirangkai dari masa lalu ke masa kini, dan bila memungkinkan ke masa depan, khususnya dalam dinamika perekonomian kota yang direpresentasikan melalui industri kreatif. Peran warga kota dalam berbagai fungsinya, baik sebagai pengusaha, buruh, maupun sebagai sebuah kelompok etnis tampak jelas signifikansinya bagi perkembangan industri kreatif di kota masing-masing, walaupun pada tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, 'ruang kota' baru berarti ketika ada aktivitas penghuni yang mengisinya. Persoalannya adalah bagaimana cara mereka mengisi ruang-ruang kota tersebut, dan hal inilah yang menentukan perkembangan sebuah kota, sebagaimana terlihat dari pembahasan di bab-bab selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana interaksi dan hubungan kekuasaan antara berbagai kelompok yang menghuni kota untuk menguasai dan memaknai kota? *Kedua*, bagaimana kelompok-kelompok masyarakat menciptakan identitas kota Pekalongan dan Jepara yang bersifat

² http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan, diakses Maret 2010.

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara, diakses Maret 2010.

'sekuler' (baca: 'kota batik' dan 'kota ukir') serta bagaimana dampaknya terhadap kebijakan tata kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam kota;
- b. Mengetahui peran tokoh maupun kelompok elit yang memiliki peran penting dalam mendominasi sejarah perkembangan kota;
- c. Melakukan analisis interaksi dan hubungan kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok yang terlibat dalam 'pertarungan' untuk menguasai dan memaknai kota; serta
- d. Melihat proses transformasi sosial di Pekalongan dan Jepara.

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para perencana dan pengambil kebijakan perkotaan di kawasan Pantura.

1.4 Kerangka Pemikiran

Menyebut 'kota' tentu mengingatkan pada perkembangan peradaban manusia. Sebagaimana dikatakan Kotkin (2006), kota merupakan sebuah hasil karya terbaik (*masterpiece*) dari peradaban manusia karena merupakan sebuah ruang yang mampu merepresentasikan keindahan ekspresi ide, keyakinan, serta keterampilan manusia.⁴ Latif (2010) mengutip Whitman juga menyatakan bahwa kota tidak hanya sekedar ruang fisik yang kosong dan mati, tetapi kota juga merupakan sebuah ruang yang hidup di mana manusia berkreasi di dalamnya.⁵ Manusia dalam konteks ini

⁴ Kotkin, Joel. 2006. *The City: A Global History*. <http://books.google.com/books?id=Nft4AAAAIAAJ&q=Kotkin&dq=Kotkin&cd=2> , diakses April 2010.

⁵ Latif, Aulia. 2010. *Kota sebagai Ruang (yang) Hidup*. <http://www.facebook.com/home.php#!/notes/aulia-latif/kota-sebagai-ruang-yang-hidup/415320885228>, diakses April 2010.

dapat diartikan sebagai penghuni kota yang umumnya terdiri dari pemerintah kota dan juga warga kota.

Seperti dikatakan Lefebvre (1974), *spatial practice of modern society consists of conceived space and representation of space*.⁶ Kota menjadi arena yang memungkinkan “terjadinya proses dialektika yang terus berlangsung tanpa batas”⁷, antara ruang yang dilihat dan ruang yang direpresentasikan. Dengan kata lain, kota merupakan proses sosial dan hasil interaksi yang berkesinambungan antara manusia penghuni kota dengan lingkungan tempat tinggalnya sehingga “manusia menerima wajah fisik kota dan merepresentasikannya dalam wujud-wujud simbolik.”⁸ Persoalannya adalah, benarkah warga kota selalu menerima wajah fisik kota sehingga merepresentasikannya dalam bentuk-bentuk simbolik yang tepat? Contoh yang diperoleh dari hasil studi di Cirebon dan Gresik jelas tidak menggambarkan hal itu, karena identitas keduanya sebagai ‘kota wali’ lebih merupakan ‘identitas semu’ yang ditempelkan daripada sebagai refleksi dari suatu realita kota yang sesungguhnya.

Dalam perkembangannya, kota-kota di Indonesia, khususnya di Jawa, mengalami perubahan yang signifikan. Pembangunan Jalan Raya Pos seperti dikatakan Nas dan Pratiwo,⁹ membentuk jalinan kota-kota yang menyerupai pita yang membentang dari wilayah barat hingga timur Pantura. Selain itu, Jalan Raya Pos ini juga telah mengubah orientasi pembangunan kota yang semula selatan-utara menjadi terpusat di utara, yaitu Pantura.¹⁰ Perubahan ini pada praktiknya tidak hanya mengubah kota secara fisik, melainkan juga

⁶ Lefebvre, Henri. 1974. *The Production of Space*. http://www.iaacblog.com/2008term01/course03/wp-content/uploads/2008/11/lefebvre_presentation_part2, diakses Januari 2010.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Nas, Peter J. M. & Pratiwo. 2002. *Java and De Groote Postweg, La Grande Route, the Great Mail Road, Jalan Raya Pos*, www.kitlv-journals.nl, diakses Maret 2010.

¹⁰ *Ibid.*

dalam hal cara pandang penduduknya, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Susanto (2010) tentang rusaknya *Branding Tempoe Doeloe* Kota Solo sehingga jati diri Kota Solo tidak lagi berbeda dari kota-kota lain di Indonesia. Hal ini terjadi, menurutnya, “akibat dari pengalaman proses perkembangan kota yang seragam”.

Relasi kekuasaan dalam sebuah kota sangat kompleks. Piccione dan Razin¹¹ bahkan menyatakan bahwa relasi kekuasaan merupakan komponen yang penting dalam interaksi sosial. Menurut mereka, setidaknya-tidaknya ada dua bentuk kekuasaan yang sangat mempengaruhi interaksi sosial, yaitu kekuasaan individu dan juga kekuasaan kelompok.¹² Kekuasaan individu dimanifestasikan dalam hubungan orang per orang yang umumnya berasal dari kekuatan psikologis dan material. Sementara itu, kekuasaan kelompok umumnya dimanifestasikan dalam hubungan di antara sekelompok orang maupun hubungan orang per orang yang berasal dari kelompok yang berbeda.¹³ Mengikuti pandangan strukturalis, kekuasaan ini menunjukkan hubungan berbagai elemen dalam struktur masyarakat, yang umumnya terbagi dalam kelompok pemerintah (negara), kelompok borjuis, dan kelompok proletar.¹⁴ Fenomena pembangunan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah sebagai wakil negara kerap kali mendominasi kekuasaan yang ada. McGee¹⁵ bahkan

¹¹ Piccione, Michele dan Razin Ronny. 2009. *Coalition Formation under Power Relations*. <https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/17330/1/447-2288-1-PB.pdf>, diakses April 2010.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Perezalonso Andrés. 2006. *Not Just about Oil: Capillary Power Relations in the US as the Motives behind the 2003 War on Iraq*. <http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/perezalonso.pdf>, diakses April 2010.

¹⁵ McGee (dalam Tirtosudarmo, Riwanto. 2009. “Urbanisasi tanpa Pemerataan Kesejahteraan (Transformasi Sosial di Pantura dengan Ilustrasi dari Cirebon dan Gresik” dalam Riwanto Tirtosudarmo (Ed). *Transformasi Sosial di Perkotaan Pantai Utara Jawa: Studi*

menegaskan bahwa perkembangan kota-kota pascakolonial di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari ambisi para pemimpin nasionalis yang menginginkan terciptanya negara bangsa yang efisien dan stabil. Tingginya dominasi para pemimpin tersebut bahkan tampaknya menjadi kendala bagi terwujudnya penataan kota yang sesuai kebutuhan warganya. Hal ini juga yang ditemukan dalam penelitian tahun lalu di Cirebon dan Gresik.

Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah serta revisinya UU No. 32 Tahun 2004 memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan sebuah ruang yang bernama 'kota'. Otonomi Daerah telah memicu terjadinya pemekaran atau pemisahan ruang-ruang yang sebelumnya ada. Pekalongan yang menjadi objek dalam penelitian ini, misalnya, mengalami pemisahan antara kabupaten dan kota. Akibatnya, Kabupaten Pekalongan harus memindahkan ibukotanya dari wilayah yang kini disebut 'Kota Pekalongan' ke daerah baru bernama Kajen yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Sejauh mana perubahan tersebut berdampak pada kelompok-kelompok penghuni kota dan pada cara mereka memaknai kota adalah salah satu topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Relasi kekuasaan yang berimbang pada interaksi sosial yang terjadi di kota ternyata tidak hanya melibatkan kekuatan-kekuatan lokal, tetapi juga kekuatan-kekuatan nasional dan internasional. Berlangsungnya otonomi daerah (otoda) serta globalisasi yang memudahkan arus orang, barang, maupun modal di tingkat internasional semakin meningkatkan kompetisi antarkota, baik di tingkat nasional dan tentunya internasional. Dalam konteks ini, Evers¹⁶ menyebutkan bahwa kota harus mengubah tatanan fisik

Perbandingan Cirebon dan Gresik (Draft Laporan yang Segera Diterbitkan)).

¹⁶ Evers, Han Dieter. 2007. The End of Urban Involution and the Cultural Construction of Urbanism in Indonesia. *Internationales Asienforum*, Vol.

sekaligus citranya dalam rangka menarik investasi asing dan tentunya mengintegrasikan kota dalam konteks ekonomi global. Artinya, arus modal baik nasional maupun internasional sangat sulit untuk dihindari dalam perkembangan kota masa kini. Bahkan, menurut Evers, modal memiliki andil yang paling besar dalam mewujudkan tatanan kota, baik dalam dimensi fisik maupun dimensi simbolik. Sejauh mana pendapat Evers berlaku dalam kasus Pekalongan dan Jepara adalah topik lain yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Operasionalisasi Konsep dan Metodologi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian kali ini di Pekalongan dan Jepara diarahkan pada upaya untuk memaparkan kelompok-kelompok penghuni kota berikut identitasnya serta relasi kekuasaan di antara mereka, khususnya dalam proses pemaknaan kota melalui penetapan identitas kota yang bersangkutan. Seperti yang dilihat oleh Sri Margana dan Umi Barjiyah (2010), “[k]ota-kota di Indonesia mulai bergerak menuju sebuah identitas baru meninggalkan identitasnya yang lama”, dan menurut mereka, “[p]erubahan ini hasil dari aplikasi modernisasi yang mulai bergulir sejak awal abad ke-20”, sehingga “[k]osmopolitanisme yang mengasosiasikan diri pada kepemilikan benda-benda simbol modernitas telah menjadi orientasi baru masyarakat perkotaan” (hlm. 1). Oleh karena itu, penting untuk melihat perubahan identitas kota ini, khususnya pada kota-kota di Pantura.

Identitas sebuah kota, menurut Sri Margana dan Umi Bajiyah (2010), “tidak saja ditampakkan dari struktur fisik dan keunikan sejarahnya, tetapi juga gaya hidup dan orientasi sosial budaya para penghuninya” (hlm. 5). Tetapi, seperti yang juga dikatakan oleh Sri Margana dan Umi Barjiyah, “[k]ota menjadi tempat kaum kelas menengah dan elit intelektual dan politik untuk menyalurkan aktivitas mereka” (hlm. 3). Tiga hal ini, ditambah dengan simbol kemajuan

38 (2007), No. I-2, pp. 51-65, diakses dari http://mpr.ub.uni-muenchen.de/7566/1/MPRA_paper_7566.pdf pada April 2010.

ekonomi dan modernitas kota yang terlihat melalui pembangunan infrastruktur dan perluasan investasi di perkotaan adalah beberapa indikator identitas kota yang perlu diteliti untuk melihat perubahan atau transformasi sosial yang telah terjadi pada kedua kota yang diteliti apabila dilihat dari sisi tersebut.

Oleh karena itu, pendekatan pertama yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan historis atas ruang-ruang sosial yang bernama Pekalongan dan Jepara untuk melihat "identitas *tempoe doeloe*" ke dua kota tersebut yang merefleksikan struktur fisik dan keunikan sejarahnya.

Bertolak dari karakteristik kota dan identitasnya yang bertumpu pada industri kreatif, dalam hal ini batik dan ukir, maka pendekatan kedua yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-ekonomis, yaitu mencoba memahami kaitan antara ciri-ciri tertentu dari perekonomian kota dengan pembentukan identitas kota. Pendekatan ini juga dipakai untuk melihat sejauh mana tesis Evers tentang peranan modal dalam mewujudkan tatanan kota berlaku untuk kasus Pekalongan dan Jepara.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, identitas kota juga terefleksikan pada gaya hidup dan orientasi sosial budaya para penghuninya, yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari persoalan kelas yang diangkat Sri Margana dan Umi Bajiyah di atas, karena dari hasil-hasil penelitian tentang gaya hidup, terutama di perkotaan, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup perkotaan umumnya ditentukan oleh kelas atas, dalam hal ini kelompok elit bersama-sama kelas menengah perkotaan, dan jumlah yang terakhir ini cenderung bertumbuh seiring dengan pertumbuhan perekonomian kota. Sebagaimana diketahui dari hasil penelitian sebelumnya di Cirebon dan Gresik, dua kelompok migran tertua di Pantai Utara Jawa adalah kelompok etnis Cina atau Tionghoa dan etnis Arab, dan mereka bergerak dalam bidang perdagangan di wilayah perkotaan hampir selama sejarah kota itu sendiri, sehingga dalam perspektif kelas sosial, dapat dikatakan bahwa kedudukan kedua komunitas ini cukup tinggi. Dengan kata

lain, kita bisa mengetahui gaya hidup kelas menengah melalui kehidupan kedua komunitas tersebut. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada kelompok etnis Arab yang tampak cukup dominan dalam kehidupan sosial-budaya Kota Pekalongan. Memang tidak ditemukan gambaran yang sama tentang mereka di Jepara, akan tetapi kenyataan itu menjadi menarik untuk dipertanyakan, mengapa demikian? Apa sebabnya kelompok Arab di Jepara tidak sedominan di Pekalongan padahal keduanya berbasiskan pada industri kreatif yang sepertinya cukup diminati oleh warga etnis Arab yang secara umum telah beradaptasi sangat baik terhadap budaya Jawa yang merupakan budaya dominan di kawasan Pantai Utara Jawa, dan seperti kita ketahui, budaya Jawa juga merupakan basis budaya dari industri-industri kreatif di kedua kota dimaksud.

Dalam hal gaya hidup dan orientasi budaya, bahasa adalah salah satu aspek yang terpenting, dan bahasa mempunyai kaitan langsung sebagai salah satu penanda identitas yang utama. Peran bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi di kawasan Pantura tidak perlu diragukan lagi, akan tetapi bagaimana perannya bagi penanda identitas bagi komunitas di dua kota yang diteliti adalah suatu hal yang masih perlu dilihat. Oleh karena itu, salah satu topik yang dibahas dalam buku ini adalah bahasa Jawa pesisiran sebagai bahasa yang umum dipakai di kawasan Pantura, termasuk di Pekalongan dan Jepara.

BAB II

MENUJU MASA LALU: CATATAN-CATATAN MENGENAI RUANG SOSIAL BERNAMA PEKALONGAN DAN JEPARA¹⁷

2.1 Pengantar

Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

"Sebutan Provinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota."

Selanjutnya, menurut pasal 4 ayat 2 undang-undang tersebut, sebagai "daerah" dalam "wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ketiganya-provinsi, kabupaten, dan kota-"masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain."

Provinsi (Daerah Tingkat I) Jawa Tengah mempunyai 29 kabupaten (daerah tingkat II) dan enam kota(madya daerah II). Menarik untuk dicatat bahwa terdapat sejumlah kabupaten (daerah tingkat II) dan sejumlah kota(madya daerah tingkat II) yang berbagi sebuah nama. Misalnya, Kabupaten dan Kota(madya) Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Magelang. Selain Kota Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Magelang, dua kota lain di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Salatiga dan Kota Surakarta (Lihat Gambar 2.1). Kalaulah sebuah perubahan kemudian berlangsung beriringan dengan diperkenalkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut (yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), adakah implikasi yang dapat dicatat?

¹⁷ Ditulis oleh Soewarsono.



Gambar 2.1 Peta Provinsi Jawa Tengah Dilihat dari Kabupaten dan Kota¹⁸

2.2 Sebuah Pertanyaan

Setidaknya dua pertanyaan dapat diajukan. *Pertama* adalah kenyataan bahwa ketiga kabupaten (yang telah disebutkan sebagai contoh) kemudian harus mencari sebuah tempat di "wilayah"-nya sendiri untuk dijadikan sebagai sebuah "pusat" (ibukota). Beriringan dengan munculnya Kota Tegal, Kabupaten Tegal kemudian memindahkan ibukotanya dari Tegal ke Slawi; beriringan dengan munculnya Kota Magelang, Kabupaten Magelang mengambil Mungkid sebagai tempat ibukotanya; dan beriringan dengan munculnya Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan memutuskan untuk membuat sebuah "pusat" baru di Kajen.

Kedua, sebagaimana terbaca dari sejumlah keterangan yang diperoleh (sambil lalu) dari berbagai sumber, baik kabupaten-kabupaten maupun, khususnya, kota-kota memulai proses untuk

¹⁸ Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah pada Juli 2010.

mencari sebuah identitas yang diperlukan untuk menopang keberadaannya. Mengacu khusus pada Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, seseorang dapat menemukan kenyataan bahwa Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan masing-masing telah menetapkan 1 April 1906 dan 25 Agustus 1622 sebagai saat awal (baca: "hari jadi"-nya).

Dalam kaitannya dengan soal "hari jadi" Kota Pekalongan, menarik untuk dicatat bahwa sebelum keputusan mengenai mengenai hal itu diambil, sebuah proses dilalui. Dimulai dengan sebuah "sarasehan" yang dilangsungkan pada 27 Juni 2006 di mana sebuah "uraian singkat" telah diberikan oleh sejarawan Universitas Gajah Mada (UGM), Djoko Suryo.¹⁹ Dilanjutkan dengan sebuah seminar mengenai "Hari Jadi Kota Pekalongan" yang diadakan pada 5 September 2006 di mana "bahan referensi penetapan peraturan daerah hari jadi Kota Pekalongan" yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan sebagai acuan. Proses diakhiri dengan keputusan "Tim Perumus" yang beranggotakan sebelas orang pada 14 September 2006.²⁰

Pertanyaan sederhananya, sudah barang tentu, mengapa kedua "daerah" yang berbagi nama sama tersebut, ketika terpisah satu sama lain (lebih karena keharusan undang-undang) dan mencoba untuk membentuk identitasnya masing-masing, kemudian sampai pada "menemukan" dua "sumber" berbeda?

¹⁹ Lihat Djoko Suryo, "Pekalongan, dari Desa Pesisir ke Kota Modern: Melacak Perjalanan Sejarah sebuah Kota di Daerah Pesisir Utara Jawa," *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern*, Yogyakarta: STPN Press, 2009.

²⁰ Lihat 'Penelusuran Hari Jadi Kota Pekalongan,' Kota Pekalongan: Pemerintah Kota Pekalongan, 2006.

2.3 Pekalongan: Etimologi

Sebelum menelusuri lebih jauh soal tersebut, beberapa hal dapat dicatat dalam kaitannya dengan nama kedua "daerah" tersebut, "Pekalongan". Adakah arti yang terkandung di dalamnya?

Dalam sebuah kesempatan, Pramoedya Ananta Toer menulis,

"Untuk waktu lama, Pekalongan dianggap berasal dari kata 'kalong,' selanjutnya katanya Pekalongan dianggap berarti 'tempat kalong'. Orang yang membantah anggapan tersebut adalah pengarang Jawa, Purwolelono. Memang berasal dari kata 'kalong' katanya, hanya bukan jenis binatang, tapi dalam arti 'tempat,' sebuah istilah di kalangan para nelayan, yang berarti 'tempat ikan'".²¹

Sementara itu, sebuah keterangan lain menjelaskan bahwa,

"Asal usul nama... Pekalongan sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat secara turun temurun terdapat beberapa versi. Salah satunya disebutkan adalah pada masa Baurekso menjadi Bupati Pekalongan dan juga sebagai Tokoh Panglima Kerajaan Mataram. Pada tahun 1628 beliau mendapat perintah dari Sultan Agung untuk menyerang kompeni di Batavia. Maka ia berjuang keras, bahkan diawali dengan bertapa seperti kalong/kelelawar (bahasa Jawa *topo ngalong*) di hutan gambiran (sekarang: kampung Gambaran). Dalam pertapaannya, diceritakan bahwa Ki Baurekso digoda dan diganggu prajurit siluman utusan Dewi Lanjar, namun tidak berhasil bahkan Dewi Lanjar dipersunting Baurekso sebagai isterinya. Sejak saat itu, daerah tersebut terkenal dengan nama Pekalongan. Dalam versi lain disebutkan bahwa nama Pekalongan juga berasal dari kata Apek dan Along (bahasa jawa: *apek* (mencari), *along* (banyak). Hal ini berkaitan dengan

²¹ Lihat karyanya, *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*, Jakarta: Lentera Dipantara, 2008, halaman 84.

perairan laut di daerah Pekalongan yang kaya hasil ikannya."²²

Sedangkan,

"Dalam versi lain disebutkan bahwa nama Pekalongan berasal dari istilah setempat *HALONG-ALONG* yang artinya hasil yang berlimpah. Jadi, Pekalongan disebut juga dengan nama *PENGANGSALAN* yang artinya pembawa keberuntungan. Nama Pengangsalan ini ternyata juga ada dalam Babad Mataram (Sultan Agung), yaitu

'Gegaman wis kumpul dadi siji, samya dandan samya numpak palwa, gya ancral mring samudrane, lampaha lumintu, ing Tirboyo lawan semawis, ing Lepentangi, Kendal, Batang, Tegal, Sampun, Barebes lan Pengangsalan. Wong pesisir sadoyo tan ono kari, ing Carbon nggertata'.

Artinya: 'senjata-senjata telah berkumpul jadi satu. Setelah semuanya siap, para prajurit diberangkatkan berlayar. Pelayarannya tiada henti-hentinya melewati Tirbaya, Semarang, Kaliwungu, Kendal, Batang, Tegal, Brebes, dan Pengangsalan. Semua orang pesisir tidak ada yang ketinggalan (mereka berangkat menyiapkan diri di Cirebon untuk berangkat ke Batavia guna menyerbu VOC Belanda)'''²³

2.4 Pekalongan yang "1 April 1906": Kelanjutan Sebuah "Kota Kolonial Hindia Belanda?"

Dengan mengambil tempat di "Lapangan Mataram yang berada di depan halaman Gedung Sekretariat Daerah (Setda)," sebuah perayaan "sederhana" hari jadi Kota Pekalongan telah dilangsungkan

²² Asal-usul Kota Pekalongan, <http://pantura.org/berita-menarik/asal-usul-kota-pekalongan/>, diakses Juli 2010.

²³ Cetak miring ditambahkan. Diakses dari <http://indonesia-life.com/kolom/wforum.cgi?no=432&reno=no&oya=432&mode=msgview&list=new>, pada Juli 2010.

pada 1 April 2007. Meskipun dinyatakan sebagai peringatan yang ke-101, perayaan tersebut sebenarnya adalah perayaan yang pertama kali. Hal ini mengingat bahwa, di satu pihak, "draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)" mengenai "hari Jadi" barulah diajukan Pemerintah Kota Pekalongan kurang lebih tiga bulan sebelumnya, tepatnya bulan Januari 2007, dan di lain pihak, hingga 1 April, saat perayaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan belum memberikan ketetapannya.

Sementara itu, jika ditempatkan dalam konteks (per-)undang-undang(-an) mengenai pemerintahan daerah yang sejauh ini ada, maka rentang waktu yang panjang antara 1 April 1906 hingga 1 April 2007 atau selama 101 tahun sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua periode dengan masing-masing periode dapat dibagi ke dalam beberapa masa. Kedua periode tersebut dan pembagian masing-masingnya, secara *flashback* (mundur ke belakang), adalah (I) periode negara nasional Republik Indonesia dengan (1) masa Undang-Undang (selanjutnya UU) Nomor 22 Tahun 1999 (dan undang-undang revisinya, UU No. 32 Tahun 2004), (2) masa UU No. 5 Tahun 74, (3) masa UU No. 18 Tahun 1965, masa (4) UU No. 1 Tahun 1957, (5) masa UU No. 22 Tahun 1948, dan masa (6) UU No. 1 Tahun 1945; sementara (II) periode kolonialisme yang dapat dibedakan menjadi (1) masa pendudukan tentara Jepang (1942-1945) dan (2) masa negara kolonial Hindia Belanda.

Dalam kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 1945, seorang penulis menjelaskan,

"Suatu kemajuan lain sejak [P]roklamasi [K]emerdekaan dan pelaksanaan UU 1945/1 ialah mulai dipergunakannya istilah-istilah Indonesia yang seragam bagi pengertian-pengertian di bidang desentralisasi. Dalam perundingan-perundingan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagian besar anggotanya menghendaki adanya keseragaman. Misalnya, Mr. Mohammad Hasan dalam rapat PPKI tanggal 19-8-1945 mengusulkan dipergunakannya istilah 'kota' untuk pengertian *gemeente/staadsgemeente*

dulu dan istilah 'walikota' untuk menggantikan 'burgemeester'. Usul ini disetujui oleh sidang. Selanjutnya sejak itu mulai lazim dipakai istilah 'propinsi,' 'gubernur,' 'keresidenan,' dan 'residen untuk menggantikan kata-kata Belanda 'provincie,' 'gouverneur,' 'residentie,' dan 'resident'. Akhirnya diterima pula istilah 'kabupaten' yang sudah dikenal dalam bahasa Jawa pada zaman kerajaan-kerajaan yang lampau untuk menyebut daerah yang dulu dinamakan [dalam istilah Belanda] 'regentschap'. Kata dasar perkataan 'kabupaten' ialah 'bupati' yang berasal dari kata Sanskerta [']bu['] dan [']pati[']. Kata 'bu' berarti tanah, sedang 'pati' berarti tuan. Jadi bupati semula berarti 'Tuan yang berkuasa di atas tanah'".²⁴

Di antara ciri UU No. 1 Tahun 1945, menurut penulis tersebut lebih jauh, adalah

"Daerah-daerah yang ditetapkan menjadi daerah otonom ialah keresidenan, kota, dan kabupaten. Ketiga propinsi di Jawa[,] yang walaupun pada masa Hindia Belanda merupakan daerah otonom[,] tidak dibangun kembali."²⁵

Berdasarkan undang-undang tersebut, Pekalongan adalah satu dari 17 "keresidenan otonom" di Jawa dan Madura, satu dari 18 "kota otonom" di Jawa dan Madura, dan satu dari 67 "kabupaten otonom" di Jawa dan Madura.

Dalam konteks UU No. 22 Tahun 1948, sementara Keresidenan Pekalongan (dan juga daerah-daerah yang disebut keresidenan) dihapuskan, Kabupaten Pekalongan tetap dipertahankan, dan "kota otonom" Pekalongan berubah menjadi "kota besar," yang pembentukannya-bersama-sama dengan yang lainnya-didasarkan pada UU No. 16 Tahun 1950 (tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

²⁴ Lihat The Liang Gie, *Kumpulan Bahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Karva Kencana, 1977, halaman 32.

²⁵ *Ibid.*, halaman 29-30.

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta). Pada tahun 1957, oleh UU No. 1 Tahun 1957, "kota besar" Pekalongan kemudian dirubah menjadi "kotapraja" Pekalongan dan dalam konteks "daerah" termasuk dalam "daerah tingkat II." Perubahan kembali berlangsung ketika UU No. 18 Tahun 1965 memperkenalkan istilah "kotamadya sebagai daerah tingkat II," sehingga "Kotapraja" Pekalongan setelah berlakunya undang-undang tersebut menjadi bernama "Kotamadya" Pekalongan. Perubahan redaksional atas frase "kotamadya sebagai daerah tingkat II" dilakukan oleh UU No. 5 Tahun 1974 dengan lebih menekankan status "Daerah Tingkat II"-nya.

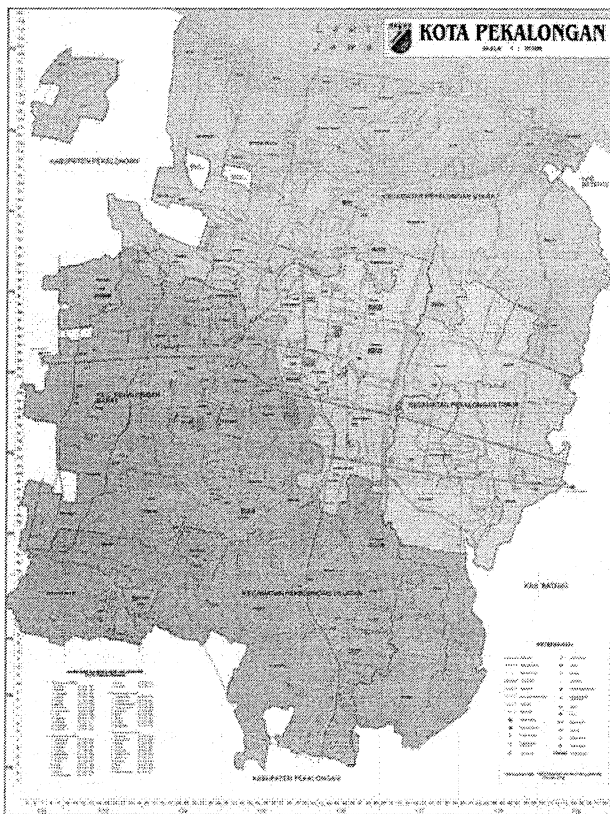
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988 yang dikeluarkan 5 Desember 1988 dan kemudian ditindaklanjuti oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1989, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sedikit diperluas. Mengambil sebagian wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, luas Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sejak saat itu bertambah dari semula hanya 1.755 ha menjadi 4.465,24 ha dan terbagi ke dalam empat kecamatan, 24 kelurahan, dan 22 desa. (Lihat Gambar 2.2) Pada tahun 2003, jumlah penduduk Kota Pekalongan tercatat kurang lebih 272.000 jiwa.

Dua keterangan berikut berkaitan baik dengan Kota Pekalongan maupun dengan 1 April 1906. *Pertama*, "... dan untuk Kota Pekalongan hak otonomi diatur dalam *staa[s]blaad* [No.] 124 tahun 1906, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 1906[.]" *Kedua*,

".... berdasarkan Lambang Kotapraja Pekalongan jaman dulu yang disahkan Pemerintah Hindia Belanda dengan "Keputusan Pemerintah" (*Gouverments Besht* [*Besluit*]) tahun 1931 [N]o. 40, nama Pekalongan diambil dari 'Halong' (dapat banyak), di mana di bawah lambang tertulis, 'Pek-Alongan'.

Kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957 dan tambahan lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 desember 1958, serta persetujuan Pepekuperda

Ter[*i*]torium 4 dengan SK [N]o. KPTS–PPD/00351/II/1958 tanggal 18 Desember 1958, nama Pekalongan berasal dari kata A-Pek-Halong-An yang berarti pengangsalan.²⁶



Gambar 2.2 Peta Kota Pekalongan²⁷

²⁶ "Sejarah Singkat Penentuan Hari Jadi Kota Pekalongan 1 April 1906," diakses dari <http://pantura.org/berita-menarik/asal-usul-kota-pekalongan/10/?PHPSESSID=5eafb6837a54d8900e1f74dd4f78879c:wap2> pada Juli 2010.

²⁷ Diunduh dari <http://www.google.co.id/imglanding?q=Kabupaten%20Pekalongan&imgurl=http://calegpekalongan.files.wordpress.com/2009/01/peta-kota->

Jika yang menjadi penanda dalam keterangan adalah seperti itu, maka yang tepat bukanlah "Kota Pekalongan" ataupun "Kotapraja Pekalongan" (meskipun yang belakangan ini seringkali dianggap sebagai terjemahan) melainkan "*Gemeente* Pekalongan," yang kemudian pada tahun 1926, berdasarkan "pembaharuan undang-undang 1922," menjadi "*Stadsgemeente*" atau "kotapraja penuh" Pekalongan.

Untuk memperjelas apa yang dimaksud, perhatikan dengan seksama dua keterangan berikut--keterangan-keterangan yang sepenuhnya dapat diperbandingkan.

Pertama,

"... apalagi setelah diketahui bahwa beberapa bagian dari wilayah Blitar (tepatnya Kota Blitar), iklimnya sesuai untuk *hunian bagi bangsa Belanda*, maka pada tahun 1906, pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah *Staatsblad van Nederlandche Indie* Tahun 1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan *Gemeente* Blitar. *Momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar*. Kepastian kebenarannya diperkuat oleh beberapa fakta, antara lain dengan adanya Undang-undang yang menetapkan bahwa ibukota (Kabupaten) Blitar dikukuhkan sebagai *Gemeente* (Kotapraja) Blitar; *Gemeente* (Kotapraja) Blitar oleh pemerintah pusat kolonial Belanda setiap tahun diberikan subsidi sebesar 11,850 gulden. *Gemeente* (Kotapraja) Blitar dibebani kewajiban-kewajiban dan diberikan subsidi secara terinci; bagi *Gemeente* (Kotapraja) Blitar, diadakan

[pekalongan.jpg&imgrefurl=http://calegpekalongan.wordpress.com/daerah-pemilihan/&h=593&w=454&sz=46&tbnid=dezPCHKJ5gMvbM:&tbnh=135&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3DKabupaten%2BPekalongan&hl=id&usq=MZ6sCaMjuuik-rrHTgL9Q2ZG1Xk=&ei=V7TrS57bC5DHRAfux6WIBg&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CC8Q9QewBQ&start=0#tbnid=dezPCHKJ5gMvbM&start=1](http://calegpekalongan.wordpress.com/daerah-pemilihan/&h=593&w=454&sz=46&tbnid=dezPCHKJ5gMvbM:&tbnh=135&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3DKabupaten%2BPekalongan&hl=id&usq=MZ6sCaMjuuik-rrHTgL9Q2ZG1Xk=&ei=V7TrS57bC5DHRAfux6WIBg&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CC8Q9QewBQ&start=0#tbnid=dezPCHKJ5gMvbM&start=1) pada Juli 2010.

suatu dewan yang dinamakan "Dewan Kotapraja Blitar" dengan jumlah anggota 13 orang; dan, undang-undang pembentukan Kotapraja Blitar itu mulai berlaku tanggal 1 April 1906. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di Indonesia yang berdasarkan catatan sejarah sebanyak 18 kota yang meliputi Kota Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Magelang, Semarang, Salatiga, Madioen, Blitar, Malang, Surabaya, dan Pasoeroean di Pulau Jawa, serta lainnya di luar Jawa."²⁸

Kedua,

"Kebijakan pada 89 tahun silam, persisnya 1 April 1914, pemerintahan Kota Malang yang dipimpin seorang asisten residen mulai dipisahkan dari induknya, Pemerintah Kabupaten Malang. Pada tahun 1903 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatiewet*) yang disusul dua tahun kemudian, 1905, dengan surat keputusan pelaksanaan desentralisasi. Perubahan menjadikan *gemeente-gemeente* di berbagai wilayah kota terjadi pada saat itu, seperti Batavia (1905), Bandung (1906), Cirebon (1906), Pekalongan (1906), Tegal (1906), Semarang (1906), Magelang (1906), Kediri (1906), Blitar (1906), dan Malang (1914). Perubahan menjadikan *gemeente* terhadap wilayah Kota Malang agak terlambat, sebab perubahan itu dilakukan secara bertahap. Implikasi Undang-Undang Desentralisasi 1905 menjadikan wilayah Kota dan Kabupaten Malang masih di bawah wilayah Keresidenan Pasuruan (1908). Selanjutnya, wilayah Kota Malang dipandang paling pesat pertumbuhannya, sehingga dijadikan *gemeente* pada 1 April 1914."²⁹

²⁸ "Sejarah Kota Blitar," http://www.blitar.go.id/v7/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=53 diakses pada Juli 2010, tekanan-tekanan ditambahkan. Sebenarnya, jumlah 18 hanya untuk Jawa. Terdapat 30 di Hindia Belanda dan itu berarti 12 ada di luar Jawa.

²⁹ "Kota Malang 89 Tahun: Masih Menikmati Tata Ruang Kuno," <http://www.arsitekturindis.com/?p=8> diakses pada Juli 2010.

Satu hal yang dapat dicatat, 1 April (telepas kapan tahunnya) adalah saat kemunculan *gemeente-gemeente* di berbagai tempat di Jawa seperti Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Megelang, Kediri, Blitar, dan Malang. Dikatakan secara lain, 1 April bukan hanya menjadi "hari jadi" Kota Pekalongan karena setidaknya itu juga yang dilihat Kota Blitar.

Persoalannya adalah, adakah yang secara khusus perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan proses kemunculan sebuah *gemeente* dan apakah *gemeente* itu sesungguhnya? Keterangan-keterangan berikut kelihatannya dapat membantu. *Pertama*,

"Selain kepada keresidenan, di wilayah Jawa Tengah otonomi juga diberikan kepada beberapa kota besar yaitu Kota Semarang (diatur dalam *Staatsblad* 1906 No. 120), Tegal (diatur dalam *Staatsblad* 1906 No. 123), Pekalongan (diatur dalam *Staatsblad* 1906 No. 124), dan Magelang (diatur dalam *Staatsblad* 1906 No. 125). Suatu kota dapat diberi otonomi jika ia merupakan kota besar yang memiliki cukup banyak penduduk Eropa dan berdekatan dengan daerah perkebunan tebu, kopi, dan sebagainya."³⁰

Kedua,

"Selain Batavia, data statistik tahun 1905 menunjukkan bahwa sesungguhnya ada delapan kota yang mempunyai masyarakat kulit putih lebih dari 1.000 orang [Batavia: 9.877]; enam di antaranya di Jawa: Surabaya (8.063), Semarang (5.126 orang), Buitenzorg (kini Bogor, 2.199 orang), Surakarta (1.572 orang), Yogyakarta (1.477 orang), dan Malang (1.353 orang)."³¹

³⁰ Dr. Dewi Yulianti, M.A., "Terbentuknya Provinsi Jawa Tengah," diakses dari <http://staff.undip.ac.id/sastra/dewiyulianti/2009/04/29/terbentuknya-propinsi-jawa-tengah/> pada Juli 2010.

³¹ Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Kajian Sejarah Terpadu)[,] Bagian I: Batas-Batas Pembaratan, halaman 78.

Ketiga,

"... in 1903 the Dutch government announced a decentralized system. In this new system, the municipality was allowed to manage their own administration, authority and finances through a city council that was autonomous from the central government in Batavia.... In 1906, the decentralization system was implemented in Semarang and only the natives were under the authority of the central government in Batavia (*inlandsch bestuur*) and represented by the native regent in Semarang. The Dutch, the Chinese, and other foreign inhabitants were under the city municipality."³²

Khusus terhadap keterangan ketiga di atas, sebuah catatan dapat diberikan:

*"The Inlandsch Bestuur governed the natives through the Regent (Bupati), the district chief, the assistance district chief, and the ward. On the other hand, the city municipality consist of a mayor (Burgemeester), board of Mayor and Eldermen (College van Burgemesster en Wethouders) and the local council (Gemeenteraad)..."*³³

Keempat, dengan mengutip Ronald G. Gill, seorang penulis, selain melihat bahwa kemunculan *gemeente* Pekalongan--seperti halnya *gemeente-gemeente* Tegal, Blitar, dan Banyumas, beriringan berlangsungnya proses "westernisasi" dari dari apa yang disebut sebagai "*oud Indische Stad*," menjelaskan bahwa

"Pusat pemerintahan kota gaya *Indisch* yang terletak di alun-alun diganti dengan pusat pemerintah modern di daerah yang baru yang lebih modern. Walikota [baca: *burgemeester*] sebagai penguasa kota [baca: *gemeente*]

³² Pratiwo, "The City Planning of Semarang 1900-1970," The 1st International Urban Conference, Surabaya, 23rd-25th 2004. Diakses dari <http://www.indie-indonesie.nl/content/documents/papers-urban%20history/pratiwo.pdf>. pada Juli 2010.

³³ *Ibid.*

yang sebelum ada undang-undang desentralisasi tidak ada dalam struktur administrasi kota, sekarang merupakan penguasa tertinggi di dalam kota [baca: *gemeente*]. Sebagai akibatnya maka harus dibangun belasan gedung kotamadya [baca: *gemeente*] diseluruh Jawa dengan arsitektur kolonial yang modern. Daerah baru tersebut terlepas sama sekali dari daerah alun-alun sebagai pusat kota lama. Daerah ini biasanya terletak dekat dengan pusat hunian orang Eropa yang baru dikembangkan. Contoh nyata kota-[]kota [baca: *gemeente-gemeente*] seperti itu misalnya adalah Malang, pusat kota lamanya di daerah alun-alun pada [tahun] 1928 dipindahkan ke komplek baru di daerah alun-alun bunder dengan bangunan gedung kotamadya [baca: *gemeente*] yang megah, terletak dekat komplek hunian orang Eropa yang dinamakan '*Gouverneur General Buurt*'".³⁴

Secara ringkas, keterangan-keterangan di atas mungkin dapat dirumuskan kembali demikian. Segera setelah di suatu tempat yang di sekitarnya terdapat "perkebunan tebu, kopi, dan sebagainya," sebuah permukiman "penduduk Eropa" atau "masyarakat kulit putih" kemudian terbentuk. Beriringan dengan tumbuh dan berkembangnya pemukiman tersebut menjadi tempat "hunian bagi bangsa Belanda," lahir kemudian sebuah *gemeente*--sebuah ruang (*space*) khusus yang hanya memasukkan ke dalamnya "the Chinese and other foreign inhabitants." [Sebagai catatan, menurut H.M.J. Maier: "*The classification into three groups--'Europeans,' 'Natives,' and 'Chinese & other foreign Orientals'--is presumably based on the division introduced by the Law of December 31, 1906 (with curiously enough, was not made operative until January 1, 1920)*"³⁵].

Pramoedya Ananta Toer menulis, "Pada 1743 wilayah ini [baca: Pekalongan] melalui perjanjian antara VOC dengan Paku

³⁴ Handinoto, "Perubahan Besar Morfologi Kota-Kota Di Jawa Pada Awal Dan Akhir Abad ke-20," *Dimensi Arsitektur*, Vol. 26--Desember 1998, halaman 6-7.

³⁵ "From Heteroglossia to Polyglossia: The Creation of Malay and Dutch in the Indies," *Indonesia*, No. 56

Buwono II jatuh ke tangan Belanda. Demikian juga sepanjang pesisir utara sampai ke Pasuruan di Jawa Timur.³⁶ Toer juga mencatat bahwa "semasa kolonial [(K)eresidenan Pekalongan] memiliki 17 pabrik gula. Pabrik-pabrik tersebut satu demi satu didirikan sejak awal abad ke-19."³⁷ Sementara itu, sejarawan Djoko Suryo menulis bahwa,

"Berakhirnya pemerintahan Pekalongan, seperti halnya wilayah lainnya, termasuk menjadi wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) mengadakan reorganisasi pemerintahan dengan membentuk kesatuan administrasi pemerintahan prefektur, yang pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816) diganti dengan sistem Residensi (*Residency*), yang selanjutnya diteruskan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda sejak 1816. Pada masa awal wilayah di Pesisir Utara Jawa bagian barat dibagi menjadi dua wilayah keresidenan, Wilayah Keresidenan Tegal dan Keresidenan Pekalongan. Keresidenan Tegal membawahi Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang, sementara Keresidenan Pekalongan, membawahi Kabupaten Pekalongan dan Batang. Pada akhir abad ke-19 kedua keresidenan itu digabung menjadi satu keresidenan, yaitu Keresidenan Pekalongan dan berlangsung hingga masa wilayah keresidenan di Indonesia dihapuskan pada sekitar 1950-an."³⁸ VOC 1799, daerah bekas wilayah kekuasaan[nya] di

³⁶ *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*, halaman 85.

³⁷ *Ibid.*, halaman 84-85.

³⁸ "Pekalongan, dari Desa Pesisir ke Kota Modern: Melacak Perjalanan Sejarah sebuah Kota di Daerah Pesisir Utara Jawa," halaman 122-123. Pembentukan "Hindia Belanda," sebagaimana dijelaskan secara ringkas oleh sejarawan Prancis Denys Lombard, selain didasarkan pada berbagai "ekspedisi militer," juga pada "percaturan diplomatik kompleks dan pelik yang berlangsung di Eropa, di seputar meja hijau, untuk menetapkan garis-garis imajiner di atas peta yang masih sangat tidak pasti." Lihat, karyanya *Nusa Jawa: Silang Budaya (Kajian Sejarah Terpadu)[,] Bagian*

Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sejak 1800 wilayah.

Mengutip sebuah studi, angka-angka kependudukan Keresidenan Pekalongan tahun 1859--Keresidenan Pekalongan yang membawahi dua kabupaten--tercatat sebagai berikut. Dari keseluruhan jumlah penduduk keresidenan, 282.427, jumlah "penduduk Eropa" tercatat sebanyak 433; "the Chinese" 3.695; dan "other foreign inhabitants," khususnya orang Arab, 411.³⁹ Jumlah penduduk Eropa tersebut memperlihatkan sebuah pertambahan yang signifikan, karena empat atau lima tahun sebelumnya, atau pada tahun 1854, "penduduk Eropa" hanya tercatat sekitar 332.⁴⁰

Dua hal dapat dicatat dalam kaitannya dengan "penduduk Eropa" ini. *Pertama*, hampir dapat dipastikan jumlah mereka bertambah setelah Pekalongan menjadi ibukota Keresidenan Pekalongan yang membawahi lima kabupaten (Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang), meskipun jumlahnya hingga tahun 1905 kelihatannya tidak melebihi 1.000. *Kedua*, mereka, "penduduk Eropa" atau "masyarakat kulit putih," kemudian menjadi "tampak lebih homogen"--menjadi "Belanda"--dengan "bahasa Belanda" sebagai bahasa yang digunakan "sehari-hari."⁴¹

Suatu perubahan terjadi beriringan dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan tentara Jepang Maret 1942 dan sejak itu

I: Batas-Batas Pembaratan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, halaman 76-77.

³⁹ Edi Cahyono, 'Karesidenan Pekalongan Kurun Cultuurstelsel: Masyarakat Pribumi Menyongsong Pabrik Gula,' khususnya 'Bab III: Produksi Barang-Dagangan Di Pekalongan,' <http://members.fortunecity.com/edicahy/thesis/bab3.htm>., diakses pada Juli 2010.

⁴⁰ "Pekalongan, dari Desa Pesisir ke Kota Modern: Melacak Perjalanan Sejarah sebuah Kota di Daerah Pesisir Utara Jawa," halaman 123-124.

⁴¹ Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya (Kajian Sejarah Terpadu)*, [Bagian I: Batas-Batas Pembaratan, halaman 80. Juga Maier, "From Heteroglossia to Polyglossia: The Creation of Malay and Dutch in the Indies."

berlangsung proses pembubarannya. Elemen "penduduk Eropa" atau "masyarakat kulit putih" yang berwarna "Belanda" pun dengan segera atau mendadak menghilang, meninggalkan tempat "hunian"-nya. "Stadsgemeente," Pekalongan maupun yang lainnya di Jawa atau di tempat-tempat lain di Hindia Belanda, berubah menjadi "kota" dan "'walikota'... menggantikan 'burgemeester'". Sejak saat itu yang berada di dalam *space* tersebut adalah "Chinese & other foreign Orientals" dan "Natives."

Adakah yang dapat dicatat dari kenyataan tersebut dan perkembangannya hingga kini? Dua hal berikut menarik untuk dicatat. *Pertama,*

"It would be seem appropriate to turn to Furnivall (1939, 1948) as he developed the concept of plural society based upon Indonesian data, and he is referred to so frequently in the literature on pluralism and ethnicity. What is usually emphasized in his writings is the notion of different social orders within the same political unit existing side by side, integrated in the market place, but otherwise separate. But for Furnivall the viability of the political unit depended upon the interconnections between these separate social orders, and in any case he tells us very little about the ethnic groups of Indonesia. Furnival writes '... in the Netherlands India, the European, Chinaman and Native are linked vitally as Siamese twins and, if rent asunder, every element on the union must dissolve in anarchy (1939: 447). Although Indonesia has had serious problems in achieving economic and political stability in the two decades since independence the country has not dissolved in anarchy and the Natives now appear to be doing reasonably well in conducting the affairs of the fifth largest nation in the world. The plural society for Furnivall refers to 'the Eruropean, Chinaman and Native,' and not to Javanese, Sundanese, Malay, Minangkabau, and other Indonesian groups. He does not differentiate within the category of Native and he has a completely outside or European view of Indonesian pluralism. The

presence of the Dutch changed the relationship among Indonesians, and had this been described it would have provided an invaluable comparative base for later studies of ethnic relations in post-independence Indonesia, but Furnivall did not do so and for our study, has little value."⁴²

Pernyataan (yang, selain agak kacau secara sejarah, jelas tidak terlalu tepat menyamakan "Indonesia" dengan "the Netherlands India") dapat dibandingkan dengan sebuah observasi mengenai "Taman Mini Indonesia Indah" (TMII) berikut ini.

*"In the completed Mini all this has gone one step further, since the houses are 'pure adat' and no one lives in them. Warehouses of regional artifacts, they are in effect icons of ethnicity, and Mini as a whole an icon of 'Indonesian-ness' generated by the formal juxtaposition of these ethnicities. Indeed, its significance as all the more salient to the extent that concrete and immediate life is drained from its architectural components. Nothing more poignant, in a way, than that this sign-for-Indonesia should be located in the living heart of the metropolis where Indonesia is so much in becoming; indeed, that living Indonesians should required to make way for Indonesian-ness."*⁴³

Kedua, dalam "Minoritas" (*Kompas*, 15 Mei 2010)--sebuah artikel mengenai "Chinese," Jaya Suprana dalam artikel tersebut mengatakan dua hal. *Pertama*,

"... saya baru tersadar bahwa meski *de jure* sudah resmi menjadi warga negara[,] *de facto* saya diperlakukan seperti bukan warga negara Indonesia. Terutama saat huru-hara

⁴² Lihat Edward M. Bruner, "The Expression of Ethnicity in Indonesia," dalam Abner Cohen, ed., *Urban Ethnicity*, London: Tavistock Publications Limited, 1974, halaman 254-255.

⁴³ Lihat Benedict R. O'G. Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990, halaman 182.

rasialis yang terjadi menjelang ataupun pascareformasi secara berkala, mendadak saya sadar bahwa ternyata saya keturunan Cina."

Kedua,

"Ternyata saya tergolong minoritas di dalam minoritas! Di masyarakat keturunan Cina di Indonesia, juga masih ada diskriminasi. Warga keturunan Cina di Indonesia masih terpecah-pecah menjadi aneka-ragam suku, antara lain Khek, Hok Jia, Konghu, Tiochiu, Hakka, dan Babah. Ada suku yang merasa diri lebih superior ketimbang suku lain, padahal sama-sama Cina. Secara psikokultural, warga keturunan Cina di Indonesia terbagi menjadi kelompok yang menganggap diri asli dan kelompok yang dianggap tidak asli."

Kalaulah, dengan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa telah berlangsung sebuah proses "pemecahan" dan "pembagian" di dalam kategori "Native" dan "Chinese," maka hal yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh adalah: apakah proses serupa berlangsung pula pada "other foreign Orientals," khususnya kalangan Arab, dan kesemua proses tersebut dapat diketemukan dalam ruang-ruang sosial yang menjadi fokus penelitian dan diskusi?

2.5 Pekalongan yang "25 Agustus 1622": Sebuah Kabupaten "Mataram Islam"

Dalam "[u]raian singkat[nya]," sejarawan Djoko Suryo menulis,

"Menurut... Babad Pekalongan, kelahiran desa yang kemudian menjadi kota Pekalongan berkaitan erat dengan kisah tokoh Jaka Bahu [yang] berasal dari desa Kesesi, yang disuruh oleh pamannya Ki Cempaluk untuk mengabdikan kepada Sultan Agung, Raja Mataram. Jaka Bahu mendapat tugas untuk memboyong Putri Ratamsari dari Kalisalak (Batang) ke istana, akan tetapi Jaka Bahu jatuh cinta pada putri tersebut. Sebagai hukumannya, Jaka Bahu diperintahkan untuk mengamankan daerah pesisir yang terus diserang Bajak Laut Cina. Ia kemudian bersemedi di Hutan

Gambiran. Setelah itu, Jaka Bahu berganti nama Bahu Reksa, dan mendapat perintah dari Sultan Agung untuk mempersiapkan pasukan dan membuat perahu untuk membentuk armada yang kemudian melakukan serangan terhadap Kumpeni yang ada di Batavia (1628 dan 1929). Setelah mengalami kegagalan untuk memenangkan pertempuran dengan Belanda di Batavia, Bahu Reksa memutuskan untuk kembali dan bertapa *Ngalong* (bergantung seperti kelelawar) di Hutan Gambiran. Dari tempat dan cara bertapa di Hutan Gambiran itulah Kota Pekalongan kemudian lahir. Sumber yang sama[] juga menyebutkan bahwa seorang Cina bernama Tan Kwie Jan... minta ijin kepada Raja Mataram untuk berdagang di Kota Pekalongan dan bertemu dengan Jaka Bahu di Hutan Gambiran. Tan Kwie Jan ini kemudian disebut-sebut menjadi bupati di Kota Pekalongan dengan nama Jayaningrat.

Akan tetapi, menurut De Haan, seorang Belanda yang pada 1622 melakukan perjalanan ke Mataram lewat daerah Pesisir Utara Jawa ini, menyebutkan bahwa daerah Pekalongan pada masa itu diperintah oleh Pangeran Mandureja dan pada 1623 digantikan oleh Pangeran Upasanta.[] Keduanya merupakan pejabat teras Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung. Seperti halnya Bahu Reksa, Mandureja dan Upasanta juga ditunjuk menjadi laksamana perang untuk menyerang Kumpeni di Batavia. Sementara itu, *Serat Raja Purwa* juga menyebutkan bahwa Pekalongan kemudian diperintah oleh Adipati Jayadiningrat. ... Nagtegaal, dalam *Riding the Dutch Tiger* (1988), menyebutkan bahwa secara berturut-turut Bupati Pekalongan dijabat oleh keluarga besar Jayadiningrat, yaitu Jayadiningrat I (1707-1726), Jayadiningrat II (1726-1743), Jayadiningrat III (1743-1759), dan Jayadiningrat IV (1759-tidak diketahui)."⁴⁴

⁴⁴ "Pekalongan, dari Desa Pesisir ke Kota Modern: Melacak Perjalanan Sejarah sebuah Kota di Daerah Pesisir Utara Jawa," halaman 118-119.

Berikut merupakan pernyataan yang didasarkan pada "T[e]am of Researcher History of Regency Pekalongan" atau sebagaimana ekspresi aslinya "Ti[]m Peneliti Sejarah Kabupaten Pekalongan:"

"Day Become Pekalongan Regency have been specified on Thursday Legi is Date of 25 August 1622 or at 12 Robiu'l of Early 1042 H at a period to governance Kyai Mandoeraredja. He is represent Bupati/Adipati showed and lifted by Glorious Sultan of Hanyokrokusumo/King Mataram Islam and at one blow as Pekalongan I Regent, while day determination and date of taken away from as Regent lifting tradition and all new functionary is the Monarchic environment of Mataram."⁴⁵

Atau--sebagaimana ekspresi aslinya:

"Hari Jadi Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan pada Hari Kamis Legi Tanggal 25 Agustus 1622 atau pada 12 Robiu'l Awal 1042 H pada masa pemerintahan Kyai Mandoeraredja, beliau merupakan Bupati/Adipati yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo/Raja Mataram Islam dan sekaligus sebagai Bupati Pekalongan I, sedangkan penentuan hari dan tanggalnya diambil dari sebagaimana tradisi pengangkatan Bupati dan para pejabat baru di lingkungan Kerajaan Mataram."⁴⁶

Sebagaimana terbaca (dari kutipan kedua), pernyataan "T[e]am of Researcher History of Regency Pekalongan" atau "Ti[]m Peneliti Sejarah Kabupaten Pekalongan" berisi tentang waktu pengangkatan "Kyai Mandoerareja" oleh "Glorious Sultan of Hanyokromo/King Mataram Islam" (atau "Sultan Agung Hanyokrokusumo/Raja

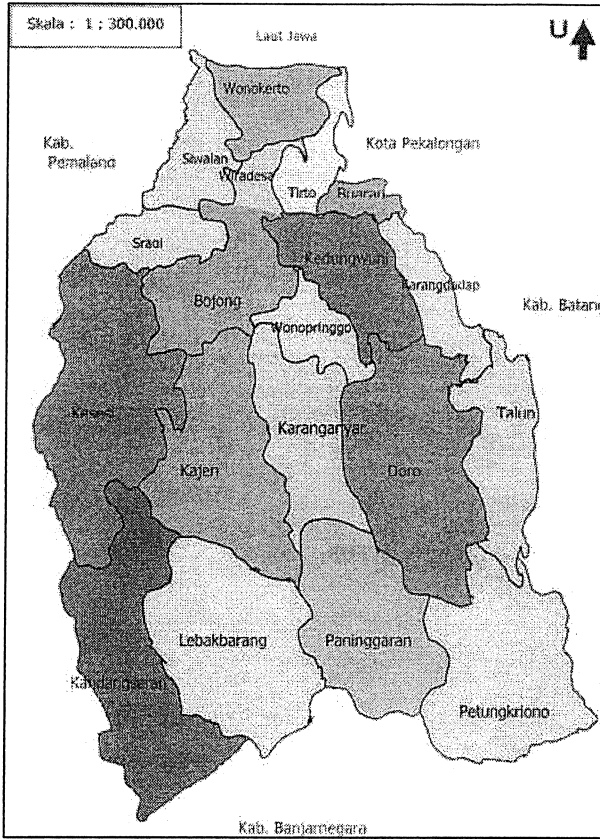
⁴⁵ "Day Become Pekalongan Regency," http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=105 diakses pada Juli 2010.

⁴⁶ <http://iwinkeren.wordpress.com/2008/05/29/sejarah-kabupaten-pekalongan/> diakses pada Juli 2010.

Mataram Islam") sebagai "Pekalongan I Regent" (atau "Bupati Pekalongan I").

Tiga ratus tujuh puluh sembilan tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2001 bukan hanya saat ketika Kantor Bupati Pekalongan pindah ke "Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan di Kajen", tetapi juga merupakan "momen diawalinya Kajen sebagai [i]bukota Kabupaten Pekalongan." Selesai dibangun pada 21 Februari 2003, "rumah dinas Bupati dan Pendopo" mulai digunakan pada 5 April 2003. Berpenduduk 891.422 (pada 2006), Kabupaten Pekalongan terbagi ke dalam 19 kecamatan, 270 desa dan 13 kelurahan. Kajen sendiri, "pusat pemerintahan" sejak 2001, satu di antara kecamatan (Lihat Gambar 2.3).

Gambar 2.3 Peta Kabupaten Pekalongan⁴⁷



⁴⁷ Diunduh dari [http://www.google.co.id/imglanding?q=Kabupaten% 20Pekalongan &imgurl=http://www.pekalongankab.go.id/web/images/ stories/peta/global.jpg &imgrefurl=http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php%3Foption%3Dcom content%26task%3Dview%26id%3D240%26Itemid%3D82&h=550&w=400&sz=28&tbnid=iUpcEYhYrKjwqM:&tbnh=133&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DKabupaten%2BPekalongan&hl=id&usq= dAkeuYx09WMLC1mUoo39IqYQe_Q=&ei=V7TrS57bC5DHrAflux6WIBg&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct =image&ved=0CDEQ9QEwBg&start=0#tbnid=iUpcEYhYrKjwqM&start=2](http://www.google.co.id/imglanding?q=Kabupaten%20Pekalongan&imgurl=http://www.pekalongankab.go.id/web/images/stories/peta/global.jpg&imgrefurl=http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D240%26Itemid%3D82&h=550&w=400&sz=28&tbnid=iUpcEYhYrKjwqM:&tbnh=133&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DKabupaten%2BPekalongan&hl=id&usq=dAkeuYx09WMLC1mUoo39IqYQe_Q=&ei=V7TrS57bC5DHrAflux6WIBg&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CDEQ9QEwBg&start=0#tbnid=iUpcEYhYrKjwqM&start=2) diakses Juli 2010.

Menarik untuk dicatat bahwa belakangan sebuah catatan dikemukakan oleh "pemerhati sejarah dan kebudayaan" untuk "meninjau kembali" penetapan "tanggal 25 Agustus 1622 M" sebagai "Hari Jadi Kabupaten Pekalongan" tersebut.⁴⁸ Dapat dibaca bersamaan dengan "uraian" Djoko Suryo[berikut,

"[a]kan tetapi, menurut De Haan, seorang Belanda yang pada 1622 melakukan perjalanan ke Mataram lewat daerah Pesisir Utara Jawa ini, menyebutkan bahwa daerah Pekalongan pada masa itu diperintah oleh Pangeran Mandureja dan pada 1623 digantikan oleh Pangeran Upasanta.[] Keduanya merupakan pejabat teras Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung],"

Catatan yang diajukan (meski agak panjang) adalah demikian.

"Dua Bersaudara

Dr. HJ de Graaf, sejarawan kawakan dari Belanda, pernah bekerja dan menetap di Indonesia selama bertahun-tahun, telah menulis berbagai buku sejarah Jawa. Diantaranya, lima jilid mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Islam Jawa dan Mataram dengan judul yang berbeda-beda.

Dalam menganalisis data-data, de Graaf selalu membandingkan antara sumber-sumber asli pribumi dan sumber-sumber asing. Dari karya-karya tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa wilayah Pekalongan bagian selatan (kabupaten), antara 1622–1623 M berada di bawah kekuasaan dua bersaudara Patih Dalem Kerajaan Mataram, yaitu Kiai Adipati Mandurareja dan Kiai Adipati Upa Santa (Puncak Kekuasaan Mataram: 123).

Keduanya merupakan cucu Pangeran Mandaraka yang dikenal sebagai paman dan penasehat Penembahan Senapati

⁴⁸ "Meninjau Hari Jadi Pekalongan," http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=82 diakses pada Juli 2010.

(1588–1601), pendiri Kerajaan Mataram, kakek Sultan Agung.

Para penguasa Pekalongan itu tidak pernah berdiam di Pekalongan. Kiai Adipati Mandurareja tinggal di Kutha Dalem (Kota Mataram, sekarang Kotagede), sedangkan Kiai Adipati Upa Santa tinggal di Kutha Jaba yang kemudian bernama Yogyakarta (Awal Kebangkitan Mataram 117–119).

Jadi, mereka bukanlah bupati-bupati Pekalongan. Lagi pula, selain Pekalongan, Kiai Mandurareja juga mempunyai kekuasaan di beberapa daerah pedalaman, misalnya di sebelah selatan Selimbi.

Pada masa kejayaan Mataram, Sultan Agung biasa memberikan daerah-daerah tertentu di bawah penguasaan pembesar-pembesar istana yang mempunyai hubungan pribadi dengannya. Tetapi, daerah-daerah tersebut tidak pernah mereka diami.

Pemerintahannya diwakilkan kepada seorang kiai lurah. Misalnya, seperti yang terdapat di wilayah Sumber dan Pernalang. Kedua wilayah itu oleh Sultan Agung diberikan kepada pamannya, Pangeran Purbaya, dan pengelolanya dijalankan oleh kiai lurah. Kemungkinan besar, pemerintah di Pekalongan pun dikelola dengan cara demikian. Ada sebuah fragmen penting yang menggambarkan status rakyat Pekalongan pada tahun tersebut. Pada 16 Juli 1622 M, seorang utusan Gubernur Jendral Jan Pietersz Coen, yakni Dr. Hendrick de Haen [De Haan?], sempat singgah di Pekalongan dalam rangka perundingan damai dengan pihak Mataram.

Di Pekalongan, ia bersantap malam bersama Tumenggung Tegal seraya membicarakan status rakyat di beberapa daerah. De Haen lalu bertanya kepada Tumenggung Tegal, apakah status rakyat di daerah Kedu dan Bagelen sama dengan rakyat Pekalongan, yakni sebagai b[u]dak-budak?

Tumenggung [T]egal menjelaskan, rakyat Kedu dan Bagelen merupakan 'orang-orang merdeka'. 'Mereka bebas dari kerja paksa dan wajib militer, dan hanya berkewajiban membayar

pajak tahunan, baik dalam bentuk hasil bumi maupun dalam bentuk harta'. Adapun rakyat Pekalongan 'semuanya budak Pengeran Mandurareja' (Puncak Kekuasaan Mataram: 123-124).

Masa Suram

Dari rekonstruksi fakta-fakta itu, menjadi jelas, status rakyat Pekalongan pada 1622 M ialah sebagai 'budak-budak' di bawah kekuasaan Kiai Adipati Mandurareja dan Kiai Adipati Upa Santa.

Jadi, berbeda dari status rakyat Kedu dan Bagelen, yang merupakan 'orang-orang merdeka'. Kedu dan Ba[gelen merupakan 'wilayah perdikan' yang memiliki pemerintahan sendiri, sedangkan Pekalongan tidak. Kemungkinan besar, pemerintahannya diwakilkan kepada seorang kiai lurah, seperti halnya wilayah Pemasang.

Dengan demikian, 1622 M merupakan masa suram bagi rakyat Pekalongan (kabupaten). Karenanya, layakkah 1622 M diperingati tiap tahun sebagai Hari Jadi Kabupaten Pekalongan? Bukankah itu berarti memperingati hari-hari perbudakan sendiri? Padahal daerah-daerah lain berlomba-lomba memperingati hari kemerdekaannya.

Maka, sejarah Hari Jadi Kabupaten Pekalongan memang harus ditinjau kembali. Tentu saja dengan mempertimbangkan faktor momentum historis yang representatif, yang layak diperingati setiap tahunnya.

Juga harus melibatkan lebih banyak ahli untuk menelusurinya. Sebab, bukankah peringatan hari jadi dimaksudkan untuk menghidupkan kembali prestasi-prestasi masa silam? Tujuannya, tak lain, agar masa silam kita dapat dijadikan sebagai kebanggaan bersama serta ilham segar bagi masa depan. Itulah, satu agenda yang harus segera dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan."⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan apa yang baru saja dikemukakan, dua hal penting untuk diperhatikan dalam upaya melihat lebih jelas permasalahannya. *Pertama*, berbeda dengan "'keresidenan' dan 'residen' yang berasal dari 'kata-kata Belanda... 'residentie' dan 'resident,'" dan diperkenalkan pertama kali oleh VOC, "istilah 'kabupaten'" yang dalam kata Belanda "'regentschap'" "sudah dikenal dalam bahasa Jawa pada zaman kerajaan-kerajaan yang lampau" dan berasal dari dua kata yaitu "'bu'" [yang] berarti tanah" dan "'pati' [yang] berarti tuan" sehingga "bupati" "berarti 'Tuan yang berkuasa di atas tanah'". *Kedua*, keterangan Pramoedya Ananta Toer berikut.

"... sedikit tentang Residen dan Asisten Residen. Bukankah aneh istilah Kompeni ini? Residen! ... arti sebenarnya: penduduk[.] Dalam pemerintahan kolonial, Kompeni atau VOC pada mulanya berarti kepala kantor dagang Kompeni--suatu pangkat sedikit saja di bawah Duta. Pendeknya, di antara pedagang dan diplomat. Dengan semakin kuat dan berkuasanya Kompeni lambat laun ia membawahi beberapa kabupaten dalam urusan penerimaan kontingent atau wajib setor hasil bumi. Ia menerimanya dari para bupati, sedang bupati dari rakyatnya. Pejabat ini tidak digaji oleh pemerintah Kompeni. Penghasilannya berasal dari persentase penerimaan kontingent yang dibeli dan diangkut ke Eropa oleh kapal-kapal Kompeni. Untuk menaikkan penghasilan, seorang residen cukup menekan bupati untuk menaikkan setoran. Untuk dapat memenuhi keinginan itu, pada gilirannya [bupati] menuntut lebih banyak dari rakyatnya. Kontingent yang diwajibkan tidak selalu sama macamnya, tergantung pada pertanian setempat. Setidak-tidaknya komoditi untuk pasar internasional, terutama Eropa adalah beras dan garam untuk komoditi Hindia. Juga minyak kelapa. Sedang kopi untuk pasar internasional dan menjadi sumber keuangan untuk VOC nomor satu. Dengan rusaknya angkatan laut dan armada dagang Belanda, penjualan kopi ke Eropa sudah tidak mungkin. VOC menjualnya pada kapal-kapal dagang Amerika, yang netral dalam perang besar Prancis lawan Persekutuan Eropa. Dalam pemerintahan Daendels,

para Residen dan Asisten Residen dicabut haknya mengurus kontingent. Mereka sekarang mulai digaji. Kontingent diharuskan disetorkan ke gudang-gudang pemerintah Kompeni. Pengawasan pemerintah diharapkan dapat memberantas persekongkolan antara para Residen serta Asisten Residen dengan para Bupati dalam memeras rakyat kecil. Juga para Bupati dikurangi kekuasaannya. Mereka tadinya juga tidak mendapat gaji, sekarang mendapat, berarti dari penguasa daerah setempat mereka sekarang menjadi birokrat, menjadi pegawai Kompeni."⁵⁰

2.6 Kabupaten dan "Kota" Jepara: Melihatnya dari Kabupaten dan Kota Pekalongan

Sepintas, suatu perbandingan antara Kabupaten Pekalongan yang berslogan "Santri" dan Kota Pekalongan yang "(Saudagar) Batik" dengan Kabupaten Jepara dapat dilakukan. Khususnya jika diingat slogan-slogan serupa juga dapat ditemukan di Jepara, yaitu "Jepara Bumi Kartini" dan "Jepara Kota Ukir." Meskipun untuk slogan pertama seharusnya berbunyi "Kabupaten Jepara Bumi Kartini" dan yang kedua "Kota [kecamatan] Jepara kota ukir."

Sementara suatu perbandingan antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Jepara--yang pada tahun 1988 menetapkan "hari jadi"-nya pada 10 April 1549⁵¹--dapat sepenuhnya dilakukan, hal yang serupa agaknya tidak dapat dilakukan terhadap Kota Pekalongan dan "Kota Jepara." Yang belakangan lebih tepat dilihat sebagai sebuah "wilayah urban" di dalam kabupaten. "Kota Jepara," yang merupakan dua kecamatan, sepenuhnya dapat dilihat sebagai "Kajen"-nya Kabupaten Jepara.

⁵⁰ *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*, halaman 24-25.

⁵¹ Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II [Kabupaten] Jepara Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penetapan Hari Jadi Jepara.

Terbagi ke dalam 14 kecamatan di tahun 2004,⁵² Kabupaten Jepara mempunyai penduduk sebanyak 1.100.000. Sementara itu, mengutip sebuah "studi," diketahui bahwa,

"Pertumbuhan penduduk di Kota Jepara semakin pesat, sehingga kepadatan penduduk sudah tidak sebanding dengan lahan yang tersedia. Kecamatan Jepara memiliki 12 kelurahan dengan luas 1.094,500 ha dan Kecamatan Tahunan memiliki tujuh kelurahan dengan luas 2.243,930 ha, sehingga luas Kota Jepara yang memiliki 19 kelurahan adalah 3.338,430 ha.... Penduduk Kota Jepara tahun 2003 berjumlah 100.337 jiwa, tahun 2004 berjumlah 103.579 jiwa, diperkirakan tahun 2005 berjumlah 106.928 jiwa, tahun 2006 berjumlah 110.382 jiwa, tahun 2007 berjumlah 113.949 jiwa, tahun 2008 berjumlah 117.631 jiwa, tahun 2009 berjumlah 121.432 jiwa, dan pada tahun 2010 diperkirakan berjumlah 125.356 jiwa...."⁵³

Kalaulah Jepara--yang "berasal dari perkataan Ujung Para, Ujung Mara, dan Jumpara" dan "berarti sebuah tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah"--telah masuk ke dalam buku "Sejarah Baru Dinasti Tang (618-906 M)," dikenal sejak abad ke-XV sebagaimana dicatat Tome Pires dalam "Suma Oriental"-nya, dan "berkembang pesat" pada masa Ratu Retno Kencono yang bergelar Nimas Ratu Kalinyamat (1549-1579), yang dua kali "menggempur Portugis" di "pusat"-nya di "Malaka," masing-masing tahun 1551 dan tahun 1574,⁵⁴ maka masa kemunduran--atau jika tidak

⁵² Pada 2009 jumlah kecamatan menjadi 16. Tambahan dua kecamatan terjadi karena proses pemekaran.

⁵³ Junaidy Abdillah, 'Pola Penyebaran Taman Kota dan Peranannya Terhadap Ekologi Di Kota Jepara,' Skripsi Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1 Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan, Jurusan Teknik SIPIL Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2005.

⁵⁴ "Sejarah," http://www.pn-jepara.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5:sejarah-kab-jepara&catid=67:sejarah-jepara&Itemid=78 diakses Juli 2010.

dapat dikatakan demikian, stagnasi--Jepara mulai terjadi beriringan dengan muncul dan menguatnya VOC serta, beriringan dengan bubarnya VOC, terbentuknya Hindia Belanda (pertama kali) di bekas-bekas wilayah VOC.

Terkait dengan Jepara, Pramoedya Ananta Toer mencatat,

"Dalam pelayarannya dari Maluku ke Batavia pada 1619, armada VOC singgah ke Jepara yang waktu itu masih pelabuhan, belum tertutup lumpur selebar 7 kilometer dan melakukan genosida ditambah pembakaran separuh Kota Jepara."⁵⁵

Masih terkait dengan Jepara, dijelaskan pula bahwa:

"Kabupaten ini [Pati] juga penghasil gula dan terdapat 3 pabrik gula. Sebagai halnya dengan Kudus, Pati juga penghasil kapok terkemuka di Jawa.

Pati sebagai ibukota kabupaten mengalami pasang-surut. Setelah Jalan Raya Pos sampai ke sini, Daendels memindahkan ibukota keresidenan dari Jepara ke sini [Pati] sehingga tempat yang semula tidak berarti menjadi penting. Tetapi setelah Jepara dimasukkan ke dalam Keresidenan Semarang, Kota Pati seakan lampu minyak yang kekurangan minyak. Semasa kemerdekaan nasional kota ini mendapat kehormatan jadi ibukota keresidenan, tetapi semaraknya yang lama tetap tak terpulihkan."⁵⁶

⁵⁵ *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*, halaman 70.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 96.

BAB III

PEKALONGAN DAN JEPARA, KOTA-KOTA YANG 'BERBATIK' DAN 'BERUKIR': 'MODERN-ISASI' WARISAN TRADISIONAL⁵⁷

3.1 Pendahuluan

Pekalongan dan Jepara sama-sama kota pantai di Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Namun, gerak dan dinamika kedua kota tersebut berbeda karena masing-masing kota mengembangkan kekhasan daerah masing-masing, yaitu Pekalongan dengan batiknya dan Jepara dengan ukirannya. Kekhasan tersebut bukan hasil ciptaan yang baru, melainkan warisan budaya nenek moyang yang dipertahankan dan dikembangkan sampai hari ini. Kesamaan-kesamaan yang dimiliki ini tidak menyebabkan proses transformasi sosial yang terjadi di kedua kota tersebut sama karena ada banyak faktor yang menyebabkan keduanya mempunyai proses perkembangan yang berbeda. Selain letak geografis, perbedaan karakteristik masyarakat, kondisi sosial-politik, serta pengaruh pasar domestik dan global terhadap sektor andalan masing-masing kota, juga sangat menentukan gerak langkah dan perubahan kota yang bersangkutan.

3.2 Kota Batik Pekalongan

Pekalongan hanyalah sebuah kota kecil di kawasan Pantura. Akan tetapi, sebagai sebuah kota di pesisir Pantura, Pekalongan mempunyai sejarah sebagai kota perikanan yang panjang sehingga dibanding daerah-daerah di sekitarnya, seperti Tegal, Pemalang, dan Batang, Pekalongan sudah lebih maju, dengan adanya beberapa pabrik pengalangan ikan, seperti Bali Maya Food dan Blue Sea

⁵⁷ Ditulis oleh Thung Ju Lan.

Industry. Namun demikian, menurut informasi, lebih banyak nelayan dari luar (seperti dari Bagan Siapi-Api) yang melakukan penangkapan di wilayah perairan Pekalongan daripada nelayan lokal.

Sejak 2006 terjadi pemisahan yang jelas antara Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan ditetapkannya Kajen yang berjarak 28 km dari Kota Pekalongan sebagai ibukota kabupaten. Untuk sebagian kalangan, pembagian antara kota dan kabupaten ini telah terjadi pada tanggal 1 April 1906, ketika Belanda dengan *Staatblaad* No. 124 menetapkan Pekalongan sebagai sebuah *Gemeente*, sebuah kota praja, dengan *Burgermeester*, H.J. Kuneman (Memori, hlm. 1). Sepertinya, tanggal tersebut diambil sebagai hari jadi Kota Pekalongan karena hari itu jatuh pada hari Minggu *Pon* atau *Ngahad Pon 6 Safar 1836 Hijriah*, yang menurut penanggalan/perhitungan Jawa terkait dengan *Surya Sengkala "Rasa Swarga Gapuraning Bumi"* atau rasa kebahagiaan membangun nagari/kota, serta *Candra Sengkala "Endahing Tri Naga Manunggal"* atau pemerintah dan rakyat bersatu untuk membangun (*Ibid.*). Hari ulang tahun Kota Pekalongan tanggal 1 April ini mulai diperingati pada tahun 2007 di bawah pimpinan Walikota Dr. H.M. Basyir Ahmad dan wakilnya H. Abu Almafachir, yang terpilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung tanggal 7 April 2005.

Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia dan masa Orde Baru, Kota Pekalongan masih merupakan kotamadya tingkat II yang setara dengan kabupaten tingkat II, dan berada di bawah pimpinan dan pengawasan Provinsi Jawa Tengah yang beribukota Semarang. Penetapan dan pemisahan Kota dan Kabupaten Pekalongan pada masa Reformasi adalah sejalan dengan UU Otonomi Daerah 1999 dan 2001, akan tetapi alasan praktis pemisahan tersebut sepertinya hanya berupa pembagian kekuasaan semata, karena secara ekonomi dan budaya, tidak ada perbedaan yang berarti antara Kabupaten dan Kota Pekalongan.

Perbedaan yang paling jelas hanyalah pada bidang profesi yang banyak digeluti oleh masyarakatnya. Penduduk Kabupaten

Pekalongan lebih banyak bekerja di bidang pertanian (khususnya sawah padi), dengan sampingan membuat batik. Sementara itu, penduduk Kota Pekalongan⁵⁸ yang 66% di antaranya adalah angkatan kerja produktif cenderung berkonsentrasi pada bidang perbatikan dan kuliner. Sekitar sepuluh tahun terakhir ini, Kota Pekalongan mengalami perubahan yang cukup pesat dengan munculnya supermarket-supermarket, seperti Hypermart dan Carrefour. Akan tetapi, seperti dikatakan seorang narasumber, tidak banyak yang berubah dalam hal masyarakatnya, khususnya karakteristik orang Pekalongan sebagai pedagang dan pengusaha batik.

Yang disebut Kota Pekalongan pada hakikatnya adalah daerah di sekitar dan sepanjang sungai Loji, memanjang dari Pantai Pasir Kencana di utara, yang berhadapan dengan Laut Jawa, sampai ke Buaran di kecamatan Pekalongan Selatan yang terletak di jalan menuju ke Pekajangan. Di barat berbatasan dengan Kecamatan Wiradesa, yang merupakan bagian dari Kabupaten Pekalongan yang beribukota di Kajen dan terletak di jalan yang menuju Jakarta. Di timur Pekalongan bersebelahan dengan Batang pada jalan yang menuju Semarang. Secara administratif, Kota Pekalongan terdiri dari 47 kelurahan yang terbagi atas empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan Utara (10 kelurahan), Kecamatan Pekalongan Selatan (11 kelurahan), Kecamatan Pekalongan Timur (13 kelurahan), dan Kecamatan Pekalongan Barat (13 kelurahan). Luas Kota Pekalongan adalah 45,25 km² atau 0,14% dari luas seluruh wilayah Jawa Tengah.

Kota Pekalongan menamakan dirinya kota Batik, yang secara nyata mengacu pada produk batik yang dihasilkannya dan secara simbolik untuk menggambarkan keinginan pemerintah kotanya dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang "Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif". Identitas Kota Pekalongan sebagai kota batik semakin diperkuat dengan diresmikannya sebuah Museum Batik Nasional di

⁵⁸ Menurut data statistik, penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2009 berjumlah 298.563 jiwa, yang terdiri dari 149.785 laki-laki dan 148.778 perempuan.

kota ini (jalan Jatayu No. 3, di gedung bekas kantor walikota dan kantor Dinas Pendapatan Daerah/Dispenda) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli 2006 (BPPT, 2009:14). Di samping itu, telah pula didirikan Politeknik Batik Pusmanu.

Konstruksi Kota Pekalongan sendiri sebagai sebuah kota lama ditata meniru kota-kota kerajaan Jawa, di mana pusat kegiatan berada di alun-alun, khususnya di malam hari. Walaupun sudah ada 'alun-alun' baru di depan kantor Walikota, yang disebut 'Lapangan Mataram', alun-alun lama yang terletak di depan Hypermart sepertinya lebih menarik masyarakat dalam mencari 'jajanan'. Dari keberadaan beberapa gedung tua di daerah ini, seperti kelenteng, gedung keresidenan, dan masjid tua, bisa disimpulkan bahwa daerah sekitar jembatan Loji merupakan pusat kota Keresidenan Pekalongan di masa lalu.

Tipe kota seperti ini, bagi Evers (2007)⁵⁹, bukanlah merupakan konsep kota sebagaimana yang dikenalnya di negara-negara Barat, melainkan sebuah distrik atau kabupaten, karena seperti dikatakannya, "*Though settlements could be elevated to the status of kota raya, kota madya, or kota administratif, the head of the city administration, the wali kota, had more or less the same rights and obligations as a bupati or district head*" (2007:54). Artinya, "tidak ada institusi-institusi perkotaan dan tidak ada konsepsi tentang daerah perkotaan" sebagaimana konsep kota di Eropa pada masa abad pertengahan (yaitu "*a city with a bourgeoisie*"⁶⁰). Hal ini dikatakannya karena dalam pengamatannya, sektor jasa di kota-kota Indonesia "masih sangat kuat didominasi orang pedagang kecil" atau apa yang disebutnya sebagai "*petty-trade*", sehingga ia melihat kota-kota di Indonesia mengalami apa yang dikatakannya "*urban*

⁵⁹ "The end of Urban Involution and the Cultural Construction of Urbanism in Indonesia", *Internationales Asienforum*, Vol. 38 (2007), No. 1-2, pp. 51-65, http://mpira.ub.uni-muenchen.de/7566/1/MPRA_paper_7566.pdf. diakses pada Oktober 2010.

⁶⁰ *Ibid.*

involution” yang artinya ”lebih banyak kesamaannya”, di mana ”kompleksitas bertambah tanpa perubahan evolutif, jangankan berbicara tentang perubahan yang revolusioner”.⁶¹ Kondisi ini juga yang tampak pada Pekalongan. Walaupun lalu lintas di Kota Pekalongan semakin padat, perkembangan aktivitas ekonomi bukan terjadi pada kelas pengusaha besar atau *bourgeoisie*, melainkan lebih pada kelas pedagang kecil yang berserakan di seluruh kota.

Memahami transformasi sosial perkotaan di kawasan Pantura melalui studi kasus Pekalongan, bukanlah hal yang mudah karena data tertulis tentang Pekalongan tidak banyak. Waktu penelitian yang sangat singkat juga menjadi kendala untuk melakukan penelitian antropologis yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini lebih merupakan 'pemetretan cepat' yang masih harus diperdalam lagi, terutama jika yang diharapkan adalah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang transformasi masyarakat perkotaan di kawasan Pantura.

3.3 Penduduk Kota: Arab, Cina, Jawa

Isu etnisitas sebenarnya tidak menjadi hal yang dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pekalongan, walaupun pengetahuan mereka tentang pengelompokan individu-individu secara etnis cukup kuat. Tiga kelompok besar penduduk Kota Pekalongan yang sudah sejak lama dikenal adalah Arab, Cina, dan Jawa. Walaupun sesungguhnya ada kelompok pendatang lain selain Arab dan Cina, yaitu India (khususnya India Koja yang dikenal sebagai pedagang Gujarat), pada perkembangan selanjutnya peran mereka tidak terlalu signifikan. Diceritakan bahwa kedua etnis yang disebut pertamalah pendiri Kota Pekalongan, sementara orang Jawa merupakan penduduk yang datang belakangan, dan kebanyakan dari mereka adalah bekas buruh pekerja di perkebunan tebu milik kolonial Belanda. Dari hari ulang tahun Kota Pekalongan yang ditetapkan atas dasar keputusan yang dibuat Belanda tentang berdirinya *Gemeente*

⁶¹ *Ibid.*

Pekalongan pada tanggal 1 April 1906, dapat diperkirakan bahwa pada awalnya penghuni kota memang hanya golongan Eropa dan golongan Timur Asing (Arab, Cina, India), sementara kelompok pribumi (Jawa) umumnya tinggal di luar kota, karena *Gemeente* merupakan pusat pemerintahan dengan struktur kelas 'modern' yang diinginkan pemerintah kolonial Belanda.

Orang Tionghoa pada awalnya hidup di daerah pecinan—jalan Belimbing sekarang— yang menurut cerita pada zaman Belanda mempunyai pintu-pintu yang ditutup di malam hari. Kelenteng *Po An Thian* yang sudah berusia 128 tahun terletak di ujung jalan ini bersebelahan dengan *lithang* agama Konghucu dan gereja Katolik. Letak kelenteng ini tidak jauh dari alun-alun dan Masjid Jami. Rumah-rumah di jalan Belimbing yang sebagian masih berarsitektur kuno saat ini tampaknya hanya menjadi tempat tinggal saja, karena tidak banyak toko-toko yang berada di sini. Kebanyakan toko-toko orang Cina (Tionghoa) terletak di Jalan Sultan Agung, Hasanudin, sampai ke jalan Hayam Wuruk. Toko-toko tersebut umumnya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, dari pasta dan sikat gigi, sabun cuci, sabun mandi sampai ke barang-barang elektronik dan percetakan, serta *spare parts* kendaraan bermotor. Tentu tidak ketinggalan apotek, toko mas, dan rumah makan. Yang unik adalah, di tengah nama-nama Indonesia yang dipakai toko-toko tersebut, masih dapat ditemukan rumah makan yang memakai nama Tionghoa, yaitu *Njoo Tjiong Hwat* di jalan Hasanudin, Kelurahan Sugih Waras. Di antara toko-toko tersebut telah muncul supermarket Giant, bank-bank, serta jasa-jasa warung internet yang menandakan perubahan dan kemajuan Pekalongan sebagai sebuah kota dan 'komunitas urban'.

Komunitas Arab, menurut cerita, pada zaman Belanda tinggal berdekatan dengan orang Cina di Kelurahan Sugih Waras, khususnya di jalan Agus Salim, jalan Bandung, dan jalan Surabaya. Kebanyakan dari mereka adalah guru-guru agama yang dihormati, yang disebut *Syekh* atau *Habib*, walaupun mereka juga berdagang. Sekarang ini sudah makin sedikit generasi muda mereka yang terjun ke dunia siar

agama, sebagaimana nenek moyang mereka yang datang pertama di Jawa. Hari ini keberadaan orang Arab di Pekalongan masih tampak di bidang perbatikan, penjualan buku (termasuk kitab-kitab berbahasa Arab), dan kedudukan Walikota Pekalongan yang sejak tahun 2004 dijabat oleh orang keturunan Arab Pekalongan, dr. Basyir Achmad Syawie. Dalam pilkada langsung tanggal 16 Juni 2010 yang baru lalu, dr. Basyir menang suara dari lawan-lawannya, sehingga ia kembali menduduki jabatan walikota untuk kedua kalinya.

Karena fokus mereka selalu pada bidang agama, pendidikan, dan kesehatan, maka saat ini dapat dilihat Perguruan Al Irsyad sebagai lembaga pendidikan Islam terbesar di Pekalongan yang dikelola oleh orang-orang Arab. Lokasi sekolah tersebut berdampingan dengan Rumah Sakit Siti Khodijah yang juga berada di bawah naungan Yayasan Al Irsyad.

Terkecuali bagi mereka yang paham sejarah dan kebudayaan, sesungguhnya sudah agak sulit membedakan rumah orang Arab, Cina, dan Jawa, karena mereka sudah hidup bercampur. Bahkan, perkawinan campur di antara mereka sudah terjadi sejak lama. Dari segi bahasa pun, hanya pada lingkungan tertentu saja mereka masih memakai bahasa ibu masing-masing (Arab dan Cina), karena dalam pergaulan antaretnis sehari-hari bahasa yang umum dipergunakan adalah bahasa Jawa-Pekalongan. Bagi orang Pekalongan, berbicara secara “*Ngalongan*”, selain menunjukkan keakraban sebagai sesama orang Pekalongan, juga mengacu pada identitas diri mereka sebagai orang Pekalongan yang berbeda dengan orang yang “bukan orang Pekalongan”. Saat ini sepertinya gaya bahasa *Ngalongan* itu sudah agak luntur sehingga ada upaya untuk menyusun kamus Pekalongan, atau “Kumpulan Kata-kata Yang Terlupakan dari Pekalongan (*Jik Kilingan Kojahan ‘Kalongan?’*)” yang berhasil dipublikasikan pada peringatan ulang tahun Pekalongan yang ke-102 (1 April 1906-1 April 2008).

Keakraban antaretnis juga tampak dalam Kospin Jasa, Koperasi Simpan Pinjam yang menurut pengurusnya, merupakan

koperasi simpan pinjam terbesar di Indonesia. Koperasi yang didirikan tanggal 13 Desember 1973 itu dibangun melalui inisiatif H.A. Djunaid—pengusaha batik (pribumi) Pekalongan yang meninggal pada 1982--bersama beberapa pengusaha etnis Arab dan Cina.⁶² Ketika ide itu diluncurkan, menurut cerita, hubungan sosial ketiga etnis itu tidak semesra sekarang. Tentu saja ini terkait dengan posisi etnis Cina di masa-masa awal Orde Baru yang memang “tidak disukai”, sehubungan dengan keterlibatan beberapa tokohnya dalam Baperki yang cenderung berhaluan “kiri” (pro-komunis).⁶³ Dikatakan bahwa, di samping Djunaid sebagai tokoh sentral, ada beberapa nama lain yang menjadi orang dekatnya dan ikut andil mendirikan Kospin Jasa, seperti Ang Tiang Soen dan Thio Tek Djhiang. Selain itu ada orang-orang Pengusaha Perbatikan Indonesia Pekalongan (PIPIP) yang didirikan tahun 1948, seperti Mirza Djahri, Mukmin Bakri, dan Trisno Akwan yang ikut bergabung di Kospin Jasa. Bahkan, nama Kospin Jasa diusulkan oleh Mirza Djahri⁶⁴. Nama-nama yang muncul belakangan, tapi selanjutnya menentukan gagasan dari bank menjadi koperasi simpan-pinjam adalah Dr. Mardjani. Ia dan Thio Tek Djhiang pada tahun 2006 merupakan Dewan Penasihat Kospin Jasa. Aset Kospin Jasa pada waktu diberitakan (tahun 2006) mendekati Rp1 triliun dan memiliki 56 kantor cabang di seluruh Jawa.⁶⁵

Satu hal lagi yang menarik dari interaksi antaretnik yang baik di masa lalu adalah keberhasilan seorang koki Jawa-Indonesia mengambil alih keterampilan memasak makanan Cina lezat koki Cina sendiri. Koki Jawa-Indonesia yang sekarang membuka warung tenda miliknya sendiri di jalan Hasanudin ini mengaku bahwa ia dulu

⁶² ”Kecelakaan Sejarah yang Indah, EHAKA, Rabu, 2 Agustus 2006”, http://www.kospinjasa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=46 diakses pada Oktober 2010.

⁶³ Untuk lebih jelasnya lihat *Indonesian Chinese in Crisis* karya Charles A. Coppel, Kuala Lumpur & New York: Oxford University Press, 1983.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

pernah bekerja cukup lama di sebuah restoran Cina yang sekarang sudah bangkrut. Jelas bahwa, walaupun kita pernah mendengar terjadinya kerusuhan rasial di Pekalongan pada tahun 1995 akibat peristiwa perobekan Al Quran oleh warga etnis Cina yang ternyata "tidak waras", secara umum hubungan antaretnis di kota ini cukup baik.

3.4 Kota Pekalongan, Kota Batik 'Jlamprangan'

Batik adalah 'jiwa' Kota Pekalongan, ungkapan ini dikemukakan salah seorang pengusaha batik di Kota Pekalongan, karena ia percaya bahwa tanpa keberadaan batik sebagai sumber penggerak ekonomi masyarakat Kota Pekalongan, maka Kota Pekalongan akan mati. Hal yang sama dikatakan oleh Amalinda Savirani⁶⁶, bahwa “[b]atik industry is selected due to its strategic role in Pekalongan economy in general, without which Pekalongan city will be perished” (2009:3). Sangat dramatis, akan tetapi mengandung banyak kebenaran kalau kita mempertimbangkan tiadanya usaha lain yang dijalankan oleh paling tidak seperempat warga Kota Pekalongan, baik sebagai sebuah pekerjaan utama dan satu-satunya, maupun sebagai pekerjaan sampingan atau tambahan. Menurut hasil survei yang dikutip oleh Savirani, dikatakan bahwa “349 batik enterprises are spread throughout 37 kelurahan, of which five kelurahan are the most populated areas of the batik industry: Pasirsari (45 units or 12.9%), Kradenan (33 units, 9.5%), Pringlangu (31 units, 8.9%), Banyurip Alit (4.9%) and Pabean (4.9%)... Kradenan, Pringlangu and Banyurip Alit are in the South Pekalongan Sub-district, while Pasirsari and Pabean are part of the West Pekalongan Sub-district” (Savirani, 2009:5). Sementara itu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melaporkan bahwa "Dengan investasi

⁶⁶ Savirani, Amalinda (2009), “Business and Politics in an intermediate town of Pekalongan, Central Java, Indonesia”, paper presented at “In Search of Middle Indonesia” Conference, Pontianak, 13-15 July, KITLV-KNAW, <http://www.onderzoekinformatie.nl/en/oi/nod/onderzoek/OND1316803/> diakses Oktober 2010.

Rp.128.746.960, industri batik di Pekalongan mampu mengekspor 118.275 kodi ke Australia, Amerika, Timur Tengah, Jepang, Cina, Korea, dan Singapura dengan nilai ekspor US\$ 1.205.027,42 (2009:3).

Pengusaha dan pengrajin batik tersebar di seluruh Kota Pekalongan, dan bahkan sampai ke beberapa tempat di Kabupaten Pekalongan, seperti Buaran. Namun, jika ditanya dimanakah lokasi pengusaha batik yang terkenal, umumnya mereka bisa diketemukan di daerah Kauman, yang sudah diresmikan sebagai Kampung Batik pada tanggal 1 September 2007 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersamaan dengan digelarnya Pekan Batik Internasional (PBI) (Riyanto, 2008:viii).

Sulit untuk menanyakan motif-motif batik apakah yang merupakan motif khas Pekalongan, kecuali *Jlamprang*⁶⁷, *Cuweri*, dan *Boketan*, karena sebagian besar pengusaha batik di Pekalongan menerima pekerjaan atas dasar pesanan, sehingga mereka bisa membuat batik non-Pekalongan, seperti batik Yogya atau Solo, bahkan batik-batik terkenal seperti Dinar Hadi dan Batik Keris. Ada perkiraan kasar bahwa sekitar 80% dari produksi batik di Indonesia dibuat di Pekalongan (Savirani, 2009:5). Hal ini dikarenakan upah pembatik di Pekalongan masih murah yang di bawah upah minimal regional (UMR), yaitu Rp.700.000. Seorang pembatik yang kurang berpengalaman menerima Rp.10.000 per hari, sementara yang berpengalaman menerima Rp.17.000. Walaupun pekerja batik cap (laki-laki) menerima dua kali lipat lebih tinggi dari pembatik (perempuan), yaitu Rp.35.000, menurut seorang pengawas, cara, waktu, dan hasil kerja mereka juga tidak sama; pekerja cap harus

⁶⁷ Dikatakan bahwa batik Jlamprang adalah batik dengan corak ragam geometris meniru corak kain pathola atau sutera tenun ikat asal Gujarat, India. Menurut Ilyas, dulu banyak dibuat di Krapyak (lihat “Wajah Kosmopolitan dan Batik Pekalongan”, oleh Achmad Ilyas, pemerhati batik tinggal di Pekalongan, 28 Februari 2008, <http://batikjlamprang.multiply.com/journal/item/1>, diakses Oktober 2010).

berdiri seharian (kecuali pada jam istirahat makan siang) dan menghasilkan 10 potong dalam sehari. Sementara, seorang pembatik baru bisa menyelesaikan pekerjaannya (sepotong batik tulis) paling cepat setelah satu bulan.

Pada dasarnya, memang ada kekhasan Batik Pekalongan yang tampak pada gambaran motif dan pewarnaannya yang dinilai bersifat naturalis, dengan corak dan komposisi warna yang kaya. Gambaran motifnya bernuansa pesisir, yaitu berupa motif bunga laut dan bintang laut. Pengaruh Cina dalam batik Pekalongan terutama terlihat setelah tahun 1910, karena batik-batik yang didesain oleh pengusaha Cina memasukkan ornamen yang khas Cina, seperti Naga atau *Phoenix*, Kupu-kupu, dan corak lainnya. Desain mereka, menurut Ilyas, sangat mirip dengan desain pengusaha Indo-Eropa, meski terdapat sejumlah perubahan pada pola pewarnaan atau *isen*, sebagaimana yang tampak pada batik *encim* atau "sarung *encim*".⁶⁸ Menurut cerita, "[s]alah satu genre batik yang pernah berkembang di Pekalongan adalah batik Encim. Batik ini dikembangkan oleh para pengusaha Cina, dan saat itu cukup digemari oleh orang-orang Belanda. Sementara itu, batik Pekalongan yang disukai konsumen pribumi, adalah batik yang mempunyai pola warna yang lebih semarak".⁶⁹ Di masa lalu juga dikenal Batik Djawa Hokokai, yaitu batik yang diproduksi antara tahun 1942-1945 oleh perusahaan-perusahaan batik di Pekalongan, terutama para pengusaha batik Cina, dengan pola dan warna yang sangat dipengaruhi budaya Jepang, walau latarnya masih menampilkan pola batik kraton (*parang*, *kawung*, *lereng*, dan *ceplokan*). Ragam hias bunga, seperti sakura, krisan, mawar, lili, dan anggrek dalam bentuk *boketan* atau *lung-lungan*, serta di sana-sini ditambahkan ragam hias kupu-kupu, ditata di atas latar pola-pola kraton tersebut. Dikatakan bahwa, pada saat itu pula mulai dikenal

⁶⁸ "Batik Peranakan, <http://www.batikzoela.com/menu.php?idx=45>, diakses Oktober 2010.

⁶⁹ "Batik Pesisir pun Memiliki Ciri Khas", <http://kainindonesia.com/tag/sejarah-batik>, diakses Oktober 2010.

penataan pola dalam format pagi-sore, yaitu penataan dua pola yang berlainan pada sehelai kain.⁷⁰

Pola pewarnaan oleh pengrajin batik Cina dikatakan ”memunculkan macam warna yang lebih beraneka ragam, ... [serta]... bayangan atau gradasi warna” yang semakin maju ketika mereka berhasil melakukan proses pewarnaan dengan bahan kimia pada akhir abad ke-19. Para pengrajin batik di kalangan orang Cina yang terkenal adalah The Tie Siet, Oey Soen King, Lim Siok Hien, Lim Boe In, Lim Boen Gan, dan Oey Soe Tjoen. Di antaranya yang paling terkenal adalah Oey Soe Tjoen (1901-1975),⁷¹ pelopor teknik penggunaan warna gradasi.

Saat ini pesaing terberat para pembatik (tulis dan cap) adalah batik *printing* atau sablon yang mengandalkan mesin. Secara kasar dikatakan bahwa batik *printing* adalah 'kain bermotif batik', tetapi bukan batik. Harga batik *printing* ini begitu murah sehingga bisa dijual dalam bentuk baju jadi dengan harga antara Rp.15.000 sampai Rp.30.000 saja. Menurut informasi, berbeda dengan batik tradisional (tulis dan cap), batik *printing* yang jumlahnya makin banyak ini membawa masalah limbah yang mengkhawatirkan sebagian masyarakat Pekalongan. Hal ini terlihat dengan semakin hitamnya air sungai yang diperkirakan berdampak negatif terhadap ikan-ikan tangkapan nelayan Pekalongan, karena pewarnaan yang dipakai lebih banyak mengandung bahan kimia dibanding pewarnaan yang dipakai pembatik tradisional.

⁷⁰ id-id.facebook.com/note.php?note_id...id...ref..., dan “Wajah Kosmopolitan dan Batik Pekalongan”, oleh Achmad Ilyas, pemerhati batik tinggal di Pekalongan, 28 Februari 2008 <http://batikjlamprang.multiply.com/journal/item/1>, diakses Oktober 2010.

⁷¹ “Wajah Kosmopolitan dan Batik Pekalongan”, oleh Achmad Ilyas, pemerhati batik tinggal di Pekalongan, 28 Februari 2008, <http://batikjlamprang.multiply.com/journal/item/1>, diakses Oktober 2010.

3.5 Jepara, Bumi Kartini dan Kota Ukir Dunia

Memasuki Kota Jepara yang berjarak lebih-kurang 90 km dari Semarang, dapat dilihat sebuah kota yang cukup bersih dan tertata cukup baik. Tugu Kartini di tengah kota merupakan perwujudan dan simbolisasi dari identitas Kota Jepara sebagai Bumi Kartini, yaitu sebagai tempat kelahiran Kartini, salah seorang pejuang kemerdekaan kita dengan kumpulan surat-suratnya yang terkenal, yang dibukukan dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Identitas Jepara sebagai Bumi Kartini ini baru dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Jepara, menurut informasi, setelah disebarkan. Sayangnya, tidak diketahui kapan sayembara itu diadakan. Namun, sepertinya penetapan itu juga terkait dengan (atau untuk memperkuat) keberadaan Museum R.A. Kartini yang terletak di pusat kota, di utara alun-alun. Museum ini didirikan tahun 1975 ketika Jepara di bawah pimpinan Bupati Soewarno Djojowardowo, SH.⁷² Suatu kontradiksi yang penting untuk dicatat dari klaim identitas tersebut adalah kurang berperannya kaum wanita Jepara pada berbagai lini kehidupan, baik politik, ekonomi maupun budaya, kecuali sebagai pendamping suaminya. Padahal, Kartini khususnya, adalah pejuang kebebasan wanita.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Jepara Nomor 9 Tahun 1988, hari jadi Jepara telah ditetapkan jatuh pada tanggal 10 April 1549. Sejalan dengan itu, ditetapkan pula tokoh Jepara, yaitu Putri Retno Kencana yang dinobatkan selaku penguasa Jepara dengan nama Nimas Ratu Kalinyamat,⁷³ putri kandung Sultan Trenggono, pada tahun 1549. Ia memerintah bersama suaminya pangeran

⁷² www.ukirjepara.com/musium-kartini/, diakses September 2010.

⁷³ Tentang riwayat Ratu Kalinyamat, baca tulisan Chusnul Hayati yang berjudul "Ratu Kalinyamat: Figur Pemimpin Kerajaan Maritim", http://eprints.undip.ac.id/19560/1/chusnul_hayati_kalinyamat.pdf; lihat juga *Peranan Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada abad XVI* yang ditulis oleh penulis yang sama, dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2000, <http://www.qsensei.com/content/1jllnn>, diakses pada September 2010.

Hadiwijaya dari Pajang.⁷⁴ Ratu Kalinyamat pernah mengirim armada perangnya ke Malaka guna menggempur Portugis pada tahun 1551 dan tahun 1574, sehingga ia dijuluki *De Krange Dame* yang artinya wanita gagah berani. De Couto, penulis berkebangsaan Portugis dalam bukunya *Da Asia* juga menyebut Sang Ratu Kalinyamat sebagai *Rainha De Jepara, Serona Paderosa De Rica*, yang artinya Raja Jepara adalah seorang wanita yang sangat berkuasa dan kaya raya.⁷⁵ Ratu Kalinyamat meninggal pada tahun 1579 dan dimakamkan di desa Mantingan (kurang lebih 5 km arah selatan Kota Jepara), bersebelahan dengan Masjid Mantingan yang didirikan oleh Pangeran Hadiri (Hadlirin) atau Hadiwijaya, suami sang Ratu, pada tahun 1559. Masjid tersebut merupakan masjid tertua kedua di Pulau Jawa setelah Masjid Agung Demak.⁷⁶

Menurut ‘Serat Kandaning Ringgit’, Naskah KBG No.7 Koleksi bagian naskah Museum Pusat Jakarta yang dibaca oleh Amen Budiman, tertulis bahwa Pangeran Hadiri adalah seorang juragan Cina yang datang dari Tiongkok ke Jawa untuk berdagang. Ia dikenal dengan sebutan Juragan Wintang sebelum akhirnya menjadi suami Ratu Kalinyamat yang memerintah Jepara.⁷⁷ Oleh karena itu, diperkirakan bahwa ada pengaruh pertukangan Cina pada masjid Jepara, seperti ukiran batu padas di Masjid Mantingan.

Pada masa itu juga dikenal nama Tjie Wie Gwan yang menurut cerita, merupakan seorang Cina Muslim yang ahli dalam

⁷⁴ <http://staff.undip.ac.id/sastra/indrahti/2009/07/23/potensi-kebaharian-jepara-sebagai-satu-landasan-mewujudkan-model-revitalisasi-kota-pelabuhan/>, diakses pada September 2010.

⁷⁵ (*Ibid*).

⁷⁶ <http://www.explore-indo.com/rohani/231-masjid-dan-makam-mantingan-tuah-di-bangunan-religius-tua-yang-melegenda.html>, diakses pada September 2010.

⁷⁷ ”Pengaruh Pertukangan Cina pada Bangunan Masjid Kuno di Jawa, posted by Iim Mulyana, 1 Juni 2010, <http://humaspdg.wordpress.com/2010/06/01/pengaruh-pertukangan-cina-pada-bangunan-masjid-kuno-di-jawa/>, diakses pada September 2010.

pertukangan kayu dan seni ukir. Ia dijuluki sebagai Sungging Badar Duwung atau ahli pemahat batu. Makamnya juga terdapat di antara makam Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat. Berkembangnya seni ukir Jepara dikatakan tidak luput dari jasa Tjie Wie Gwan ini⁷⁸.

Mayoritas penduduk Jepara yang terdiri dari 14 kecamatan ini⁷⁹ dikatakan merupakan pengrajin kayu atau ukir, dan ini tampak jelas di kecamatan Tahunan⁸⁰ sebagai sentra industri kayu, mebel atau furnitur, dan ukir.⁸¹ Sumber lain mengatakan bahwa ada empat kecamatan di Jepara yang tumbuh sebagai sentra ukiran, yaitu

⁷⁸ Handinoto & Samuel Hartono, "Pengaruh Pertukangan Cina pada Bangunan Masjid Kuno di Jawa abad 15-16, http://portfolio.petra.ac.id/user_files/81005/MASJID%20KUNO%20DI%20JAWA%20ABAD%2016.pdf, diakses pada September 2010.

⁷⁹ Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Jepara adalah: Bangsri, Batealit, Donorojo, Jepara, Kalinyamatan, Karimunjawa Kedung, Keling Kembang, Mayong, Mlonggo, Nalumsari, Pakis Aji, Pecangaan, Tahunan dan Welahan, <http://www.wilayahindonesia.com/kabupaten-per-propinsi/kabupaten-di-jawa-tengah/kabupaten-jepara/>, diakses pada September 2010.

⁸⁰ Dari sumber lain dikatakan bahwa sentra perdagangannya terletak di wilayah Ngabul, Senenan, Tahunan, Pekeng, Kalongan dan Pemuda, <http://desagemulung.wordpress.com/2010/02/13/jepara-kota-ukir/>, diakses September 2010.

⁸¹ Untuk keterangan lebih lanjut tentang industri furnitur ini, lihat *Atlas of Wooden Furniture Industry in Jepara*, Indonesia yang ditulis oleh Jean-Marc Roda, Philippe Cadène, Philippe Guizol, Levania Santoso and Achmad Uzair Fauzan (2007). Di halaman 21, misalnya, dikatakan bahwa "A total of 11 276 people (4 092 temporary and 7 184 permanent workers) are employed in the sampled workshops. Extrapolating this to Jepara overall gives a figure of almost 176 470 workers involved in the furniture industry (95% confidence limits: 169 930–183 000, Table 2). The total employment for each Desa (village) is mapped in Figure 14", http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/books/BRoda0701.pdf, diakses Oktober 2010.

Kecamatan Jepara, Tahunan, Mulyoharjo, dan Pecangaan.⁸² Ciri khas ukiran Jepara yang tidak bisa diklaim daerah ataupun negara lain adalah motif *lunglungan* tanaman, bunga dan bukan hewan.⁸³

Kemunculan Jepara sebagai sebuah kota industri furnitur, menurut Jim Schiller (2007), terjadi di tahun 1980-an “ketika ekonomi *boom* minyak Indonesia mengakibatkan menjamurnya pembelian domestik terhadap furnitur kayu jati ukur Jepara. Setelah *boom* minyak berakhir, kebijaksanaan nasional mempromosikan ekspor nonmigas dan muncullah industri furnitur berorientasi ekspor yang berdampingan dengan industri domestik” (hlm. 432 dan 434). Sejak pertumbuhan industri tersebut, menurut Jim Schiller, “daerah itu berhasil menjadi salah satu kabupaten miskin-yang berubah menjadi makmur di Indonesia”, karena sebelumnya “Jepara adalah daerah yang relatif terisolir dan terbelakang” (Ibid., hlm. 432).

Keahlian ukir⁸⁴ yang khas itulah yang memberikan identitas “kota ukir” kepada Jepara. Bahkan pemda Jepara⁸⁵ mencoba mempromosikannya sebagai “Jepara Pusat Ukir Dunia”. Oleh karena itu, dalam situs resmi Bupati Jepara, Hendro Martojo, dikatakan bahwa,

⁸² Akhmad Safuan, “Mengintip Eksotisme Khas Jepara”, *Media Indonesia*, 11 Agustus 2010, http://mirror.unpad.ac.id/koran/mediaindonesia/2010-08-11/mediaindonesia_2010-08-11_028.pdf, diakses September 2010.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Tentang kerajinan seni ukir Jepara, lihat buku *Seni kerajinan mebel ukir Jepara: Kajian estetika melalui pendekatan multidisiplin* oleh Sp Gustami, yang diterbitkan oleh penerbit Kanisius tahun 2000, goodreads, http://www.goodreads.com/book/show/2190512.Seni_kerajinan_mebel_u_kir_Jepara, diakses September 2010.

⁸⁵ Pemerintah Kabupaten Dati II Jepara juga telah menerbitkan buku *Sejarah dan perkembangan seni ukir jepara*, yang diterbitkannya pada tahun 1999, WorldCat, <http://www.worldcat.org/title/sejarah-dan-perkembangan-seni-ukir-jepara/oclc/223153458>, diakses September 2010.

“...Tak kurang dari 3.500 unit usaha pengolahan berbahan baku kayu beroperasi di kabupaten ini, mampu menyerap kira-kira 57.000 tenaga kerja-termasuk yang merangkap menjadi petani di musim tanam-di tahun 2001. Investasi yang ditanam terus meningkat, hampir 48 persen per tahun selama kurun 1998-2001. Berbagai model mebel senilai 153 juta dollar AS dikirim ke 68 negara. Tak dapat dipungkiri bila industri perabot serta kelengkapan rumah tangga dari kayu ini menjadi jantung kegiatan ekonomi sekunder. Nilai yang dihasilkan pun nyaris separuh (48,45%) dari nilai total produksi kegiatan industri...”⁸⁶

Akan tetapi, sesungguhnya potensi Jepara tidak terbatas pada kerajinan ukir saja, karena dapat dilihat adanya kerajinan patung dan relief di Desa Mulyoharjo dan di Desa Senenan, dekat Rumah Sakit Kartini Senenan Jepara,⁸⁷ kerajinan Gerabah Mayong, sentra tenun ikat troso di Pecangaan,⁸⁸ industri monel di Kalinyamatan, sentra industri roti dan kue, serta hasil pertanian (kacang tanah) dan perikanan.

Dari segi pariwisata, walau tidak terlalu banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi, kita masih menemukan beberapa tempat menarik, seperti Museum Kartini, Pantai Kartini (2,5 km ke arah barat dari Pendopo Kabupaten Jepara,⁸⁹ di Kelurahan Bulu,

⁸⁶ <http://hendromartojo.info/?pilih=news&aksi=lihat&id=45>, diakses September 2010.

⁸⁷ <http://desagemulung.wordpress.com/2010/02/13/jepara-kota-ukir/>, diakses September 2010.

⁸⁸ Untuk lebih jelasnya tentang industri tenun ikat ini lihat “TENUN-IKAT-BUMI-KARTINI---JB05, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa”, <http://www.docstoc.com/docs/22035849/TENUN-IKAT-BUMI-KARTINI-----JB05-Kabupaten-Jepara-propinsi-Jawa>, diakses September 2010.

⁸⁹ Konon Pendopo Kabupaten Jepara ini dibangun pada tahun 1750 pada masa pemerintahan Adipati Citro Sumo III yang merupakan pimpinan pemerintahan ke-23 (1730-1760), sedangkan ayah RA Kartini merupakan bupati ke-31 (1881-1905), <http://www.hendromartojo.info/?pilih=news&aksi=lihat&id=15>, diakses September 2010.

Kecamatan Jepara), Benteng Portugis (terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Keling atau 45 km di sebelah utara Kota Jepara, berdekatan dengan Goa Tritip yang terletak di Desa Jung Watu di kecamatan yang sama), Pantai Bandengan atau Tirta Samudro (terletak sekitar 8 km di sebelah utara pusat kota atau alun-alun, dan terkenal dengan airnya yang jernih), Goa Manik (di Desa Sumanding, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, lokasinya berdekatan dengan Air Terjun Songgolangit yang mempunyai ketinggian 80 m dan lebar 2 m dan terletak di Desa Bucu Kecamatan Kembang, 30 km sebelah utara dari Kota Jepara), dan yang paling terkenal adalah Taman Nasional Laut Karimunjawa⁹⁰ di Kepulauan Karimunjawa yang terdiri dari tiga desa, yaitu Karimun, Kemojan, dan Parang.⁹¹ Penyeberangan ke kepulauan ini bisa dilakukan dengan kapal ferry dari Pelabuhan Jepara, atau dengan pesawat jenis kecil dari Semarang, karena di Karimunjawa hanya ada lapangan terbang perintis.⁹²

Kehidupan sosial ekonomi Kota Jepara tidak sedinamis kehidupan sosial ekonomi Kota Pekalongan, karena sifat dari produk mebel itu sendiri yang jauh lebih besar dan mahal dibanding batik, sehingga pembelinya pun tidak sebanyak dan sesering batik. *Gebyok*, ukir khas Jepara, dengan tinggi 240 cm dan panjang 440 cm misalnya, harganya bisa mencapai Rp.23 juta.⁹³ Walaupun batik ada yang sangat mahal harganya (bisa mencapai 5 juta rupiah per potong,

⁹⁰ Tempat ini juga tercatat pada website World Wildlife Adventures dengan wildlife list sebagai berikut: Hawksbill Turtle, Green Turtle, Javan Leopard Cat, Water Monitor, Osprey, See Deer, Pangolin, Green Imperial Pigeon, White-Bellied Sea Eagle, Yellow-Vented Bulbul and Red-Breasted Parakeet, <http://www.world-wildlife-adventures.com/directory/indonesia/wildlife-park.asp?sanctuary>, diakses September 2010.

⁹¹ <http://www.wisatanesia.com/2010/05/wisata-jepara.html>., diakses September 2010.

⁹² <http://desagemulung.wordpress.com/2010/02/13/jepara-kota-ukir/>, diakses September 2010.

⁹³ Akhmad Safuan, *opcit*.

seperti Batik Oey Soe Tjoen di Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan), secara umum harganya masih terjangkau oleh masyarakat luas. Sementara untuk mebel, selain harganya sangat mahal, kebutuhan akan mebel tidak cepat karena mebel itu sendiri bisa tahan antara 5 sampai 10 tahun sebelum ia rusak dan perlu diganti.

Gerak perekonomian yang lambat ini juga sangat mempengaruhi perkembangan transportasi kota. Kita sulit menemukan angkutan umum, kecuali beca, setelah jam 4-5 sore saat bisnis permebelan juga mulai menutup tokonya. Setelah petang, transportasi luar kota, seperti Jepara-Kudus melewati sentra mebel Tahunan, sentra tenun Troso-Pecangaan, industri monel Kalinyamatan, dan industri roti dan kue Welahan, praktis tidak ada, sehingga sulit bagi orang luar yang tidak membawa kendaraan untuk bergerak bebas di waktu malam. Penduduk Jepara sendiri kebanyakan mempunyai sepeda motor. Para pengusaha rata-rata mempunyai satu atau dua kendaraan roda empat untuk kegiatan operasionalnya.

Jika kita kembali kepada apa yang dikatakan Hans-Dieter Evers tentang tipe kota di Indonesia, barangkali sama seperti Pekalongan, Jepara bukanlah sebuah kota, melainkan sebuah kabupaten atau distrik, sehingga dalam pengembangannya ia menjadi apa yang Evers sebut sebagai “*a city without urbanism*”.⁹⁴ Walaupun contoh yang diberikan Evers adalah Jakarta di masa lalu, akan tetapi sepertinya tepat untuk dipakai untuk melihat Jepara yang hari ini juga sudah berbenah untuk menjadi sebuah kota. Akan tetapi, seperti juga Jakarta ketika itu, ia juga menjadi kota hanya melalui simbol-simbol, sehingga sesuai dengan pendapat Peter Nas tentang “*city full of symbols*”⁹⁵, ataupun konsepsi Evers tentang penciptaan “*virtual urbanism*” melalui “penempatan monumen pada interseksi atau lokasi yang signifikan”.⁹⁶ Dalam hal ini Tugu Kartini bisa dikatakan merupakan simbol kota dimaksud.

⁹⁴ Hans-Dieter Evers, *Opcit.*, hlm. 57.

⁹⁵ Sebagaimana dikutip oleh Evers, *Opcit.*

⁹⁶ *Ibid.*

Menurut informasi, pada masa krisis keuangan tahun 1997 sampai empat tahun setelahnya memang merupakan masa kejayaan pengusaha-pengusaha mebel Jepara, karena mereka bisa mendapatkan order yang banyak dengan nilai penjualan yang besar, khususnya untuk ekspor. Hal ini juga dicatat oleh Jim Schiller (2007), “Banyak orang Jepara sukses selama krisis ekonomi itu. Sedikit-dikitnya 80.000 orang Jepara secara langsung dipekerjakan dalam industri furnitur, yang pada tahun 1999 bernilai US\$ 400 sampai 500 juta dolar.... Di puncak krisis ekonomi Asia, kabupaten itu penuh dengan *showroom* furnitur baru, hotel-hotel yang terisi penuh, restoran-restoran, dan toko-toko baru. Pada tahun 1998 Jepara mengirim lebih dari 900 orang untuk naik haji, tiga kali jumlah yang dikirim oleh kabupaten tetangga, Kudus, dan lebih besar dari tempat lain manapun di Jawa Tengah. Pada tahun 1999, ia mengirim lebih dari 2300 orang untuk berhaji, lebih dari tempat lain manapun di Indonesia. Kabupaten itu mempunyai lebih banyak sepeda motor (total 55.000) ketimbang kabupaten atau kota lain manapun di Jawa Tengah kecuali ibukotanya, Semarang. Harga tanah komersial dan hunian konon juga paling tinggi di Jawa Tengah, dan biaya hidup setara dengan kota-kota terbesar Jawa” (hlm. 442).

Akan tetapi, menurut beberapa informan, sesungguhnya “keuntungan” itu didapat karena nilai tukar rupiah yang terlalu rendah dibandingkan nilai dollar Amerika, sehingga dengan jumlah uang yang sama, mereka bisa mendapatkan barang sebanyak 2 kontainer, padahal sebelumnya hanya 1 kontainer saja. Artinya, pengusaha tidak diuntungkan karena adanya peningkatan harga jual barang, melainkan mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar uang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila setelah barang mereka habis, mereka tidak mampu lagi menjual dalam jumlah yang banyak dengan harga murah, karena harga bahan dasar kayu sendiri sudah mengalami kenaikan. Hal ini terkait dengan semakin langkanya kayu jati solid yang merupakan 'kekhasan' bahan dasar produk mebel Jepara, serta adanya kewajiban sertifikasi *ecolabeling* dari negara-negara maju yang anti-*illegal logging* yang membutuhkan biaya sampai 60 juta

rupiah. Itu sebabnya hari ini sudah banyak pengusaha mebel yang bangkrut.

Menurut *Suara Merdeka* 14 April 2010, jumlah pengusaha eksportir mebel Jepara sudah tinggal separuh dari jumlah sebelumnya (tahun 2000) yang mencapai 450 pengusaha (smart institute jepara blogspot: "Reorientasi Industri Mebel Jepara"). Walaupun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemda Jepara dan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) untuk mengembalikan masa kejayaan tersebut, antara lain melalui pameran-pameran di tingkat nasional dan internasional, sepertinya belum banyak membuahkan hasil (*Sinar Harapan*, 21 Juli 2007, "Mengembalikan Kejayaan Industri Mebel Jepara"). Namun demikian, hasil penjualan yang masih sebesar US\$100,334 juta (atau setara dengan Rp.971,8 miliar) pada tahun 2008, dan bahkan bisa menembus angka Rp.1 triliun pada tahun 2009, karena Jepara bisa mengirim ukiran seharga US\$104 juta, memperlihatkan bahwa ukiran masih menjadi andalan Jepara.⁹⁷

3.6 Wajah Jepara di Balik Ukiran

Agak sulit memahami masyarakat Jepara melalui identitas kotanya, karena selain sebagai kota ukir yang jelas terlihat dari produk yang dihasilkannya, Jepara tidak mengembangkan identitas budaya yang khas sebagaimana yang dilakukan orang Pekalongan dengan "*Ngalongan*"(atau berbahasa khas Pekalongan). Bahasa orang Jepara adalah bahasa Jawa pada umumnya. Tidak dikenal adanya bahasa khas Jepara sebagaimana di Pekalongan. Kalau bahasa Pekalongan secara umum dikategorikan sebagai bahasa *ngoko*, maka tidak demikian halnya dengan bahasa Jawa dari orang Jepara. Bahasa Jawa dari orang Jepara merupakan campuran dari bahasa Jawa *ngoko*

⁹⁷ Akhmad Safuan, *opcit*.

dan bahasa Jawa *kromo* atau bahasa Jawa standar yang dipakai orang Solo dan Yogya.⁹⁸

Selain itu, berbeda dengan Pekalongan yang mengangkat produk batiknya sebagai “warisan budaya”, Jepara tidak terlalu menekankan hal tersebut. Barangkali hal ini dikarenakan produk hasil ukiran Jepara tidak selalu menampilkan kekhasan budaya (Jawa), melainkan lebih mengutamakan kegunaan praktisnya sehingga model yang dihasilkan bisa saja sesuai pesanan atau meniru produk asing, seperti ranjang gaya Victoria, patung Buddha ala Cina, dan sebagainya. Pengaruh Cina melalui motif Naga sebenarnya sudah dikenal lama. Hal itu bisa dilihat pada kursi tamu dalam Stedelijk Historisch Museum Surabaya yang dikumpulkan oleh Anon Kuncoro Widigdo dari Mpu Tantular Museum Negeri Jawa Timur.⁹⁹

Di samping permebelan yang tampak dominan, serta kegiatan perdagangan skala kecil (kios, pedagang kaki lima, dan toko kelontong) yang cukup dinamis, keseharian masyarakat Jepara lebih banyak diisi oleh pendidikan dan agama. Agama yang dominan di Japara, selain Islam, adalah Kristen Protestan dan Katolik. Ini terbukti dengan banyaknya gereja di Kabupaten Jepara, yang menurut informasi, tidak kalah dengan jumlah masjid, yaitu antara 15 sampai 20 buah. Penganut agama Buddha dan Khonghucu menurun drastis, walau kelenteng Hok Tek Tjeng Sin (Dewa Bumi) dan kelenteng Hian Thian Siang Tee (Kongco ahli pengobatan) di pasar Welahan,¹⁰⁰

⁹⁸ Uraian lebih jelas dan rinci tentang hal ini dapat dilihat pada tulisan Imelda yang berjudul “Bahasa Jawa Pesisiran dan Perkembangannya di Pekalongan dan Jepara” dalam laporan lengkap penelitian ini.

⁹⁹ “Koleksi Ukiran”, Mpu Tantular Museum Negeri Jawa Timur, Hak Cipta ©1997 oleh Anon Kuncoro Widigdo, <http://mputantular.tripod.com/ukiran.html>, diakses Oktober 2010.

¹⁰⁰ Seringkali disebut sebagai “Kongco Welahan” saja. Dalam tulisannya di *Sinergi*, majalah umum bulanan Tionghoa edisi 6, April– Mei 1999, Tan Swie Ling mengkaitkan kelenteng ini dengan R. A. Kartini. Untuk itu, ia mengangkat kembali tulisan tentang Etnis Tionghoa di awal Kemerdekaan Indonesia Sorotan Bok Tok Pers Melayu-Tionghoa

dan kuil Hok Tek Tjeng Sin di Jepara kota (daerah Pecinan) yang sudah berusia ratusan tahun, masih berdiri megah. Kebanyakan pengunjung kelenteng-kelenteng tersebut adalah orang-orang Tionghoa dari kota-kota lain, seperti Magelang, Salatiga, Kudus, Semarang, dan Jakarta.

Secara politis, suara pemilih dari kelompok Islam cenderung dominan, dan ini ditunjukkan oleh kemenangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu-pemilu pada masa Orde Baru. Menurut Jim Schiller (2000), Jepara memang mempunyai basis Nahdlatul Ulama (NU) yang kuat sejak pemilu 1955, di mana NU memenangkan hampir 60% suara. Suara NU inilah yang kemudian mendukung PPP sehingga PPP selalu menduduki 40% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baru akhir-akhir ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami peningkatan dan bahkan lebih unggul dari partai-partai Islam. Oleh karena itu, ketua DPRD Jepara saat ini dari PDIP. Barangkali hal ini dikarenakan terjadinya perpecahan di kalangan NU sendiri sejak NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan, Jim Schiller melaporkan terjadinya konflik antara PPP dan PKB di Dongos yang menyebabkan tewasnya empat pendukung PKB menjelang pemilu 1999, ketika mereka berusaha mendirikan cabang PKB di kampung yang didominasi PPP (*Ibid.*).

Desember 1945 yang disunting kembali oleh Basuki Soejatmiko pada September 1946. Dikatakan bahwa dalam suratnya yang dikirim kepada Nyonya R.M. Abendanon Mandri tertanggal 27 Oktober 1902, Kartini mengaku dirinya sebagai “Bocah Buddha”, dan hal ini sehubungan dengan pengalamannya ketika ia masih anak-anak dan mendapat sakit keras. Menurut ceritanya, ada seorang Tionghoa, seorang hukuman, yang menawarkan diri untuk menolong. Ia mengusulkan kepada Bupati Jepara untuk meminta obat kepada Kongco Welahan, dan Kartini diminta meminum abu dari hioswa yang dibakar sebagai sembah bakti kepada Santikkong Welahan. Lantaran meminum obat itu, menurut Kartini, ia menjadi anak orang suci itu. Itu sebabnya ia menyebut dirinya sebagai “Bocah Buddha”.

Bupati Jepara sendiri, Hendro Martojo, bukan orang partai. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara. Hendro Martojo bersama Ahmad Marzuki memenangkan pilkada 2007 didukung oleh koalisi PPP, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan sepuluh partai nonlegislatif. Ia memenangkan 91.474 suara atau 59,6% dari total suara.¹⁰¹

Dinamika politik lokal ini pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh pada aktivitas bidang ekonomi karena kebijakan ekonomi yang berlaku dalam bisnis permebelan pada dasarnya ditetapkan pada level nasional dan internasional, seperti kebijakan ekspor-impor dan sertifikasi *ecolabeling* yang telah disinggung sebelumnya. Dengan demikian, pada tingkat lokal tidak terlalu kelihatan peran pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan di bidang ekonomi. Berbeda dengan produk batik Pekalongan yang bisa dipacu melalui kebijakan pemerintah daerah tentang pemakaian baju batik di kantor-kantor pemerintah pada hari-hari tertentu, sulit untuk melakukan hal yang sama bagi produk ukiran karena daya beli masyarakat lokal sangat rendah.

3.7 'Modern-isasi' Warisan Tradisional

Komersialisasi budaya dalam konteks ekonomi modern merupakan suatu kegiatan yang saat ini sudah umum dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di daerah yang, akibat program-program pembangunan yang dibawa pemerintah ataupun pendatang, pada akhirnya harus berubah dan mengubah tradisi mereka sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰² Fenomena ini tidak terjadi hanya pada daerah-daerah di Indonesia, karena seperti dikatakan oleh Allen J.

¹⁰¹ "Pilkada Jepara", <http://jogjacamp.org/devel/pilkada/>, diakses September 2010.

¹⁰² Hal seperti ini juga ditemukan di berbagai masyarakat "miskin" di daerah pegunungan dan daerah perbatasan di negara lain, seperti China dan Thailand. Lihat Sossouvi (t.t.) dan Kulmala, dkk.(2009).

Scott (1997:323), ” ...*the realm of human culture as a whole is increasingly subject to commodification, i.e. supplied through profit-making institutions in decentralized markets*”.

Dalam proses komodifikasi dan komersialisasi itu, hal yang paling mudah diubah adalah bentuk material dari suatu produk budaya, oleh karena itu sebuah warisan yang berupa hasil keterampilan atau kerajinan tangan pada dasarnya bisa diubah juga, antara lain dengan mempelajari kekhasan atau ciri-ciri khusus produk budaya lain, maupun dengan mengambil-alih teknologi dari luar. Ini sejalan dengan hasil penelitian Jane S. Becker tentang kerajinan tangan Appalachia¹⁰³ yang menggambarkan “*the multifaceted economic relationships that sustained the crafts industry*”,¹⁰⁴ bahwa “*in reality the new craft production owed less to tradition than to middle-class tastes and consumer culture--forces that obscured the techniques used by mountain laborers and the conditions in which they worked*”¹⁰⁵ (penebalan ditambahkan). Ini juga yang dikatakan oleh Masayuki Tanimoto¹⁰⁶ bahwa “[i]f industrialization was based on technological absorption and turnkey factories, then tradition played only a small part”. Dengan demikian, kecenderungan yang umum terjadi adalah apa yang dikatakan sebagai “*Ancient art with a modern twist*”, yaitu suatu kondisi yang juga dialami oleh Chinese

¹⁰³ Jane S. Becker, *Selling Tradition: Appalachia and the Construction of an American Folk 1930-1940* (Chapel Hill, North Carolina: The University of North Carolina Press 1998).

¹⁰⁴ “Selling Tradition: Appalachia and the Construction of an American Folk 1930-1940”, University of North Carolina Press, by Jane S. Becker, Januari 1, 1998”, Hamilton, College News <https://my.hamilton.edu/news/story/selling-tradition-appalachia-and-the-construction-of-an-american-folk-1930-1940>, diakses September 2010.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *The Role of Tradition in Japan's Industrialization: Another Path to Industrialization*, Edited by Masayuki Tanimoto, New York: Oxford University Press, 2006, sebagaimana direview oleh David G. Wittner, <http://www.hbs.edu/bhr/archives/bookreviews/81/dwittner.pdf>, diakses September 2010.

Kunqu Opera, "which is widely recognized as the mother of all operas in China".¹⁰⁷ Dalam upayanya untuk terus hidup, Zhang Jun salah seorang aktor dari Kunqu Opera harus "imbuing an element of modern marketing into an ancient art form". Akan tetapi, pada waktu yang sama ia dan para pemain lainnya juga harus menciptakan daya tarik Kunqu Opera bagi penonton "without compromising the artistic essentials that were never meant for the crowd".¹⁰⁸

Kecenderungan itu juga yang kita lihat pada produk batik Pekalongan dan produk ukiran Jepara. Seperti kita lihat, paling tidak ada satu hal yang dilakukan para pembatik Pekalongan dan pengukir Jepara dalam mengubah warisan budayanya menjadi "produk komersial" sesuai dengan permintaan pasar, yaitu menerima pesanan batik dan ukiran yang bukan merupakan produk original budayanya. Dengan kata lain, "keotentikan" budaya menjadi tidak penting lagi ketika kebutuhan ekonomi semakin besar, padahal "keotentikan" budaya ini selalu dipersoalkan ketika terjadi persaingan antarbudaya.

Hal kedua yang juga berubah adalah masuknya sistem ekonomi dan sistem manajemen modern ke dalam kegiatan perbatikan dan pengukiran yang awalnya lebih merupakan kegiatan budaya dan bagian dari ritual keagamaan yang terkait dengan pemeliharaan budaya kraton. Pada saat itu bahkan ada nilai kesakralan yang menempel pada produk-produk budaya terkait sehingga pembuatannya harus didahului oleh ritus-ritus tertentu. Tapi, saat ini nilai kesakralan tersebut sudah hilang, karena produk-produk tersebut cenderung diproduksi secara massal. Artinya, saat ini signifikansi nilai budaya batik Pekalongan dan ukiran Jepara bagi para pembatik dan pengukirnya sudah jauh lebih kecil daripada nilai ekonomisnya.

¹⁰⁷ "Ancient art with a modern twist", ChinaCulture.org, http://www.chinaculture.org/info/depth/2010-08-20/content_736947.html, diakses September 2010.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Hal lainnya yang juga terjadi adalah perubahan citra produk-produk budaya tersebut dari produk budaya lokal yang eksklusif dan terbatas pada pendukung budaya yang bersangkutan menjadi suatu produk yang bercitra nasional dan internasional. Batik hari ini disebut sebagai "pakaian nasional", dan bahkan secara nasional batik telah dijadikan pakaian yang "hampir wajib" dipakai pegawai negeri pada Jumat. Sementara ukiran Jepara, seperti telah disebutkan sebelumnya, dipromosikan sebagai "ukiran dunia". Ini merupakan contoh dari, "*a deepening tension [which] is evident between culture as something that is narrowly place-bound, and culture as a pattern of non-place globalized occurrences and experiences*", pernyataan Appadurai yang dikutip oleh Allen J. Scott (1997:324). Sehingga, bagi Scott, "*The geography of culture, like the geography of economic activity, is stretched across a tense force field of local and global linkages*" (*Ibid.*). Akan tetapi, dengan diusungnya identitas kota –Pekalongan sebagai kota Batik, dan Jepara sebagai Kota Ukir– maka jelas bahwa apa yang dikatakan Scott bahwa "*place is still uncontestably a repository of distinctive cultures*" (*Ibid.*) adalah benar adanya.

Seluruh perubahan yang terjadi ini pada dasarnya terkait dengan proses 'modern-isasi' yang terjadi di hampir seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, termasuk Pekalongan dan Jepara, karena memang seperti dikatakan M. Navabakhsh yang membahas "*Transition stages from a traditional city to an industrial city (Social and cultural environment of Tehran)*"¹⁰⁹ dengan mengutip Arak (1989), bahwa "*modernization means the promotion and increasing complexity of social exchanges and relationships, which forces the societies to move towards urbanization*", sehingga kota pada akhirnya bisa menjadi "*a place, which satisfies the citizens needs in the best possible way through social arrangements, balance of the macro organization in the society and labor division which leads the society*

¹⁰⁹ Diterbitkan dalam *Int. J. Environ. Sci. Tech*, Summer 2005, Vol. 2, No. 2, pp. 175-179, <http://www.ceers.org/ijest/issues/full/v2/n2/202012.pdf>, diakses September 2010.

towards its present goals". Sayangnya, karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana, studi tentang Pekalongan dan Jepara kali ini belum bisa mengukur hal tersebut.

3.8 Penutup

Pada tahap ini, penelitian tentang Pekalongan dan Jepara hanya bisa melihat keterjalinan antara tempat dan kebudayaan. Sebagaimana dikatakan oleh Scott, "*Place and culture are persistently intertwined with one another*" (1997:324). Dan karena, "*culture is a phenomenon that tends to have intensely place-specific characteristics thereby helping to differentiate places from one another*" (*Ibid.*), maka tidak mengherankan jika perbedaan budaya Pekalongan dan Jepara itulah yang membuat masing-masing berhasil menjadi sebuah tempat yang "unik/khas", Pekalongan sebagai kota Batik dan Jepara sebagai kota Ukir. Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, menurut Allen J. Scott, adalah "*the recursive relations between the cultural attributes of place and the logic of the local production system*" (*Ibid.*, hal 325), di samping karena "*the reputation and authenticity of cultural products (qualities that often provide decisive competitive advantages in trade) are sometimes irrevocably tied to particular places*" (*Ibid.*).

Akan tetapi, klaim tentang identitas kota itu, yang pada dasarnya merupakan "*the reassertion of place as a privileged locus of culture*" (Scott, 1997:324), tidak muncul begitu saja, melainkan karena adanya dua proses yang saling bertentangan tapi pada waktu yang sama saling terkait satu sama lain, yaitu di satu pihak, proses produksi yang "*occurring predominantly in localized clusters*", sementara di pihak lain, pada proses pemasaran "*final outputs are channeled into ever more spatially extended networks of consumption*" (*Ibid.*). Oleh sebab itu, adalah suatu yang wajar jika "*some local/regional cultures are under serious threat at the present time*", maka "*others are finding widening and receptive audiences*" (*Ibid.*), karena hubungan simbiosis antara tempat, kebudayaan, dan ekonomi, menurut Allen J. Scott, muncul kembali di era kapitalisme

modern ini dalam *"powerful new forms as expressed in the cultural economies of certain key cities"*. Dan itulah yang terjadi dengan Batik Pekalongan dan Ukiran Jepara. Akan tetapi, sejauh mana tesis berikut berlaku adalah pertanyaan yang masih harus dicari jawabannya: *"the more the specific cultural identities and economic order of these cities condense out of the landscape the more they come to enjoy monopoly powers of place (expressed in place-specific process and product configuration) that enhance their competitive advantages and provide their cultural-products industries with an edge in wider national and international market"* (Ibid., hlm. 325). Artinya, untuk penelitian selanjutnya kita masih perlu melihat sejauh mana pengklaiman dan pengukuhan identitas "kota" atas dasar warisan budaya untuk aktivitas ekonomi di Pekalongan dan Jepara benar-benar memberi mereka keuntungan kompetitif yang lebih besar dibanding sebelum hal itu dilakukan.

BAB IV

PENGUSAHA DAN BURUH JAWA-MUSLIM DALAM INDUSTRI KREATIF DI PEKALONGAN DAN JEPARA¹¹⁰

4.1 Pengantar

Salah satu pertimbangan dipilihnya Pekalongan dan Jepara dalam penelitian tentang transformasi sosial di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) adalah karena di kedua kota ini terdapat industri kreatif yang penting. Pekalongan merupakan sentra industri batik, dan Jepara merupakan sentra industri mebel-kayu. Selain itu, kedua kota ini memiliki reputasi sebagai kota pelabuhan yang penting dalam jaringan perdagangan laut di Nusantara, yang sekaligus merupakan dua kota yang memiliki masyarakat Muslim yang kuat, tidak saja secara politik tetapi juga secara ekonomi. Sebagai kota bandar, Pekalongan dan Jepara memiliki sejarah sosial yang terbentang panjang sejak masa pra-kolonial hingga masa kemerdekaan. Berbagai perubahan rezim politik yang dimulai sejak zaman kejayaan kerajaan Islam pasisir abad ke-15, masa pemerintahan dinasti Mataram dan kolonial, hingga periode paska-kemerdekaan, mendudukkan Pekalongan dan Jepara dalam hierarki pemerintahan daerah yang terus berubah hingga sekarang. Pada saat ini, Pekalongan sebagai sebuah wilayah administrasi terbagi menjadi dua, yang pertama sebagai Kota Pekalongan, dan yang kedua sebagai Kabupaten Pekalongan dengan ibukota di Kajen. Sementara itu, Jepara sampai saat ini masih berstatus Kabupaten dengan ibukota dengan nama yang sama, Jepara.¹¹¹

¹¹⁰ Ditulis oleh Riwanto Tirtosudarmo.

¹¹¹ Ulasan tentang sejarah sosial Kota Pekalongan dan Jepara, lihat tulisan Soewarsono (2010) "Menuju Masa Lalu: Catatan-Catatan Mengenai Ruang Sosial Bernama Pekalongan dan Jepara", dalam laporan lengkap

Perbedaan status dalam hierarki pemerintah daerah antara Pekalongan dan Jepara tidak menjadi halangan untuk menyandingkan kedua kota ini dalam perspektif yang bersifat komparatif. Dalam penelitian ini, tekanan diberikan pada masyarakat “urban” di Pekalongan dan Jepara yang keberadaannya tidak ditentukan oleh batas-batas dan status administrasi dari kedua kota ini. Masyarakat “urban” adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar golongan penduduknya yang berada dalam usia kerja tidak lagi bekerja di sektor pertanian, tetapi di sektor jasa dan perdagangan. Sebuah masyarakat “urban”, seperti halnya Pekalongan dan Jepara, memiliki tingkat heterogenitas kultural yang cukup tinggi. Seperti ditemukan di kota-kota lain di sepanjang Pantura, selain mayoritas penduduk yang dianggap sebagai penduduk setempat, selalu terdapat komunitas-komunitas penduduk yang dianggap sebagai masyarakat pendatang. Dalam konteks Pantura, saat ini, selalu ditemukan adanya komunitas Tionghoa dan Arab yang keberadaannya telah diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat “urban” yang ada. Komunitas Tionghoa dan Arab, karena latar belakang sejarah migrasi yang dimiliki dan peran mereka pada masa kolonial, menyebabkan mereka saat ini memiliki posisi sosial dan ekonomi yang penting dalam masyarakat “urban” di kota-kota di Pantura.¹¹² Di kota-kota Pantura, berbagai aspek lain, seperti bahasa daerah yang menggunakan dialek berbeda dibandingkan dengan yang digunakan di Jawa bagian tengah,

penelitian ini. Khusus tentang sejarah Pekalongan, lihat Djoko Suryo (2009) “Pekalongan, dari Desa Pesisir ke Kota Modern”.

¹¹² Uraian tentang komunitas masyarakat Tionghoa dan Arab, lihat tulisan Thung Ju Lan (2010), “Pekalongan dan Jepara (Kota-kota yang ‘Berbatik’ dan ‘Berukir’: ‘Modern-isasi’ Warisan Tradisional) dan Aulia Hadi (2010), “Konstruksi Identitas Masyarakat Arab di Pekalongan dan Jepara: Signifikansinya terhadap Industri Kreatif”, dalam laporan lengkap penelitian ini.

misalnya, merupakan hal yang menarik dari kehidupan masyarakat “urban” di Pekalongan dan Jepara.¹¹³

Tulisan ini akan memberikan perhatian pada bagian dari masyarakat “urban” yang terlibat dalam industri batik di Pekalongan dan industri mebel-kayu di Jepara, yaitu pengusaha dan buruhnya. Industri batik dan mebel-kayu merupakan industri yang mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat di Pekalongan dan Jepara. Industri batik dan mebel kayu memberi sumbangan yang terbesar bagi pendapatan daerah dan masyarakat. Selain itu, kedua industri ini juga paling banyak menyerap tenaga kerja di kedua kota itu. Sebagai industri yang dominan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, para pengusahanya diduga ikut memainkan peran sosial dan politik yang penting dalam dinamika politik lokal yang ada di Jepara dan Pekalongan. Sebagai bagian dari Jawa Tengah yang merupakan domain dari orang Jawa, golongan pekerja atau buruh, baik di Pekalongan maupun di Jepara, dapat dipastikan memiliki latar belakang etnis dan budaya Jawa. Meskipun secara statistik orang Jawa mayoritas adalah Muslim, afinitas terhadap keislaman bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Pekalongan dan Jepara adalah dua wilayah yang masyarakatnya dikenal memiliki afinitas yang tinggi terhadap keislaman. Oleh karena itulah dalam tulisan ini secara sengaja dipergunakan istilah Jawa-Muslim sebagai identitas kultural dari masyarakat Pekalongan dan Jepara. Berangkat dari beberapa karakteristik sosial dan ekonomi yang melekat dalam masyarakat “urban” di Pekalongan dan Jepara, tulisan ini akan memberikan perhatian pada dua komponen utama dalam struktur tenaga kerja yang terlibat dalam industri batik dan mebel-kayu, yaitu kelompok pengusaha dan kaum pekerja atau buruh, yang menjadi penunjang utama dari industri tersebut. Meskipun di Pekalongan terdapat pengusaha batik yang berasal dari komunitas Tionghoa dan

¹¹³ Uraian tentang perbandingan bahasa daerah yang dipergunakan di Jepara dan Pekalongan, lihat tulisan Imelda (2010), “Bahasa Jawa Pesisiran dan Perkembangannya di Pekalongan dan Jepara” dalam laporan lengkap penelitian ini.

Arab, mayoritas pengusaha berlatar belakang Jawa-Muslim. Sementara itu di Jepara, bisa dikatakan bahwa para pengusaha industri mebel-kayu hampir keseluruhannya memiliki latar belakang Jawa-Muslim.

Dalam kajian tentang masyarakat Muslim-Jawa, peranan kelompok elit – termasuk golongan pengusahanya – cukup mendapatkan perhatian.¹¹⁴ Begitu juga dalam kasus Pekalongan dan Jepara, studi-studi yang sudah dilakukan umumnya menyorot peran dari kelompok elit lokal ini.¹¹⁵ Dalam tulisan ini, selain kelompok pengusaha akan dilihat juga bagaimana keadaan kelompok pekerja atau buruhnya. Memberikan perhatian kepada kaum buruh ini sangat penting karena kaum buruh ini merupakan kelompok mayoritas dalam struktur pekerja dalam industri batik dan mebel-kayu dan merupakan warga kota yang paling rentan secara ekonomi dan politik. Kehadiran mereka sangat vital karena tanpa mereka pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan batik dan mebel-kayu tidak akan mengepulkan asap. Status pekerjaannya yang hampir-hampir tak terlindungi secara hukum telah menempatkan mereka dalam posisi marjinal dalam hierarki masyarakat “urban” di Pekalongan dan Jepara.

4.2 Pekalongan-Jepara dan Pengusaha Jawa-Muslim

Pekalongan dan Jepara memiliki karakteristik yang umumnya dimiliki oleh kota-kota di Jawa pada umumnya. Rutz (1987) berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota di Indonesia, menemukan beberapa karakteristik yang sangat menarik. Karakteristik pertama berkaitan dengan struktur pemukiman atau perkampungan yang dikatakannya sebagai tidak beraturan. “*The irregular structure of village settlements with detaches houses, typical of the Malay peoples, still characterizes the largest areas of Indonesian towns and cities today*”. Karakteristik yang kedua

¹¹⁴ Lihat Geertz (1963) dan Castles (1967).

¹¹⁵ Lihat Schiller (2007) dan Savirani (2009).

berhubungan dengan batas antara “kota” dan “desa” yang bersifat *gradual*. “*In the outskirts of the towns the transition between suburban and village kampungs is gradual*. Karakteristik yang ketiga adalah hampir selalu adanya pemukiman komunitas Tionghoa yang memiliki pola pemukimannya yang khas. “*With their traditionalist culture, they imported a closed, two-storey constructional form and the enclosed, compact method of building which distinguish the Chinese districts as an independent structural element of the towns and cities in the East Indies*”. Karakteristik yang keempat adalah sisa-sisa atau warisan besarnya pengaruh industrialisasi yang dilakukan oleh orang Eropa akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 hampir selalu nampak. “*The construction of stations, the erection of factories and warehouses, the setting up of business premises for all kinds of commercial enterprises and service industries*”.

Seperti telah dikemukakan dalam bagian pengantar, menyandingkan Pekalongan dan Jepara sebagai dua buah kota di Pantura akan segera terbentur pada perbedaan status pemerintah daerah yang dimiliki oleh kedua kota ini. Wilayah Pekalongan saat ini terbagi menjadi dua administrasi pemerintahan, yang pertama sebagai Kota, dan yang kedua sebagai Kabupaten. Kota Pekalongan yang dibentuk berdasarkan Pasal 231 dan Pasal 232 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 (Suryo, 2009: 128). Berdirinya Kota Pekalongan sekaligus juga berarti mulai terbentuknya Kabupaten Pekalongan yang beribukota di Kajen, sekitar 17 km dari Kota Pekalongan. Sementara itu, wilayah Jepara seluruhnya masih merupakan sebuah kabupaten, dengan ibukota di Jepara.¹¹⁶ Oleh karena dalam tulisan ini pengertian kota lebih dimaksudkan pada karakteristik atau sifat kekotaan, daripada maknanya dalam konteks administrasi pemerintahan, perbedaan yang berkaitan dengan status wilayah

¹¹⁶ Membandingkan Jepara dan Pekalongan sama dengan membandingkan Gresik dan Cirebon. Seperti Gresik, Jepara adalah sebuah kabupaten. Sementara Cirebon sama halnya dengan Pekalongan, terbagi menjadi dua wilayah administrasi: sebagai kota dan kabupaten. Tentang Gresik dan Cirebon, lihat hasil penelitian Tim Pantura DIKTI I.

administrasi pemerintahan yang ada antara Pekalongan dan Jepara untuk kepentingan ini dianggap tidak ada. Pengertian kota dalam tulisan ini lebih mengacu pada konsentrasi pemukiman penduduk yang memiliki karakteristik sebagai daerah urban. Jika kembali pada karakteristik kota-kota di Jawa seperti dikemukakan oleh Rutz di atas, maka sebagai pusat kota biasanya terdapat bangunan-bangunan peninggalan Belanda, seperti stasiun kereta api, pelabuhan, pabrik dan gudang-gudang, berbagai bekas perkantoran dan usaha-usaha komersial dan jasa, serta adanya pemukiman orang-orang Tionghoa dengan arsitektur rumah-tokonya yang khas. Selain memiliki komunitas Tionghoa, kota Pekalongan juga memiliki komunitas Arab yang cukup besar yang memiliki wilayah pemukimannya sendiri.

Pekalongan dan Jepara juga merupakan kota-kota yang mayoritas penduduknya adalah orang Jawa yang pada umumnya merupakan pemeluk agama Islam yang kuat. Di kedua kota ini berkembang dengan pesat pelbagai organisasi Islam, baik yang digolongkan sebagai organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Al Irsyad; maupun yang merupakan partai politik, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).¹¹⁷ Jika hendak dicari persamaan karakteristik sosial yang paling kuat antara Pekalongan dan Jepara, persamaan yang pertama barangkali adalah mayoritas adalah orang Jawa, dan persamaan yang kedua adalah afinitasnya yang tinggi terhadap keislaman. Keislaman sebagai sebuah karakteristik sosial di Pekalongan dan Jepara, selain mewarnai kehidupan politik juga tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan ekonomi yang melekat kuat pada golongan pengusaha dan pedagangnya. Untuk Pekalongan, selain dikenal karena memiliki kelompok pedagang dan pengusaha Muslimnya yang kuat, juga merupakan sebuah kota yang dipandang telah menghasilkan cukup

¹¹⁷ Uraian tentang organisasi Islam di Pekalongan dan Jepara, lihat tulisan Aulia Hadi.

banyak kaum cendekiawan yang tidak sedikit berkiprah secara nasional.¹¹⁸

Hubungan antara agama – dalam hal ini keislaman, politik, dan bisnis – telah lama menjadi perhatian ahli ilmu-ilmu sosial. Meskipun mungkin bukan yang pertama, Clifford Geertz adalah salah satu dari mereka yang mencoba melihat hubungan itu dengan cukup teliti. Dalam bukunya *Peddlers and Princes*, Geertz mengamati munculnya kelompok pengusaha setelah kemerdekaan di dua kota, Mojokuto– Pare, Jawa Timur dan Tabanan– Bali awal tahun 1950-an. Melalui penelitiannya ini, Geertz membedakan dua kegiatan ekonomi perkotaan (*urban based economy*), yaitu “ekonomi bazaar” dan “ekonomi firma” (Geertz, 1963, dikutip dari Makhasin, 2006). Jika “ekonomi bazaar” dianggapnya sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional, “ekonomi firma” adalah bentuk ekonomi modern yang dalam kasus di Mojokuto dilakukan oleh para pengusaha Muslim yang telah mendapatkan pengaruh dari pemikiran-pemikiran Islam yang bersifat reformis. Dalam studinya ini, Geertz memang mengacu pada pendapat Max Weber tentang etik protestan yang dianggap mendorong lahirnya kelas borjuasi dan kapitalisme di Barat.¹¹⁹ Meskipun kelompok pengusaha Muslim yang berorientasi

¹¹⁸ Beberapa nama cendekiawan yang berasal dari Pekalongan misalnya Sugeng Saryadi, Abdul Hakim Nusantara, Farchan Bulkin (almarhum), Adi Sasono, Taufik Ismail, Sybah Asa, Kartono, dan Goenawan Mohamad (meskipun lahir di Batang).

¹¹⁹ Di kalangan ahli ilmu-ilmu sosial di Indonesia, pembicaraan tentang apakah semacam “*Protestant Ethics*” juga dimiliki oleh pengusaha Muslim di Indonesia pernah dilakukan di kelompok LP3ES. Beberapa tokoh LP3ES yang sekaligus adalah cendekiawan Muslim seperti Taufik Abdullah, Dawam Rahardjo, dan Aswab Mahasin, untuk menyebut beberapa nama, pernah mengangkat persoalan ini, antara lain dengan menerbitkan buku yang berisi beberapa artikel tentang hal ini. Lihat “Agama, Etos Kerja, dan Pembangunan Ekonomi”, Editor Taufik Abdullah (1979). Pada pertengahan tahun 1990-an, peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, juga mengangkat isu etos kerja – yang juga banyak disinggung oleh Weber – dalam

modern dianggap sudah mulai muncul, Geertz meragukan kelompok ini akan menjadi kelas pengusaha seperti halnya yang ditemukan di Barat. Meskipun modal bukan merupakan masalah, Geertz melihat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan berorganisasi dan manajerial sebagai hambatan yang utama.

...what [modern santri] lack is the power to mobilize [its] capital and channel [its] drive in such a way as to exploit the existing market possibilities. [Modern santri] lacks the capacity to form efficient economic institutions; [modern santri] [is] entrepreneurs without enterprises (Geertz, 1963: 28).

Setelah Geertz, Lance Castles (1967), sebagaimana dikutip dari Makhasin (2006), adalah peneliti yang mencoba melihat tingkah laku pengusaha Muslim Jawa yang bergerak di industri rokok kretek di Kudus awal tahun 1960-an. Meskipun Castles melihat telah muncul pengusaha sebagai representasi kelas menengah Muslim di Kudus, seperti halnya Geertz, Castles juga menemukan beberapa kelemahan yang menjadi penghambat keberlanjutan kelas menengah Muslim sebagai pendorong perubahan masyarakat. Kelemahan itu antara lain adalah kekurangan dalam keterampilan berorganisasi, gagalnya mekanisasi dalam proses produksi rokok, adanya persaingan dengan pengusaha Tionghoa, dan yang tidak kalah penting adalah kegagalan pengusaha Muslim untuk membangun basis politik yang luas dengan mayoritas Muslim di Kudus. Sekitar awal tahun 1990-an Abdullah (1994, dikutip dari Makhasin, 2006) melakukan penelitian terhadap pengusaha Muhammadiyah di Jatinom, sebuah kota kecamatan di dekat Klaten. Dari penelitian yang dilakukan, Abdullah menolak hasil penelitian Peacock sebelumnya (1978, dikutip dari Makhasin, 2006) yang mengatakan bahwa pengusaha Muhammadiyah gagal dalam

serangkaian penelitian pada berbagai jenis usaha ekonomi lokal. Lihat, sebagai contoh hasil penelitian ini, “Etos Kerja Pengrajin Batu Permata Banjar: Pendekatan Antropologi” (Ninuk Kleden-Probonegoro dan Zultanawar, 1996), “Pedagang Pasar dan Orientasi Keagamaan: Studi Kasus Industri Kecil di Sidoarjo” (Anas Saidi, 1998).

mengembangkan semangat wiraswasta bagi para pengikutnya. Peneliti lain, Kuntowijoyo (1971, dikutip dari Makhasin, 2006) sejak semula meragukan adanya reformasi dalam keagamaan dan pengaruhnya terhadap semangat wiraswasta pengusaha Muslim. Menurut Kuntowijoyo, berdasarkan penelitiannya di daerah pedesaan di Klaten, kelompok pengusaha Muslim justru berperan dalam memperkuat pemahaman Islam yang lebih bersifat ortodoks. Pendapat Kuntowijoyo yang didasarkan pada observasinya di daerah pedesaan memang belum bisa dijadikan alasan untuk menggugat Geertz atau Castles yang melakukan studinya di perkotaan.

Savirani (2009) meneliti kaitan antara bisnis dan politik di Pekalongan setelah Indonesia memasuki periode reformasi dan desentralisasi paska-Suharto. Berangkat dari kritik tentang sedikitnya perhatian kepada peran kelompok pengusaha atau kalangan bisnis dalam dinamika politik lokal paska-Suharto, Savirani secara khusus meneliti peran pengusaha batik di Pekalongan dan bagaimana hubungannya dengan negara – dalam hal ini pemerintah daerah di Kota Pekalongan. Menurutnya, pola hubungan antara pengusaha batik dan negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalu terutama ketika pemerintah memberikan proteksi yang besar pada pengusaha batik pribumi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Inilah awal kebangkitan pengusaha batik pribumi yang terus berkembang hingga sekarang. Pada saat ini, perkembangan industri batik di Pekalongan telah berkembang sedemikian rupa dan boleh dikatakan tidak lagi tergantung pada proteksi pemerintah, seperti pada awal tahun 1950-an dan 1960-an. Ada dua karakteristik utama dari industri batik di Pekalongan yang ditemukan oleh Savirani. Pertama, industri batik di Pekalongan pada dasarnya masih merupakan usaha yang berskala kecil (*small scale enterprises*) yang pola manajemennya boleh dikatakan masih bersifat tradisional di mana peran keluarga sangat besar. Kedua, industri batik di Pekalongan perkembangannya masih sangat tergantung pada pasar, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembelian dan ketersediaan bahan. Dua

karakteristik ini, menurut Savirani (2009) memperlihatkan relatif independennya pengusaha batik di Pekalongan dari negara.

Berdasarkan catatan Schiller (2007), 93% dari penduduk Jepara beragama Islam, dan NU sejak awal merupakan organisasi yang mendapatkan dukungan paling besar di Jepara. Muhammadiyah, yang lebih berorientasi Islam modern, dan merupakan rival dari NU, lebih baru dan memiliki pendukung yang tidak terlalu besar. Di Jepara, hubungan antara negara dan komunitas pengusaha, sebagaimana dicatat oleh Schiller (2007: 329) memperlihatkan sangat kuatnya posisi NU sebagai sebuah organisasi di mana hampir semua pengusaha Jawa-Muslim bernaung. NU merupakan basis dari kelompok pengusaha mebel-kayu yang memperlihatkan independensi tinggi dalam hubungannya dengan negara. PPP yang pada awal tahun 1970-an menjadi representasi politik NU memperlihatkan kemampuannya untuk memobilisasi kekuatan politik di Jepara.

During the New Order, the strong NU presence, the blossoming of a self-confident, non-crony, indigenous commercial elite around the furniture industry, and the electoral success of the overwhelmingly NU-based party Partai Persatuan Pembangunan (PPP, Unity and Development Party) resulted in a community, and a district assembly, more capable of making demands on local government and uncovering corruption or mismanagement... (Schiller, 2007).

Sama seperti Jepara, Pekalongan juga mayoritas penduduknya beragama Islam, dan hampir semua pengusaha batik (99,4%) adalah Jawa-Muslim.¹²⁰ Kuatnya orientasi keislaman para pengusaha batik di Pekalongan antara lain tercermin dari pandangan mereka bahwa keuntungan-keuntungan material bukanlah yang

¹²⁰ Hasil survei Savirani (2008: 141) terhadap 349 pemilik perusahaan batik di Pekalongan, ditemukan distribusi etnis sebagai berikut: Jawa 95,1%, Arab 0,9% (3 orang), campuran Arab-Jawa 2,3% (8 orang), dan Tionghoa 0,6% (2 orang).

terpenting, bagi mereka. *“What is important is God’s blessing of their business, so that they will receive berkah, or a blessing. Being blessed also means that they will do good deeds in their lives”* (Savirani, 2009). Meskipun tidak meneliti bagaimana keislaman mempengaruhi tingkah laku bisnis para pengusaha mebel-kayu di Jepara, Schiller (t.t) melihat pentingnya peranan kelompok pengusaha Jawa-Muslim dalam mengembangkan masyarakat sipil yang bersifat inklusif di Jepara.

4.3 Batik dan Mebel-Kayu sebagai Produk Kebudayaan

Industri kreatif dalam tulisan ini didefinisikan sebagai industri yang keterampilan pekerjanya untuk memproduksi merupakan keterampilan yang bersumber pada tradisi berkesenian sebuah masyarakat yang secara turun temurun. Keterampilan membatik dan membuat mebel-kayu saat ini diajarkan secara formal di beberapa sekolah yang dibangun untuk mengajarkan keterampilan itu, namun sebagian besar pengrajin mendapatkan ketrampilannya melalui lembaga keluarga secara nonformal. Di Pekalongan, seperti juga di Solo dan Yogyakarta yang merupakan kota-kota dengan sentra-sentra batik yang luas, keluarga-keluarga merupakan basis ketenagakerjaan dari industri batik. Menurut Hayati (2010: 125), daya tahan batik pekalongan antara lain karena industri dan perdagangan batik memiliki sifat sebagai usaha keluarga yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pola pewarisan ini menjadi sangat penting karena mengatur peralihan sumber-sumber daya dan penguasaan atas usaha-usaha yang digeluti dari generasi tua ke generasi muda. Di sentra-sentra pembuatan batik, kerajinan batik ditekuni oleh anak-anak hingga orang tua. Waktu luang anak-anak sekolah diisi dengan kegiatan membatik. Di Pekalongan terjadi proses regenerasi ketrampilan membatik yang baik secara turun temurun.

Begitu juga dengan ketrampilan membuat mebel dan kayu, merupakan bagian dari tradisi yang secara luas berkembang di keluarga-keluarga di Jepara. Meminjam perspektif Scott (1997), Pekalongan dan Jepara adalah dua kota yang dapat merupakan contoh

dari adanya simbiosis antara ruang (*space*) dan kebudayaan (*culture*) – atau lebih tepatnya kesenian (*art*) dan ekonomi (*economy*) – khususnya pasar. Batik dan mebel-kayu adalah dua komoditas ekonomi yang diproduksi oleh kekuatan kapitalisme yang telah menjadi bagian dari sebuah “kebudayaan kota” (*urban culture*). Dengan meminjam istilah dari Scott (1997), meskipun sesungguhnya tidak sama persis, batik dan mebel-kayu adalah komoditas ekonomi yang merupakan produk dari kebudayaan (*cultural products*).

Produk kebudayaan yang dihasilkan oleh sebuah kota bisa beragam dalam hal substansi, penampilan, maupun asal-usulnya, dan tidak selalu merupakan barang, tetapi juga dapat berupa jasa. Menurut Scott (1997) produk kebudayaan tidak jarang berawal dari sektor-sektor manufaktur yang bersifat tradisional yang mengalami transformasi dari bahan mentah menjadi produk yang berkualitas (seperti pakaian, mebel, dan perhiasan) setelah melalui proses produksi tertentu. Jasa-jasa turisme, teater, iklan, penerbitan buku, dan film adalah contoh-contoh lain dari produk kebudayaan, yang tidak jarang memiliki hubungan khusus, atau kehadirannya terpaut dengan kota tertentu sebagai ruang (*space*) di mana produk kebudayaan itu diproduksi.

Adalah sebuah kebetulan jika bisnis yang memiliki arti ekonomi yang paling luas bagi masyarakat Pekalongan dan Jepara adalah bisnis kerajinan, atau yang dalam istilah lain disebut sebagai industri kreatif, yaitu batik di Pekalongan dan mebel atau ukir di Jepara. Bisnis kerajinan atau industri kreatif memiliki jenis pekerja yang khas, yaitu adanya keterampilan dalam bekerja yang sebagian besar masih diajarkan secara turun temurun dalam keluarga. Akibat dari pola pekerjaan dan sistem perekrutan pekerja yang berbasis keluarga ini, industri batik di Pekalongan dan industri ukir dan mebel di Jepara, sebagian besar proses industrinya bisa digolongkan dalam kategori industri rumah tangga (*home industry*).

Berbeda dengan Pekalongan yang boleh dikatakan terus berperan sebagai sebuah kota perdagangan di jalur Pantura yang

cukup penting, khususnya batik sejak awal tahun 1950-an, Jepara, meskipun pernah memiliki kejayaan masa lalu di abad ke-16, saat para sultan dan bupati pesisir berkuasa, setelah kemerdekaan baru mulai diperhitungkan kembali sebagai sebuah kota dagang pada awal tahun 1980-an ketika bisnis mebel dan ukir mulai ramai. Meskipun dari survei yang dilakukan oleh Roda (2007) perusahaan mebel-kayu telah ada sejak tahun 1955, lonjakan dalam jumlah terjadi secara drastis sekitar tahun 2000-an – justru ketika ekonomi Indonesia dilanda krisis. Schiller (2007) yang sejak awal tahun 1980-an secara terus menerus mengikuti perkembangan masyarakat Jepara, menuturkan pengamatannya sebagai berikut.

Since the growth of that industry it has become one of the most prosperous non-resource rich districts in Indonesia. The prosperity is not equally shared, but many ordinary Jeparans have done well. In 2002, it had the second lowest percentage of families living below the poverty line in Central Java (hlm. 328).

Menurut Schiller (2007: 330), pertumbuhan ekonomi di Jepara tumbuh bersamaan dengan mulai dirasakannya dampak dari apa yang dikenal sebagai “oil boom economy”. Akibat dari melonjaknya perekonomian Indonesia setelah meningkatnya harga minyak di pasaran dunia, sekitar awal tahun 1980-an, pembelian mebel dan ukiran Jepara oleh pasar lokal mengalami peningkatan yang mencolok. Keadaan ini menciptakan sebuah kondisi di mana para pengusaha mebel-kayu jati di Jepara – yang mayoritas berlatar belakang Jawa-Muslim dan umumnya adalah pengikut NU – memiliki posisi ekonomi dan politik yang besar. Ketika harga minyak di pasaran internasional mulai anjlog, pemerintah Indonesia mengubah strategi ekonomi nasional dengan menggenjot ekspor berbagai produk nonmigas. Pada saat inilah industri mebel-kayu dari Jepara menemukan momen penting yang baru, yaitu masuknya produk Jepara dalam pusaran pasar internasional sebagai produk ekspor unggulan dari Indonesia. Klimaks pertumbuhan ekonomi Jepara terjadi justru ketika Indonesia secara nasional diterpa oleh

krisis keuangan tahun 1997-1998 dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pengusaha Jepara yang tengah menikmati besarnya ekspor mebel-kayu untuk pasaran internasional segera menanggung keuntungan yang tidak terduga dengan melonjaknya nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Apa yang dialami oleh industri mebel-kayu di Jepara ketika terjadi krisis keuangan tahun 1997-1998 yang justru memakmurkan rakyat Jepara, tampaknya tidak terjadi di Pekalongan dengan industri batiknya. Jika di Jepara, sebagaimana dicatat oleh Saidi (2000: 16), masa melimpahnya uang itu, dikenal sebagai “masa *booming*” di mana kegiatan industri mebel-kayu yang pada tahun 1986 hanya melibatkan 12 desa di empat kecamatan, pada tahun 1988 telah melibatkan 103 desa di sepuluh kecamatan. Pada tahun 1994 nilai ekspor yang berjumlah US\$ 64.335.023 melonjak menjadi US\$ 165.251.410,300 – yang melibatkan 227 eksportir menengah domestik, 33 eksportir besar domestik, dan 13 eksportir asing.¹²¹ Dampak “*booming*” tidak saja dinikmati oleh para pengusahanya, tetapi juga oleh para buruh dan pengrajin di tingkat bawah. Tukang ampelas yang biasanya diupah tujuh ribu per hari, melonjak menjadi 15 ribu rupiah. Tukang kayu melonjak dari 17,5 ribu rupiah, menjadi sekitar 30 ribu rupiah, dan jika lembur bisa mendapatkan 50 ribu

¹²¹ Keterlibatan pemilik modal yang berkewarganegaraan asing dalam bisnis mebel-kayu merupakan sebuah isu yang menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Secara hukum, warga negara asing tidak begitu saja diizinkan untuk memiliki usaha dalam industri di dalam negeri. Namun, dalam bisnis mebel-kayu bukan rahasia lagi terjadi “*pengatasnamaan*” atau yang juga dikenal di Jepara sebagai “*undername*” di mana modal dari warga negara asing dan usaha atas nama orang Indonesia. Kehadiran warga negara asing dan keterlibatan dalam bisnis mebel-kayu di Jepara tidak saja membawa implikasi yang bersifat sosial karena perbedaan gaya hidup dan kebiasaan, tetapi juga implikasi dalam segi hukum karena peraturan yang ada dalam praktiknya tidak selalu dipatuhi bahkan sering diselewengkan, baik oleh pengusaha Indonesia maupun asing dalam kerja sama bisnis (Koentji, 1999).

rupiah per hari. Tentang “*booming*” di Jepara ini, Schiller (2007: 334-335) melukiskannya sebagai berikut.

Many Jeparans did well in the economic crises. At least 80,000 Jeparans are directly employed in the furniture industry, in 1999 worth 400 to 500 Asian economic crises; the district was full of new furniture showrooms, fully occupied hotels, restaurants, and new shops. In 1998 Jepara sent more than 900 people on the haj, three times the number sent by the neighboring district of Kudus and more than any other locality in Central Java. In 1999 it sent more than 2300, more than any district or town in Indonesia. It has more motor vehicles (55,000 in total) than in any district or town in Central Java except the capital, Semarang. Commercial and residential land prices are said to be the highest in Central Java and the cost of living comparable to Java's largest cities.

Para pengusaha batik dan masyarakat Pekalongan pada umumnya, diduga tidak seberuntung pengusaha dan masyarakat Jepara yang pendapatannya meningkat dengan drastis akibat krisis keuangan tahun 1997-1998. Bahkan dari pola produksi yang cukup mengandalkan pada bahan yang harus diimpor dari luar negeri, krisis keuangan punya pengaruh yang negatif terhadap usaha batik di Pekalongan. Perajin dan pengusaha batik Pekalongan, Jawa Tengah mulai merasakan kesulitan dan terpuruk akibat naiknya berbagai bahan dasar kebutuhan batik, seperti kain, lilin, obat-obatan, dan pewarna. Kondisi ini membuat pemasaran batik pekalongan menjadi lebih sulit di tengah persaingan perdagangan internasional. Masuknya “produk *printing* yang mirip batik” dari Cina pada waktu yang sama sangat merugikan bagi para pengusaha batik dari Pekalongan karena harga produk dari Cina bisa lebih murah. Sebagaimana dikemukakan oleh Savirani (2009), pengusaha batik di Pekalongan sangat ditentukan nasibnya oleh pasar dalam bentuk “*procurement*” dan ketersediaan bahan. Pukulan yang berat bagi para pengusaha batik di Pekalongan juga terjadi ketika Pasar Tanah Abang terbakar dan bom meledak di Bali. Baik Pasar Tanah Abang maupun Pulau Bali

keduanya merupakan pasar yang sangat penting dalam jalur distribusi produksi batik dari Pekalongan. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Candra Herawati, akibat peristiwa itu tingkat penjualan batik turun sampai 40%. Pasar lain bagi produk batik Pekalongan adalah Surabaya, Medan, dan Bandung. “Ketika Pasar Tanah Abang Blok A terbakar dan kasus Bom Bali, sektor industri batik di Pekalongan sangat terpuruk hingga kurang lebih 40%. Berawal dari dua kasus itulah, akhirnya kami menyepakati untuk mencari pasar alternatif, dalam upaya untuk memperjuangkan kelangsungan batik yang menjadi ciri khas Kota Pekalongan” (*Sinar Harapan*, 2003).

Secara umum, berdasarkan teknik memproduksinya, batik dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah batik yang diproduksi dengan teknik yang bersifat tradisional, dan yang kedua adalah yang diproduksi dengan teknik yang modern (Savirani, 2010). Batik tulis atau batik halus, dan batik cap; atau kombinasi antara keduanya merupakan batik-batik yang diproduksi dengan teknik tradisional yang banyak membutuhkan waktu dan keterampilan membatik yang tinggi. Sementara itu, jenis batik yang kedua adalah batik-batik yang diproduksi secara masal dengan menggunakan mesin. Batik yang diproduksi dengan teknik modern ini dikenal dengan sebutan “batik sablon” atau “batik *printing*”. Teknik memproduksi batik dengan menggunakan mesin ini menurut seorang nara sumber, seorang pengusaha batik di Pekalongan, adalah sebuah revolusi dalam dunia perbatikan. Dengan teknik yang modern ini produksi batik bisa dilipatgandakan dalam waktu yang sangat cepat dibandingkan dengan batik yang diproduksi dengan teknik yang bersifat tradisional. Implikasi yang dibawa oleh revolusi teknologi dalam industri perbatikan ini tidak saja dalam jumlah produksi yang dihasilkan, namun juga dalam jumlah pekerja yang dipakai dan jenis serta tingkat keterampilan pekerja yang terlibat dalam perusahaan batik yang menggunakan teknologi yang modern ini.

Sebagai perbandingan (Savirani, 2010), jika dalam seminggu sebuah perusahaan dengan 40 orang pekerja yang menggunakan

teknik tradisional bisa menghasilkan 400 lembar batik cap; dengan teknologi modern, perusahaan yang sama bisa menghasilkan 10 ribu lembar batik *printing*. Perbandingan lain berkaitan dengan harga batik. Jika selembar batik tulis dari sutera yang untuk menyelesaikannya diperlukan waktu sekitar 4-6 bulan, berharga sekitar 4 juta rupiah; batik *printing* yang diproduksi secara masal dengan mesin hanya dihargai 30-70 ribu rupiah per lembarnya. Upah seorang pekerja batik cukup bervariasi. Seorang pembatik yang bekerja di perusahaan batik yang menggunakan teknik tradisional, umumnya perempuan, dibayar sekitar 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, seorang pekerja batik di perusahaan yang menggunakan mesin yang modern, biasanya laki-laki, rata-rata mendapatkan upah sekitar 900 ribu per bulan. Bekerja di pabrik yang menggunakan mesin, dari sudut keterampilan membatik tidak perlu secanggih ketrampilan yang diperlukan oleh seorang pembatik tradisional, namun memerlukan lebih banyak tenaga karena harus mengangkat alat-alat yang cukup berat, di samping memiliki risiko mengalami kecelakaan yang tinggi.

Savirani (2010) melihat banyaknya perusahaan batik mendorong persaingan yang ketat di antara para pengusaha batik di Pekalongan. Naik turunnya permintaan pasar akan produksi batik juga sangat berpengaruh terhadap permintaan akan tenaga kerja, padahal jumlah tenaga kerja untuk industri batik di Pekalongan sangat melimpah. Industri batik di Pekalongan menyerap sekitar 70% dari seluruh tenaga kerja di Pekalongan, atau dua di antara tiga orang dewasa di Pekalongan adalah pekerja atau buruh batik (Savirani, 2010). Bisa dibayangkan bahwa kesempatan kerja yang terbatas, sementara permintaan pasar akan produksi batik sangat fluktuatif, menciptakan perebutan untuk dapat pekerjaan menjadi keras, dan besarnya upah harian seorang buruh batik menjadi tidak tentu dan sangat tergantung dari kebijakan masing-masing pemilik perusahaan. Perusahaan batik di Pekalongan yang telah menjadi pemasok batik pada perusahaan batik yang terkenal, seperti Danar Hadi atau Batik Keris mampu membayar buruhnya dengan upah yang relatif tinggi.

Namun bagi pemilik perusahaan batik kecil atau rumahan yang sekedar sebagai sub-kontraktor dari perusahaan batik yang lebih besar biasanya membayar buruhnya dengan upah yang tidak tinggi. Keadaan semacam ini jelas menempatkan pekerja atau buruh batik dalam posisi yang sangat rentan, karena dalam hubungan dengan pemilik perusahaan atau pengusaha batik para buruh atau pekerja ini memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang sangat rendah.

4.4 Pekerja Batik dan Mebel-Kayu: Buruh Tanpa Hak-hak Perburuhan

Menurut estimasi, 80% produksi batik di Indonesia dihasilkan dari Pekalongan. Diperkirakan sekitar 70% dari angkatan kerja di Kota Pekalongan bekerja pada industri batik. Sekitar tahun 1970-an pengusaha batik yang menjalankan usaha di Pekalongan tidak hanya berasal dari Pekalongan. Pengusaha Bugis dari Sulawesi Selatan, pengusaha Minangkabau dari Sumatera Barat, dan pengusaha Sunda dari Jawa Barat, tercatat ikut meramaikan bursa batik di Pekalongan. Saat ini sisa-sisa adanya pengusaha dari Bugis dan Minangkabau, misalnya, masih bisa ditemukan di Pekalongan, meskipun keturunan para pengusaha ini tidak lagi berkecimpung di industri batik. Berdasarkan survei yang dilakukannya, Savirani (2009) menemukan adanya 349 usaha batik yang lokasinya tersebar di 37 kelurahan. Ada lima kelurahan yang merupakan pusat dari usaha perbatikan di Pekalongan, yaitu Pasir Sari (45 unit atau 12,9%), Kradenan (33 unit atau 9,5%), Pring Langu (31 unit atau 9%), Banyu Urip Alit (15 unit atau 4,9%) dan Pabean (15 unit atau 4,9%). Kelima kelurahan ini termasuk di dalam wilayah Kota Pekalongan, meskipun terletak agak di pinggir. Kradenan, Pring Langu, dan Banyu Urip Alit terletak di Kecamatan Pekalongan Selatan, sementara Pasir Sari dan Pabean berada di Kecamatan Pekalongan Barat.

Dari struktur pekerjaan yang ada di industri batik di Pekalongan maupun industri mebel kayu di Jepara, buruh atau pekerja yang merupakan lapisan terbawah dalam struktur pekerjaan yang ada dapat dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah buruh

atau pekerja yang melakukan pekerjaan itu di lokasi perusahaan; dan golongan kedua adalah buruh atau pekerja yang melakukan pekerjaannya di rumah masing-masing. Golongan yang kedua ini dengan demikian dapat disebut sebagai pekerja keluarga, sementara mereka yang bekerja di lokasi perusahaan bisa disebut sebagai buruh pabrik. Implikasi dari adanya dua jenis pekerja ini, buruh pabrik dan pekerja keluarga, adalah perbedaan pada sistem penggajian serta ada atau tidaknya hak-hak sebagai pekerja yang dilindungi negara. Pada mereka yang tergolong sebagai pekerja keluarga jelas tidak ada sistem penggajian yang baku dan tidak ada jaminan atas hak-haknya sebagai pekerja – sesuai dengan peraturan atau perundangan yang berlaku, baik secara nasional maupun berdasarkan peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, baik di Pekalongan maupun di Jepara.

Sebagai pekerja keluarga, buruh batik di Pekalongan maupun buruh mebel-kayu di Jepara tergolong sebagai pekerja sektor informal yang tidak mendapatkan jaminan sosial dan hak-haknya sesuai dengan hukum perburuhan. Hidup mereka sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk bekerja, dan jika mereka tidak mampu lagi untuk bekerja, karena tua dan lemah, mereka secara alamiah terlempar dari dunia kerja tanpa adanya uang pensiun atau jaminan sosial yang disediakan oleh perusahaan maupun negara. Pada saat itu mereka harus menanggung nasibnya sendiri, atau kalau beruntung menjadi tanggungan anak-anaknya atau saudara-saudaranya.

Jika dilihat dari pemilikannya, industri batik merupakan usaha yang sepenuhnya merupakan usaha rumah tangga (*home industry*) dengan pola manajemen keluarga. Dari pemetaan yang dilakukan, Savirani (2009) menemukan bahwa 78% perusahaan dimiliki oleh keluarga inti (*nuclear family*) dan 12% perusahaan dimiliki oleh keluarga besar (*extended family*). Dalam pola usaha dan manajemen keluarga, seluruh anggota keluarga hampir semuanya terlibat dalam proses produksi batik. Jika diperlukan pekerja tambahan, maka akan dicari tenaga yang berasal dari anggota keluarga besar, misalnya dari pihak istri atau suami dari sebuah

keluarga inti. Sekitar 80% dari usaha batik di Pekalongan mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga inti, namun masih merupakan anggota atau bagian di dalam keluarga besar.

Jika para pengusaha atau pemilik perusahaan batik di Pekalongan memiliki beberapa organisasi atau asosiasi pengusaha, buruh batik sama sekali tidak memiliki organisasi atau serikat pekerja. Sebuah gejala sosial yang menarik belum lama ini muncul di kalangan para pembatik di Pekalongan. Seorang pemilik usaha batik kecil, Shodikin (33 tahun), yang sehari-hari bekerja di rumahnya di Kelurahan Pasir Sari Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai pengusaha kecil yang dibantu oleh beberapa anggota keluarganya, mulai menyadari akan perlunya sebuah organisasi yang bisa menyuarakan kepentingan para buruh batik. Sebagaimana diungkapkannya pada sebuah media (*Kompas* Edisi Jawa Tengah, 15 Juni 2010), pengalamannya yang cukup panjang sebagai pengusaha batik kecil menyadarkannya akan perlunya meningkatkan posisi tawar para buruh batik. Bersama beberapa pembatik di desanya, pada bulan Mei 2009, Shodikin mengambil inisiatif untuk mendirikan apa yang disebutnya sebagai “Serikat Pembatik Pasir Sari”. Oleh teman-temannya, Shodikin diangkat sebagai ketua organisasi – satu-satunya di Pekalongan – yang berusaha memperjuangkan nasib buruh batik. Melalui serikat pembatik ini, para pengrajin batik bisa saling tukar informasi dan bisa bersama-sama memasarkan “kain-kain sortiran” yang ditolak oleh pengusaha batik yang lebih besar, sehingga harganya tidak jatuh dan buruh tidak rugi. Melalui serikat pekerja, mereka juga berusaha membuat standarisasi harga agar sesama pembatik tidak saling menjatuhkan. Pada pertengahan tahun 2010, telah terdaftar 110 perajin batik di Kelurahan Pasir Sari, 30% merupakan perajin pemilik dan 70% adalah buruh batik – dikenal di Pekalongan sebagai buruh *babar*.¹²²

¹²² Pada saat melakukan penelitian lapangan di Pekalongan, penulis berusaha untuk menemui Shodikin di rumahnya, namun Shodikin tidak ada. Menurut keterangan istrinya, saat itu Shodikin sedang mengikuti kongres

Pada tahun 2007 Center for International Forestry Research (CIFOR) menerbitkan hasil survei-pemetaan tentang berbagai aspek dari industri mebel-kayu di Jepara (Roda, 2007). Dari survei-pemetaan yang menekankan aspek distribusi industri secara spasial itu, ditemukan sebanyak 15.271 unit produksi (dinamakan “brak”, atau bengkel kerja –workshop) yang memperkerjakan sekitar 170.000 orang. Industri mebel-kayu menghasilkan pendapatan yang bernilai tambah antara Rp.11.900 – 12.300 miliar/tahun (sekitar Euro 1 miliar/tahun), atau Rp.70 – 78 juta/pekerja/tahun. Menurut survei, setidaknya terdapat 14.091 unit kecil, (92%), 871 unit menengah (6%), dan 309 unit besar (2%). Angka tersebut merupakan angka minimum untuk industri di Jepara, karena walaupun sensus yang dilakukan hampir lengkap, kemungkinan terdapat beberapa bengkel dan perusahaan yang tidak diketahui tim survei. Selama ini, perkiraan berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam industri mebel di Jepara sesungguhnya cukup bervariasi, hal ini bisa dimengerti karena sumber data dan cara yang dipakai untuk mengumpulkan data berbeda antara satu dengan lainnya. Survei Atlas (Roda, 2007: 23) berdasarkan sampel yang diambil memperkirakan jumlah pekerja di bidang mebel di Jepara mencapai 176.470 pekerja. Perbedaan

Pemuda Anshor di Kota Pekalongan. Melalui kontak telpon, Shodikin tidak keberatan kalau penulis menemuinya di lokasi tempat kongres dilakukan. Dalam kesempatan wawancara dengan Shodikin di salah satu ruangan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA milik NU), diperoleh informasi bahwa Shodikin adalah salah satu pengurus Pemuda Anshor di Kota Pekalongan. Posisinya sebagai salah satu pengurus Pemuda Anshor – yang merupakan organisasi pemuda dari NU – menjadi latar belakang tersendiri dari keberanian dan inisiatifnya untuk membentuk organisasi “serikat” pekerja batik di Pekalongan. Pilihannya untuk mengorganisir pekerja dan buruh batik bukanlah pilihan yang tanpa risiko, mengingat dominasi yang selama ini dilakukan oleh para pengusaha dan pemilik industri batik, misalnya dalam menekan upah buruh batik yang rendah. Karena usia organisasinya yang belum lama, belum bisa dipastikan apakah Shodikin akan berhasil dalam misinya untuk meningkatkan harkat dan nasib buruh batik di Pekalongan.

perkiraan tentang jumlah pekerja pada tahun 2000-2005, dari berbagai sumber yang ada, sebagaimana dicatat oleh Roda (2007) adalah seperti berikut.

Studi pertama (Sulandjari dan Rupidara), dalam (Posthuma 2003), mencatat 11.568 pekerja pada tahun 2000, suatu jumlah yang 9 kali lebih kecil daripada temuan kami (setidaknya 108.000 pekerja pada tahun 2000). Demikian juga, (Sandee dkk.), dalam (Posthuma 2003), menemukan 44.000 pekerja pada tahun 2002. Angka tersebut adalah 3 kali lebih kecil daripada temuan kami (setidaknya 140.000 pekerja pada tahun 2002). Akhirnya, pemerintah (Dinas Perindustrian Kabupaten), dalam (Loebis dkk. 2005), menemukan 58.210 pekerja pada tahun 2002, atau 2 kali lebih sedikit daripada temuan kami. Tulisan lain memperkirakan jumlah pekerja di seluruh Provinsi Jawa Tengah, dan hasilnya ternyata lebih sedikit daripada jumlah pekerja yang ada di Jepara (Maynard 2004), padahal di provinsi itu terdapat setidaknya 4 sentra industri mebel besar, dari 27 lokasi dengan industri mebel.

Dari pengamatan yang dilakukan di Pekalongan dan Jepara, struktur industri yang masih bertumpu pada lembaga keluarga, menciptakan golongan pekerja yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemilik perusahaan di mana mereka bekerja. Mayoritas pekerja, baik di industri batik maupun industri mebel-kayu berstatus sebagai pekerja keluarga – yang dalam konteks hukum perburuhan digolongkan sebagai pekerja informal. Implikasi dari statusnya sebagai pekerja informal adalah tidak dimilikinya hak-hak sebagai layaknya buruh industri. Posisi lain yang melemahkan kelompok pekerja, baik di industri batik maupun industri mebel-kayu adalah sering dipilihnya sistem bekerja borongan atau “*sub-contracting*”, di mana sebuah perusahaan memborongkan sebagian pekerjaannya ke perusahaan lain – biasanya yang lebih kecil, dan biasanya berupa sebuah keluarga, atau beberapa keluarga, bahkan sebuah dusun (*neighbourhood*). Pengamatan ini sesuai dengan hasil survei Roda (2007) yang menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan mebel-

kayu (95,5%) merupakan perusahaan keluarga yang dijalankan oleh saudara sendiri. Sedikit sekali perusahaan yang melibatkan dua (4,3%) atau tiga (0,2%) keluarga atau satu garis keturunan. Survei Roda (2007) juga memperlihatkan hampir semua perusahaan mempunyai satu atau lebih perusahaan mitra. Singkatnya, perusahaan di Jepara sangat terkait satu sama lain, namun umumnya tidak melalui kepemilikan atau usaha patungan, melainkan melalui ikatan bisnis murni (*sub-contracting*).

Pola kerja borongan atau "*sub-contracting*" menguntungkan para pemilik atau para pengusaha karena beberapa alasan. Pertama, pemilik usaha tidak perlu berurusan dengan para pekerja atau buruh, tetapi cukup dengan beberapa pemilik usaha yang lebih kecil yang menjadi mitra usaha; kedua, pihak perusahaan tidak perlu menyediakan tempat bekerja yang luas untuk para pekerjanya; ketiga, pihak perusahaan tidak perlu mematuhi kewajiban hukum perburuhan yang mewajibkan membayar buruh sesuai dengan upah minimum, dan berbagai jaminan sosial yang menjadi hak buruh; keempat, sistem borongan atau "*sub-contracting*" bisa mempercepat proses produksi karena perusahaan-perusahaan kecil yang diberi pekerjaan borongan – dalam kondisi ekonomi Indonesia yang selalu berkelebihan tenaga kerja (*labor surplus economy*) – harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan "order borongan" dari pengusaha yang melakukan "*sub-contracting*"; kelima, dan ini khusus terjadi di Pekalongan, dengan memborongkan proses produksi ke berbagai mitra kerja, secara tidak langsung pengusaha batik menghindari persoalan pembuangan limbah batik – yang semakin menjadi masalah bagi lingkungan hidup di Kota Pekalongan yang sangat padat penduduknya.

4.5 Penutup

Pekalongan dan Jepara adalah dua kota di pantai utara Jawa Tengah. Sebagai kota pelabuhan masyarakat Pekalongan dan Jepara memiliki tingkat pluralitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Jawa yang bersifat pedalaman. Masyarakat Pekalongan dan Jepara merupakan masyarakat Jawa-Muslim yang menjadi basis

organisasi-organisasi Islam, baik yang bersifat sosial maupun politik. Industri kreatif yang berkembang di Pekalongan dan Jepara, yaitu batik dan mebel-kayu, merupakan bagian dari tradisi kesenian Jawa, yang telah mengalami transformasi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan masyarakat. Pasang surut industri batik dan mebel-kayu mencerminkan interaksi antara tradisi mempertahankan warisan kesenian antargenerasi di satu pihak, dan lingkungan ekonomi nasional maupun global yang menentukan pasar dan ketersediaan bahan yang dalam diperlukan dalam proses produksi, di pihak lain. Peran negara sangat penting baik sebagai pemberi proteksi, pengatur lalu lintas ketersediaan bahan maupun sebagai pencipta kebijakan nasional yang memiliki imbas terhadap kegiatan ekonomi lokal.

Jika batik pasarnya lebih bersifat lokal, mebel-kayu tidak saja lokal tetapi global. Peran pasar sangat besar dalam menunjang produk kebudayaan di mana ruang tempat komoditas itu diproduksi bersifat "*place specific*", seperti halnya Pekalongan dan Jepara. Batik dan mebel-kayu yang pada awalnya merupakan bagian dari tradisi berkesenian dari sebuah masyarakat dalam lokalitas tertentu, dalam kasus ini Pekalongan dan Jepara, mengalami transformasi seiring dengan meningkatnya permintaan akan batik dan mebel-kayu sebagai komoditas dalam transaksi ekonomi yang bersifat kapitalistik. Kapitalisme sebagai kekuatan yang mendasari perkembangan dari industri batik dan mebel-kayu sebagai komoditas ekonomi tidak mengenal batas-batas negara. Ketika krisis keuangan yang ditandai oleh melemahnya nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar melanda negara-negara Asia, Indonesia ikut merasakan akibatnya. Pengusaha mebel-kayu Jepara yang produknya telah menjadi komoditas global dalam waktu cepat mereguk keuntungan yang luar biasa besar karena melejitnya nilai tukar mata uang dolar terhadap mata uang rupiah. Banjir uang segera melanda Jepara, orang Jepara, terutama para pengusahanya menjadi kaya mendadak. Keadaan yang berbeda dialami oleh pengusaha dan masyarakat Pekalongan karena krisis

ekonomi justru meningkatkan ongkos produksi berhubung sebagian dari bahan baku batik harus diimpor.

Pengusaha dan buruh merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur industri, khususnya dalam proses produksi bagi keberlangsungan industri kreatif seperti batik dan mebel-kayu. Pola pemilikan modal dan sistem manajemen yang masih bertumpu pada keluarga dan struktur wirausaha kecil (*small scale entrepreneur*) menjadikan hubungan antara pemilik dan buruh dalam industri batik dan mebel-kayu bersifat “kekeluargaan”, “*negotiable*” dan cenderung bersifat “*patron-client relationship*”. Dalam hubungan seperti ini buruh tidak memiliki posisi tawar, dan nasibnya sepenuhnya tergantung pada pemilik atau pengusaha industri di mana mereka bekerja. Sistem kerja borongan atau “*sub-contracting*” yang menjadi pilihan pengusaha karena sangat menguntungkan pihak perusahaan sangat merugikan buruh. Posisi tawar yang lemah dan ketergantungan yang tinggi kepada pengusaha mempengaruhi rendahnya kesadaran buruh untuk berorganisasi. Negara – dalam hal ini pemerintah daerah – juga memiliki ketergantungan secara politik dan ekonomi terhadap kelompok pengusaha, karena organisasi sosial maupun partai politik dikuasai oleh para pengusaha Jawa-Muslim. Oleh karena itu, sulit untuk dibantah bahwa buruh industri batik di Pekalongan dan mebel kayu di Jepara – sebagai bagian dari mayoritas warga kota – merupakan kelompok penduduk yang paling tereksplotasi secara ekonomi dan termarginalisasi secara politik di Pekalongan dan Jepara.

BAB V

KONSTRUKSI IDENTITAS MASYARAKAT ARAB DI PEKALONGAN DAN JEPARA: SIGNIFIKANSINYA TERHADAP INDUSTRI KREATIF¹²³

5.1 Pengantar

Mendengar Pantura untuk menyebut Pantai Utara Pulau Jawa, mengingatkan pada berbagai potensi yang ada di wilayah ini yang membawanya pada berbagai kejayaan. Sejak masa lalu, Pantura sangat dikenal sebagai pusat-pusat bandar. Kota-kota yang terbujur sepanjang Pantura hampir semuanya memiliki potensi sebagai pelabuhan dan juga pusat perdagangan dari berbagai hasil bumi yang ada di Jawa. Potensi ekonomi inilah yang kemudian mendorong orang-orang asing, baik Eropa maupun Asia, untuk ikut dalam geliat kegiatan ekonomi yang ada di wilayah Pantura.

Pada masa kolonial, keberadaan orang asing dan pribumi diatur dengan sangat ketat oleh penguasa kolonial. Untuk melakukan pembedaan, pemerintah kolonial kemudian melakukan segregasi ras. Yang pertama adalah ras Eropa yang diisi oleh orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Ras kedua diberikan kepada orang-orang yang dikategorikan dalam kelompok Timur Asing. Yang berada dalam kelompok ini adalah orang-orang Cina dan orang-orang Arab beserta keturunannya. Sementara itu, ras terakhir yang biasanya dianggap paling rendah adalah kelompok masyarakat pribumi.

Pembagian ras ini sekaligus menandai adanya perbedaan terhadap masing-masing kelompok, khususnya dalam hal pemerintahan dan tata kota. Wilayah-wilayah yang banyak dihuni

¹²³ Ditulis oleh Aulia Hadi

oleh bangsa Belanda maupun bangsa Eropa lainnya umumnya dibangun sebagai sebuah ‘kota kolonial’. ‘Kota kolonial’ ini lebih banyak difungsikan sebagai pusat-pusat pemerintahan Belanda dan jumlahnya terbatas. Secara umum, ‘kota kolonial’ memiliki persamaan, yaitu terbagi menjadi dua bagian utama (Adji, 2008). Kedua bagian tersebut adalah bagian yang berasal dari penduduk atau budaya lokal dan bagian yang merupakan hasil cipta karya atau budaya dari pendatang atau orang asing. Menurut Adji, arah pembangunan dari ‘kota kolonial’ umumnya ditujukan untuk membangun pemukiman Belanda yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor dagang, pelabuhan, stasiun kereta api, jaringan jalan baru, kanal-kanal, drainase, stadion olah raga, taman-taman kota, sekolah, dan rumah sakit. Fungsi kota seperti disebutkan Adji, meluas tidak hanya mencakup sector pemerintahan, militer, dan perdagangan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. ‘Kota kolonial’ yang ada saat ini masih menyimpan jejak-jejak pembangunan tersebut. Keberadaan ‘kota kolonial’ di Belanda tersebar, seperti Bandung, Bogor, dan beberapa di antaranya bahkan terdapat di jalur Pantura, seperti Serang, Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya. Sebagai ras yang dianggap ‘paling agung’, orang-orang Eropa menikmati fasilitas terbaik yang dibangun di pusat-pusat ‘kota kolonial’ tersebut. Selain itu, pemerintah kolonial juga membangun pemukiman khusus bagi kelompok Timur Asing yang ada di pinggiran kota yang memiliki akses langsung ke pusat kota di mana kelas Eropa berada. Pemukiman bagi orang-orang Cina umumnya disebut sebagai kawasan Pecinan, sedangkan pemukiman bagi orang-orang Arab biasa disebut sebagai kampung Arab atau Pekojan.¹²⁴

¹²⁴ Kampung Pekojan berasal dari kata Al-Koja. Sesuai dengan asal katanya, kampung ini pada awalnya dibuka oleh orang-orang India. Namun, dalam perkembangannya kampung ini lebih banyak didatangi dan dijadikan tempat hunian orang-orang Arab dan keturunannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kampung Pekojan kini sangat identik dengan kampung Arab.

Meskipun pemukiman orang-orang Cina dan Arab dipisahkan, keberadaan kedua pemukiman ini dapat dipastikan selalu berdampingan. Hal ini tentunya sekaligus menjadi penanda keberadaan kedua kelompok masyarakat tersebut dalam kelompok yang sama. Selain itu, pemerintah kolonial juga memilih pemimpin bagi tiap kampung tersebut yang berasal dari anggota kelompok masyarakatnya sendiri untuk memudahkan pengawasan. Sementara itu, kelompok masyarakat pribumi sebagai ras terendah dapat dipastikan tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang nyaman dalam kota. Pemukiman kelompok masyarakat pribumi cenderung tersebar di luar kota dan hampir dapat dipastikan sangat sulit bagi mereka untuk dapat menghuni kawasan Pecinan maupun Kampung Arab, terlebih pemukiman Eropa.

Kini, zaman sudah berganti. Masa kolonialisme Belanda telah berakhir dengan dikumandangkannya Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Meskipun masa kolonialisme sudah berlalu, jejak-jejak diskriminasi ras oleh Belanda, baik secara fisik maupun nonfisik, masih membekas. Setelah Indonesia menyatakan kedaulatannya (1945) hingga Belanda mengakui kedaulatan tersebut (1949), bangsa Belanda maupun Eropa lainnya secara berangsur-angsur meninggalkan Indonesia. Sebagai konsekuensinya, orang-orang Eropa ini meninggalkan “ruang-ruang” yang dulu mereka sebut sebagai “pusat-pusat kota” di Pantura. Yang tersisa kini hanyalah kelompok yang dulu disebut sebagai kelompok Timur Asing dan kelompok masyarakat pribumi. Selain “ruang-ruang” kosong, jejak lain yang membekas adalah sistem pembagian ras yang diberlakukan oleh Belanda terhadap kelompok Timur Asing dan kelompok masyarakat pribumi. Jika demikian kondisinya, adakah pertarungan dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut dalam memperebutkan “ruang-ruang” dalam kota yang telah ditinggalkan tersebut? Apakah kelompok Timur Asing yang pada masa sebelumnya menikmati fasilitas yang sedikit lebih baik dari kelompok masyarakat pribumi cenderung mendominasi?

Diskusi tentang “penguasa kota” masa kini memang banyak diperbincangkan. Diskusi tentang hal tersebut bertambah menarik ketika membicarakan keberadaan kelompok masyarakat Arab sebagai salah satu kelompok Timur Asing dalam pengisian “ruang-ruang” kota yang kosong dan ditinggalkan. Kajian tentang kelompok masyarakat Arab diharapkan dapat menggambarkan konstruksi identitas dari kelompok masyarakat Arab di Indonesia, khususnya Pantura, yang bermula dari pendatang hingga menjadi warga Indonesia. Selain itu, berbeda dengan kelompok masyarakat Cina, ada bagian identitas dari kelompok masyarakat Arab yang memiliki kesamaan dengan kelompok masyarakat pribumi, yaitu identitas sebagai “Muslim” yang membuat hubungan keduanya lebih “cair”.

Penggalian dan pengidentifikasian diri menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sebuah kelompok masyarakat. Melalui proses tersebut, sebuah kelompok masyarakat dapat mengetahui identitasnya dan posisinya dalam hidup bermasyarakat. Seperti dikatakan oleh Thung, dkk (2004: 10), “*Identity (ethnic identity) is a way by which a group of people is able to differentiate themselves from other groups*”. Brass dengan mengutip De Vos menguatkan bahwa “*Ethnic identity consists of the ‘subjective, symbolic, and emblematic use’ ... of any aspects of culture*” (dalam Thung, dkk, 2004: 10). Brass menambahkan bahwa “*The (ethnic) group that uses cultural symbols in this way is a subjectively and self-conscious community that establishes criteria for inclusion into and exclusion from the group... and also involves a claim to status and recognition, either as a superior group or as a group at least equal to other group* (dalam Thung, dkk, 2004: 10). Dengan mengutip Li, Rudyansjah (2009: 243) menambahkan bahwa identitas adalah satu artikulasi dari upaya memposisikan diri dengan mempertimbangkan peluang-peluang yang dimiliki para pelaku yang terlibat dalam suatu arena tertentu. Artinya, konstruksi identitas akan selalu terkait dengan relasi kekuasaan. Dengan demikian, identitas dalam kelompok masyarakat mencakup berbagai dimensi, baik kesamaan (*similarity*), perbedaan (*difference*), dan juga relasi kekuasaan (*power relation*).

Seperti yang sudah disebutkan, kajian tentang kelompok masyarakat Arab sangat menarik untuk dilakukan. Kelompok masyarakat Arab yang umumnya beridentitas sebagai “pendatang dari kelompok Timur Asing,” “Muslim,” dan “pedagang” ini diyakini memiliki peran yang sangat signifikan bagi perkembangan kota-kota di Pantura. Hasil penelitian sebelumnya di Cirebon dan Gresik yang juga masuk dalam wilayah Pantura menunjukkan bahwa kelompok masyarakat Arab memiliki peran yang sangat berarti dalam proses transformasi sosial (Patji, 2009).¹²⁵ Peran tersebut mencakup pembentuk lingkungan fisik dan sosial, peletak dasar pendidikan, serta pelaku ekonomi yang ulet.

Keberadaan kelompok masyarakat Arab sebagai “pendatang” memang hampir selalu mengalami pergelutan identitas. Salah satunya terjadi pada awal abad ke-20. Pada masa ini, keberhasilan gerakan ‘Pan Islam’ memunculkan semangat bagi kelompok masyarakat Arab di Indonesia untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari gerakan tersebut. Selain itu, kelompok masyarakat Arab lebih merasakan keberadaan Hadramaut (sekarang Yaman Selatan) sebagai tanah airnya. Namun demikian, pada masa-masa tersebut muncul pula gerakan nasionalisme Indonesia. Hal ini menyadarkan keberadaan Indonesia sebagai tanah air dari seluruh warga di dalamnya, termasuk kelompok masyarakat Arab. Guncangan identitas semacam ini sangat dirasakan, khususnya oleh kelompok masyarakat Arab yang dilahirkan di Indonesia (*muwallad*).¹²⁶ Dalam tulisan ini akan dibahas

¹²⁵ Hasil penelitian lengkap tentang hal ini dapat dibaca pada Patji, Abdul Rachman. 2009. “Peranan Masyarakat Arab Hadrami di Pantai Utara Jawa dalam Transformasi Sosial (Studi Perbandingan Dua Kota: Cirebon, Jawa Barat dan Gresik, Jawa Timur)”. dalam Riwanto Tirtosudarmo (Ed). *Transformasi Sosial di Perkotaan Pantai Utara Jawa: Studi Perbandingan Cirebon dan Gresik*. Draft laporan yang segera diterbitkan.

¹²⁶ Uraian lebih lengkap tentang hal ini dapat dibaca pada Keshah, Natalie Mobini. Tanpa Tahun. *Hadrami Awakening*. Diterjemahkan oleh Ita Mutiara dan Andri. 2007. *Hadrami Awakening: Kebangkitan Hadhrami*

tentang konstruksi identitas dari kelompok masyarakat Arab. Bagaimana kelompok masyarakat Arab menciptakan pesan melalui diskursus-diskursusnya? Bagaimana pesan tersebut mengonstruksi identitas kelompok masyarakat Arab dalam sebuah ruang yang bernama ‘kota’? Bagaimana kelompok masyarakat Arab menyikapi ‘ruang-ruang’ yang ada dalam kota dan mengambil peran dalam proses transformasi sosial kotanya? Kota yang ... hendak diperbandingkan di sini adalah Pekalongan dan Jepara sebagai pusat industri kreatif di Pantura bagian tengah. Pekalongan sangat terkenal dengan batiknya, sedangkan Jepara sangat populer dengan kerajinan ukirnya. Kepopuleran industri bahkan menjadi label bagi kedua kota, yaitu Pekalongan sebagai ‘Kota Batik’ dan Jepara sebagai ‘Kota Ukir’. Tulisan ini sekaligus ingin mendeskripsikan bagaimana kelompok masyarakat Arab yang terkenal sebagai “saudagar yang piawai berdagang” mengambil posisi dalam industri kreatif tersebut?

5.2 “Kampung Arab”: Sebuah “Ruang Sosial” di Kota Pekalongan

Pekalongan menjadi salah satu jejak ‘kota kolonial’ di Pantura. Pekalongan merupakan sebuah wilayah di Pantura bagian tengah yang sangat strategis untuk dijadikan pelabuhan sekaligus tempat berdagang karena daerah ini memiliki hasil alam yang sangat berlimpah. Seperti disebutkan oleh Suryo (dalam Margana, 2009: 121), Pekalongan semakin meningkat posisinya di Pantura di bawah pemerintahan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) (abad ke-18) dan pemerintah kolonial Belanda (abad ke-19). Pada masa-masa tersebut, Kota Pekalongan meningkat menjadi ‘kota pelabuhan’ dan ‘kota perdagangan’ bagi komoditi ekspor di wilayah Pekalongan, seperti beras, gula, dan nila (Suryo dalam Margana, 2009: 121, tanda kutip ditambahkan). Keramaian kota ini terus meningkat seiring dengan diberlakukannya sistem tanam paksa yang berdampak pada

di Indonesia. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, khususnya pada bab VI dan bab VII.

berdirinya perkebunan tebu, indigo,¹²⁷ dan kopi di wilayah ini. Pada masa itu, iklim usaha berkembang pesat sehingga memunculkan kaum saudagar maupun pengusaha, baik orang pribumi, Cina, Arab, dan Eropa yang bersama-sama menghuni 'Kota Kolonial Pekalongan' (Suryo dalam Margana, 2009: 122, tanda kutip ditambahkan). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sekat-sekat pemukiman yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, termasuk Kampung Arab, masih dapat ditemukan di Pekalongan hingga kini.

Berbagai sumber menunjukkan perbedaan tentang kedatangan kelompok masyarakat Arab di Indonesia. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, setidaknya ditemukan tiga versi periode kedatangan kelompok masyarakat Arab di Nusantara. Versi *pertama* menyebutkan bahwa kedatangan kelompok masyarakat Arab di Nusantara dimulai pada abad ke-4 (Astuti, 2002: 71). Rute pelayarannya bergerak dari Hadramaut ke Gujarat melewati pantai India bagian barat hingga berlabuh di Sumatra. Hal ini dibuktikan dengan puncak perdagangan antara Arab dengan Asia Tenggara pada zaman Sriwijaya (Astuti, 2002: 71). Sumber *kedua* mengatakan bahwa kedatangan kelompok masyarakat Arab di Nusantara terjadi pada akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14. Assegaf (dalam Patji, 2009) menyebutkan bahwa hal ini didasarkan pada cerita tentang Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang diyakini merupakan kakek dari beberapa wali di Jawa, yaitu Sunan Gresik (Gresik), Sunan Giri (Gresik), Sunan Ampel (Surabaya), dan Sunan Gunung Jati (Cirebon). Sayyid Al-Husaini datang dari Aceh melalui Pajajaran sampai ke Majapahit atas undangan Raja Prabu Wijaya (1293-1309). Setelah bertemu raja Majapahit, Sayyid Al-Husaini kemudian berangkat ke pantai Bojo Nepo (sekarang ada di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan) dan meneruskan perjalanan hingga Tosora

¹²⁷ Indigo adalah tanaman-tanaman yang termasuk dalam genus *Indigofera*. Di Indonesia, tanaman ini akrab dikenal dengan nama nila. Tanaman ini umumnya diekstrak untuk kemudian digunakan sebagai bahan pewarna. Pewarna ini tentunya sangat bermanfaat bagi proses pewarnaan dalam batik.

(sekarang Kabupaten Wajo). Di Tosora inilah kemudian Sayyid Al-Husaini wafat pada tahun 1320. Sementara itu, versi *ketiga* menyebutkan apabila kedatangan kelompok masyarakat Arab di Nusantara, khususnya di pulau Jawa, terjadi sekitar abad ke-17 dan terus berlanjut dalam jumlah besar pada abad ke-18 (Patji, 2009). Pada akhir abad ke-18, arus migrasi membawa warga Arab Hadrami sampai ke pulau-pulau di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang jumlah kelompok masyarakat Arabnya sudah mencapai 80.000 orang (Kesheh, 2007: 2).

Di Pekalongan sendiri, kedatangan kelompok masyarakat Arab diperkirakan terjadi pada akhir abad ke-18. Hal ini ditandai oleh kedatangan orang Arab Hadrami pertama di Pekalongan, yaitu Habib Husein Alatas pada tahun 1800-an (Astuti, 2002: 84-85). Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dari generasi kelompok masyarakat Arab Hadrami yang ada saat ini. Generasi Arab Hadrami yang saat ini ada di Pekalongan rata-rata merupakan generasi ketiga dan keempat.¹²⁸ Jika setiap generasi diperkirakan berlangsung selama lebih kurang 55 tahun, maka generasi kelompok masyarakat Arab di Pekalongan sudah berlangsung lebih kurang 220 tahun. Artinya, kemungkinan besar kedatangan kelompok masyarakat Arab di Pekalongan memang dimulai pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19.

Hingga kini, sangat sulit ditemukan data tentang jumlah akurat dari orang Arab yang ada di Kota Pekalongan. Beberapa informan menyebutkan bahwa jumlah orang Arab di Pekalongan kemungkinan mencapai 10% dari total jumlah penduduk di Kota Pekalongan.¹²⁹ Jumlah penduduk Kota Pekalongan sendiri mencapai 273.991 orang (Bappeda dan BPS Kota Pekalongan, 2009: 35). Dari

¹²⁸ Hasil wawancara dengan berbagai sumber, baik dari kelompok masyarakat Arab, kelompok pribumi, dan birokrat yang diadakan selama penelitian lapangan di Pekalongan pada 17 s.d. 25 Juni 2010.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan berbagai sumber, baik dari kelompok masyarakat Arab, kelompok pribumi, dan birokrat yang diadakan selama penelitian lapangan di Pekalongan pada 17 s.d. 25 Juni 2010.

persentase tersebut, mayoritas (8%) diperkirakan berdiam di kampung Arab. Jika jumlah kelompok masyarakat Arab di Pekalongan cukup banyak, lantas bagaimana dengan pengelompokan internal dalam kelompok masyarakat tersebut? Di negara asalnya, Hadramaut, stratifikasi dalam masyarakat Arab dibagi dalam empat golongan. Secara berurutan, empat golongan tersebut dari yang tertinggi ke yang terendah adalah (1) *sayyid*, golongan tertinggi yang merupakan kelompok elit sosial dan religius yang mengklaim sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad saw. melalui cucunya Husain; (2) *masha'ikh* (sarjana) dan *qaba'il* (anggota suku); (3) *masakin* (orang miskin atau tidak bekerja) dan *dhu'afa* (tidak mampu); serta (4) budak (Kesheh, 2007: 21-23). Di Pekalongan seperti halnya yang banyak terjadi di Kampung Arab lain yang ada di Indonesia dan Pantura khususnya, kelompok masyarakat Arab ini hanya terbagi dalam dua golongan, yaitu (1) golongan *sayyid* dan (2) *nonsayyid*. Hanya dua kelompok tersebut yang ada karena mayoritas kelompok masyarakat Arab yang datang ke Pekalongan adalah orang-orang yang tergolong kaya. Status ekonomi kelompok masyarakat Arab Pekalongan yang rata-rata kaya, salah satunya disebutkan oleh van den Berg dan Steenbrink (dalam Astuti, 2002: 87). Nama keluarga dari kelompok masyarakat Arab di Pekalongan ini masih mengacu pada nama-nama keluarga yang ada di negeri asalnya.

Keberadaan golongan *sayyid* dan *nonsayyid* di Pekalongan memang terlihat perbedaannya. Kehadiran pertama kali golongan *sayyid* yang biasa juga disebut sebagai golongan *habib* atau *alawiyyin* di Pekalongan ditandai dengan kehadiran Habib Husein Alatas pada tahun 1800-an seperti yang sudah disebutkan. Hingga kini, warga Pekalongan memberikan penghormatan yang tinggi untuk *habib* karena dianggap sangat berjasa dalam penyebaran Islam. Salah satunya yang sangat terkenal sampai saat ini adalah Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas. Meskipun sudah wafat bertahun-tahun yang lalu, Habib Ahmad masih sangat dihormati. Makam Habib Ahmad yang terdapat di Pemakaman Sapuro, Pekalongan Barat

banyak dikunjungi oleh masyarakat, terutama pada saat *haul*.¹³⁰ Sebagai penerusnya, di Kota Pekalongan kini dapat dijumpai Habib Abdullah Baqir bin Ahmad bin Ali Alatas yang merupakan cucu dari Habib Ahmad. Tradisi keagamaan para *habib* yang cenderung sama dengan tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama (NU) membuat kebanyakan dari mereka berafiliasi dengan NU. Salah satunya adalah Habib Lutfi bin Yahya yang menjadi Ketua Jam'iyah Ahlith ath-Thariqah al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah, perkumpulan tarekat di bawah NU.¹³¹ Sementara itu, kehadiran golongan *nonsayyid* di Pekalongan ditandai dengan keberadaan Al-Irsyad.¹³²

¹³⁰ *Haul* merupakan acara ritual keagamaan yang umum diadakan oleh golongan *sayyid* untuk memperingati hari wafat dari seseorang yang sangat ditokohkan.

¹³¹ *Tarekat* pada intinya adalah beribadah dengan jalan *berzikir* atau mengingat kepada Sang Pencipta. Tujuan dari *zikir* dalam *tarekat* ini adalah untuk menyucikan hati dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan (Murod, 2010: 87).

¹³² Pada awalnya, di Indonesia hanya ada satu organisasi modern yang didirikan oleh kelompok masyarakat Arab. Organisasi itu bernama Jamiat Khair yang didirikan pada 17 Juni 1905. Pemimpin organisasi pada awalnya memang lebih banyak didominasi oleh golongan *sayyid*, tetapi dalam perkembangannya golongan *nonsayyid* juga ikut berperan di dalamnya. Perpecahan terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat di antara kedua golongan tersebut mengenai masalah kesetaraan (*kafaah*) dalam perkawinan. Kedua golongan tersebut memperdebatkan status sah atau tidaknya sebuah perkawinan jika mempelai laki-laki dan perempuan memiliki status sosial yang berbeda. Hal inilah yang kemudian memicu perpecahan di antara kedua golongan tersebut sehingga golongan *nonsayyid* dengan tokohnya, Ahmad bin Muhammad Surkati, mendirikan organisasi sendiri yang diberi nama Al-Irsyad pada 6 September 1914. Baca Van den Berg, L.W.C. Tanpa Tahun. *Le Hadhramout et les Colonies Arabes dans l'Archipel Indien*. Diterjemahkan oleh Rahayu Hidayat. 1989. Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara. Jakarta: INIS dan Kesheh (2007).

Lokasi kampung Arab berada di pusat Kota Pekalongan. Pemukiman masyarakat Arab ini dapat dijumpai di beberapa jalan di sebelah utara alun-alun Kota Pekalongan, seperti jalan Bandung, jalan Surabaya, jalan Semarang, jalan Agus Salim, jalan Teratai, dan jalan Seruni. Secara administratif, kampung Arab ini terletak di wilayah tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sugihwaras, Kelurahan Klego, dan Kelurahan Poncol. Ketiga kelurahan tersebut berada di wilayah administratif Kecamatan Pekalongan Timur. Tiga tanda fisik dapat dijadikan sebagai bukti yang menguatkan keberadaan wilayah ini sebagai kampung Arab. *Pertama* adalah keberadaan Masjid Wakaf di jalan Surabaya, Kelurahan Sugihwaras. Masjid ini dibangun oleh Habib Husein Alatas pada tahun 1800-an. Seperti disebutkan sebelumnya, Habib Husein Alatas merupakan orang Arab asli Hadramaut yang pertama kali datang ke wilayah Pekalongan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika arsitektur masjid ini sangat dipengaruhi arsitektur Arab (Astuti, 2002: 84-85). Melalui masjid tersebut, lingkungan sosial di sekitar kampung Arab ini mulai dibentuk. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi sebuah ruang bertemu dan berinteraksinya masyarakat.

Kedua adalah mayoritas arsitektur rumah dari kelompok masyarakat Arab yang bergaya kolonial. Tipe ini memang sudah dikenal oleh kelompok masyarakat Arab Pekalongan pada masa itu. Seperti disebutkan sebelumnya, rata-rata status ekonomi dari kelompok masyarakat Arab di Pekalongan tergolong kaya (van den Berg dan Steenbrink dalam Astuti, 2002: 87). Oleh karena itu, mereka berkemampuan untuk memiliki rumah-rumah bergaya kolonial. Bahkan, seperti disebutkan Astuti (2002: 87), halaman rumah mereka juga relatif luas. Teknik dan bahan material yang berkualitas membuat rumah-rumah bergaya kolonial itu masih menghiasi kampung Arab Pekalongan hingga kini (Astuti, 2002: 87).

Ketiga adalah berdirinya bangunan-bangunan yang berafiliasi pada Al-Irsyad. Kendati tidak dapat disebut sebagai organisasi massa (ormas) milik kelompok masyarakat Arab, pendirian dan pengelolaan Al-Irsyad oleh mayoritas kelompok masyarakat Arab *nonsayyid* yang

menamakan dirinya Irsyadi menjadi penanda kedekatan ormas ini dengan kelompok masyarakat Arab. Berangkat dari kesuksesan perguruan Al-Irsyad Jakarta (1914), perguruan Al-Irsyad cabang Pekalongan ini didirikan pada tahun 1917 (Kesheh, 2007: 81). Kini, bangunan-bangunan Al-Irsyad di Kota Pekalongan cukup banyak dan semuanya memang terdapat di kampung Arab. Bangunan-bangunan tersebut adalah gedung-gedung sekolah yang mencakup Kelompok Bermain (KB) di jalan Teratai, Taman Kanak-kanak (TK) di jalan Teratai, Sekolah Dasar (SD) di jalan Bandung, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di jalan Teratai, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di jalan Seruni, serta Rumah Sakit (RS) Siti Khodijah di jalan Bandung.

Paparan di atas menggambarkan cara kelompok masyarakat Arab dalam membentuk ruang sosialnya. Terlepas dari sistem sosial politik yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda, pembangunan Masjid Wakaf serta pemukiman oleh habib dan saudagar-saudagar kaya dari kelompok masyarakat Arab menunjukkan cara mereka dalam membentuk sebuah ruang sosial yang dapat dikatakan “eksklusif”. Dikatakan demikian karena kampung Arab lebih banyak dihuni oleh kelompok masyarakat Arab. Di samping alasan ekonomi, sistem pemukiman berdasarkan kedekatan keluarga atau garis keturunan tampaknya juga menjadi penghalang bagi kelompok masyarakat pribumi untuk menjadi penghuni Kampung Arab ini. Selain itu, sistem perkawinan yang menuntut *kafaah* ditengarai juga menjadi penyebab kurang bercampurnya kelompok masyarakat Arab dengan kelompok masyarakat pribumi.¹³³

¹³³ Mayoritas orang Arab Hadrami yang pertama kali datang ke Nusantara adalah laki-laki lajang karena sangat tabu bagi perempuan untuk meninggalkan Hadramaut (Kesheh, 2007: 17). Sebagai konsekuensinya, banyak terjadi perkawinan campur antara orang Arab Hadrami dengan masyarakat lokal. Namun demikian, untuk mempertahankan garis keturunan Arabnya, justru para ibu yang merupakan orang lokal inilah yang meminta anak-anaknya untuk mengawini perempuan-perempuan lajang yang memiliki garis keturunan Arab. Hal ini juga diakui oleh

5.3 Kelompok Masyarakat Arab Pekalongan: Sebuah Catatan Sejarah dan Perkembangan Ekonomi

Keberadaan kelompok masyarakat Arab di Indonesia sebagai pendatang tentunya memiliki konsekuensi terhadap kekuatan mereka dalam bertahan hidup di Nusantara. Pendatang umumnya memiliki daya tahan hidup yang lebih tangguh dibanding dengan penduduk lokal. Hal ini tampaknya juga terjadi pada kelompok masyarakat Arab yang ada di Kota Pekalongan. Dalam konteks kehidupan ekonomi, yang lebih menguntungkan kelompok masyarakat Arab adalah status ekonomi mereka yang rata-rata kaya serta sistem sosial politik pemerintah kolonial yang menempatkan mereka setingkat di atas kelompok pribumi.

Sejak kedatangannya di Nusantara, profesi yang dijalani oleh kelompok masyarakat Arab sangat beragam. Pekerjaan yang mereka jalani memang lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan ekonomi, tetapi tidak berarti bahwa mereka tidak menjalani pekerjaan di bidang-bidang lain. Seperti disebutkan Kesheh (2007: 15), pada awalnya hampir semua pendatang dari Hadramaut bekerja dan berkembang melalui usaha perdagangan. Van den Berg bahkan memaparkan bahwa pada abad ke-19, pola perdagangan kelompok masyarakat Arab sangat khas di mana pendatang Arab baru di Indonesia akan bekerja sebagai asisten toko atau pedagang kecil atas nama sanak keluarga atau kenalan yang telah lebih dulu menjadi penduduk di Indonesia (dalam Kesheh, 2007: 15). Komoditas dagangan mereka umumnya adalah barang-barang khas Timur Tengah, seperti kurma, serta barang-barang khas Islam, seperti sajadah dan kitab-kitab Islam. Menurut Kesheh (2007: 16), komoditas

beberapa keturunan Arab Hadrami yang menjadi sumber wawancara dalam penelitian lapangan di Pekalongan pada 17 s.d. 25 Juni 2010. Jadi, bukan hanya perbedaan status antara *sayyid* dan *nonsayyid* yang menjadi penghalang terjadinya sebuah perkawinan, melainkan juga perbedaan garis keturunan antara kelompok masyarakat Arab dengan kelompok masyarakat pribumi.

utama dari kelompok masyarakat Arab sebenarnya adalah tekstil. Status kaya dan kelas menengah yang diberikan pemerintah kolonial sangat memudahkan kelompok masyarakat Arab dalam berdagang. Kebanyakan dari mereka membeli barang impor dari orang-orang Eropa dan kemudian bertindak sebagai pedagang perantara antara Eropa dengan pribumi maupun pedagang pengecer ke konsumen akhir (Kesheh, 2007: 16). Selain berdagang, beberapa orang Arab di Indonesia lebih memfokuskan diri pada pendidikan Islam. Kondisi ini semakin menguat di abad ke-20 dengan munculnya sekolah-sekolah Islam modern yang didirikan kelompok masyarakat Arab di Indonesia, seperti Jamiat Khair dan Al-Irsyad. Selain dua pekerjaan tersebut, sedikit dari kelompok masyarakat Arab juga dikenal sebagai rentenir dan tuan tanah (Kesheh, 2007: 16). Perubahan ekonomi terus berlangsung seiring dengan pembangunan yang terjadi di negeri ini. Sampai saat ini, hanya dua pekerjaan yang lebih banyak digeluti oleh kelompok masyarakat Arab di Indonesia, yaitu pedagang dan pendidik (pengajar).

Pekerjaan dari kelompok masyarakat Arab di Pekalongan mengikuti tipe pekerjaan mayoritas dari kelompok masyarakat Arab, yaitu berdagang. Seperti disebutkan van den Berg (dalam Patji, 2009) sangat jarang kelompok masyarakat Arab yang tidak meminati perdagangan. Komoditas pertama dan utama yang diperdagangkan oleh kelompok masyarakat Arab di Pekalongan adalah tekstil, komoditas utama yang memang kebanyakan diperdagangkan oleh kelompok masyarakat Arab di Indonesia. Tekstil yang diperjualbelikan di Pekalongan sepertinya didatangkan dari India. Seperti tercatat dalam sejarah, India menjadi pusat pasar tekstil Asia hingga pasar tersebut mengalami kemunduran pada tahun 1800-an (Hayati, 2009: 141). Seperti disebutkan oleh Astuti (2002: 83), perdagangan tekstil ini sangat marak di Kampung Arab, tepatnya di kawasan yang kini bernama jalan Surabaya. Jual beli tekstil di kampung Arab ini berlangsung dari pagi hingga petang (menjelang azan maghrib). Dalam perdagangan tekstil ini, pedagang Arab memainkan peran sebagai pedagang perantara. Pedagang Arab

menjual tekstil dalam partai yang tidak terlalu besar kepada pedagang-pedagang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Lampung, Medan, Banjarmasin, Makassar, Gorontalo, Bali, serta Indonesia bagian timur (Astuti, 2002: 83). Pada masa ini kampung Arab sempat sangat dikenal sebagai pasar mori terbesar.

Jenis usaha kedua yang juga digeluti oleh kelompok masyarakat Arab di Pekalongan adalah batik. Seperti diketahui, batik memang menjadi ciri khas dari Kota Pekalongan. Batik mampu menjadi ciri khas dan andalan produksi utama dari Pekalongan karena sudah berkembang dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Kota Pekalongan sejak abad ke-18, setelah perdagangan tekstil mengalami penurunan. Seperti disebutkan Ilyas (2008: 266), catatan paling awal tentang penjualan batik di Pekalongan ditemukan pada tahun 1740-1750 dengan rata-rata penjualan mencapai 20.000 rial Spanyol. Sementara itu, keberadaan Pekalongan sendiri sebagai pusat batik terkemuka terjadi pada tahun 1850 (Hayati, 2009: 145). Pada awalnya, usaha batik di Pekalongan lebih banyak ditekuni oleh pengusaha-pengusaha perempuan Eropa (Hayati, 2009: 145-146).¹³⁴ Tidak hanya orang-orang Eropa, usaha batik di Pekalongan ini dalam perkembangannya juga ditekuni kelompok masyarakat Arab. Kelompok masyarakat Arab di Pekalongan tidak hanya menjual hasil produksi batik, tetapi juga menyediakan modal bagi para pengrajin batik. Orang-orang Arab di Pekalongan biasanya memberikan kain putih dan keperluan lain kepada para pembatik dengan syarat kain yang sudah dibatik dijual kepada mereka (Hayati, 2009: 145). Hal ini terus berlangsung hingga industri batik menjadi industri rakyat pada tahun 1910 (Hayati, 2009: 147). Mengutip Boersma, Hayati (2009: 147) menyebutkan bahwa hingga masa ini grosir dan pedagang perantara, yaitu orang Arab, Sumatra, dan Jawa terus menyalurkan

¹³⁴ Salah satu desain terkenal yang menjadi ciri khas dari batik perempuan Eropa adalah *buketan*. Disebut demikian karena desain tersebut memasukkan motif bunga yang ada di kartu pos Eropa. Keanggunan desain ini dihasilkan oleh Eliza Charlotte van Zuylen pada 1890-1946 (Oktabirawa, 2008: 258).

bahan, celup, dan lilin kepada pengrajin dan pada saatnya mengambil batik yang sudah jadi. Sejak kemunculan batik, kampung Arab di Pekalongan, khususnya kampung Sugihwaras dan Klego (kini status kampung menjadi kelurahan) ternyata sudah menjadi salah satu pusat usaha perbatikan di Kota Pekalongan (Hayati, 2009: 150). Oleh karena itu, Kampung Arab ini dapat dibilang sebagai salah satu representasi kampung batik di Pekalongan. Salah satu motif khas Pekalongan, *klamprang*, bahkan diklaim merupakan hasil perpaduan dari kebudayaan Arab dan India.¹³⁵

Jika sebelumnya disebutkan bahwa sedikit dari orang Arab di Indonesia menjadi tuan tanah, maka beberapa orang Arab di Pekalongan ternyata menekuni bisnis sewa rumah. Bisnis ini ternyata menjadi jenis usaha ketiga yang ditekuni oleh kelompok masyarakat Arab di Kota Pekalongan. Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, salah satu ciri fisik yang dapat ditemukan di Kampung Arab hingga kini adalah banyaknya rumah besar bergaya kolonial. Hal ini ternyata tidak dapat dilepaskan dari peran tiga keluarga Arab kaya yang ada di Pekalongan pada masa itu, yaitu keluarga Argubi, keluarga Yahya, dan keluarga bin Shihhab (Astuti, 2002: 86). Ketiga keluarga tersebut dengan kekayaannya sengaja membangun banyak rumah di kampung Arab, baik untuk dihuni keluarganya maupun disewakan kepada orang Arab lain yang banyak tinggal di wilayah tersebut. Astuti menyebutkan bahwa bisnis sewa rumah merupakan bisnis yang sangat menjanjikan pada waktu itu. Bisnis sewa rumah ini sepertinya dijadikan sarana oleh kelompok masyarakat Arab di Kota

¹³⁵ Berbeda dengan batik pada umumnya yang menggunakan motif fauna maupun flora, motif *klamprang* lebih banyak menggunakan motif diagonal yang menyerupai gigi roda. Hal inilah yang menunjukkan adanya pengaruh dari Arab, yaitu Islam yang melarang umatnya untuk menggambar makhluk-makhluk ciptaan-Nya, termasuk fauna dan flora. Sementara itu, pengaruh India didapat dari ilham atas kain *pathola* (tenunan sutra ikat ganda) (Ilyas, 2008: 269). Selain menjadi motif batik, popularitas *klamprang* juga dijadikan nama sebuah jalan di Kota Pekalongan.

Pekalongan untuk memutar modal karena sesuai dengan hukum Islam, mereka enggan menggunakan jasa simpan pinjam bank yang dianggap *riba*.¹³⁶

Catatan sejarah ekonomi dari kelompok masyarakat Arab di Kota Pekalongan menunjukkan signifikannya peran mereka dalam menggerakkan roda perekonomian kota. Pada masa-masa tersebut, terlihat pola relasi kekuasaan yang ada. Kelompok masyarakat Arab sesuai dengan ketetapan pemerintah kolonial menjadi kelas menengah. Dalam hal ini, mereka diuntungkan karena justru dapat menjadi pedagang perantara antara orang-orang Eropa dengan masyarakat lokal. Catatan sejarah ini sekaligus menunjukkan pesan yang dikonstruksi oleh kelompok masyarakat Arab di Pekalongan pada masa kolonial. Melalui catatan sejarah tersebut, pesan yang ingin disampaikan adalah posisi kelompok masyarakat Arab yang secara ekonomi berada di atas kelompok pribumi. Artinya, kelompok masyarakat Arab dapat dipastikan selalu mengidentifikasi dirinya sebagai orang kaya yang hanya layak menjadi saudagar atau pengusaha yang mampu mempekerjakan kelompok pribumi sebagai buruh-buruhnya. Dilihat dari sisi ini, kelompok masyarakat Arab memang diuntungkan dengan identitasnya sebagai saudagar yang kaya. Namun di sisi lain, khususnya dalam bidang pemerintahan, kelompok masyarakat Arab, terlepas dari sikap mereka yang antipati terhadap pemerintah kolonial, sebenarnya masih terpinggirkan dengan semakin banyaknya kelompok pribumi yang ada di kantor-kantor pemerintahan kolonial pada perempat awal abad ke-20. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan, kemunculan nasionalisme Indonesia pada abad ke-20 juga memarjinalkan kelompok masyarakat Arab di Indonesia, termasuk Kota Pekalongan, karena identitas mereka yang masih terikat dengan tanah kelahirannya di Hadramaut. Jika demikian

¹³⁶ Yang dimaksud dengan *riba* adalah sistem simpan pinjam dengan menggunakan bunga. Dalam hukum Islam, hal ini dilarang karena si peminjam diwajibkan untuk mengembalikan uang dalam jumlah yang lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya. Hal yang sama terjadi pada para penyimpan uang di bank.

pesan yang terbaca dari catatan sejarah, bagaimana dengan keterlibatan kelompok masyarakat Arab pada perkembangan ekonomi masa kini di Kota Pekalongan?

Menyusuri pusat Kota Pekalongan masa kini, kampung Arab yang menjadi pusat usaha perbatikan sejak kemunculan batik di kota ini, ternyata masih dapat dijumpai. Rumah-rumah maupun toko-toko yang menjajakan batik bahkan semakin banyak ditemui di sepanjang jalan-jalan yang ada di kampung Arab. Berbeda dengan kelompok etnis Cina yang umumnya memisahkan rumah sebagai ruang privat dengan toko sebagai ruang publik tempatnya berdagang, banyak rumah-rumah dari orang-orang Arab di Kota Pekalongan yang juga difungsikan sebagai toko batiknya. Keberadaan kampung Arab yang sukses menjadi pusat perdagangan batik sekaligus menjadi penanda masih langgengnya bisnis batik di Kota Pekalongan. Hal ini juga menjadi penanda bahwa bisnis batik pada hakikatnya adalah sebuah jenis usaha keluarga yang dapat diturunkan. Seperti halnya keterampilan membatik yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bisnis batik juga dapat diwariskan. Seperti dikatakan Muhaimin (dalam Hayati, 2009: 151), pola pewarisan ini menjadi sangat penting karena mengatur peralihan sumber-sumber daya dan penguasaan atas usaha-usaha yang digeluti dari generasi tua ke generasi muda.

Berangkat dari catatan sejarah, posisi kelompok masyarakat Arab dalam industri batik hingga kini tetap sebagai pengusaha. Dengan kepergian perempuan-perempuan Eropa dari Kota Pekalongan, pengusaha keturunan Arab jelas memiliki kesempatan yang besar untuk menguasai industri batik di Kota Pekalongan. Sangat disayangkan, bisnis batik yang berhasil dirintis pada masa sebelumnya, seperti milik keluarga Yahya, keluarga Argubi, dan keluarga Thalib, sudah tutup usaha.¹³⁷ Bisnis-bisnis batik tersebut kemungkinan mengalami masalah dalam hal pewarisan sehingga

¹³⁷ Hasil wawancara dengan sumber-sumber keturunan Arab saat penelitian lapangan di Kota Pekalongan pada 17 s.d. 25 Juni 2010.

tidak dapat bertahan. Selain itu, tren bisnis batik di Kota Pekalongan lebih mengutamakan nama pengusaha dibanding dengan nama label dagang (*brand*) dalam komunikasi pemasarannya (Maryati, 2008: 178). Menurut Maryati, penggunaan sistem komunikasi pemasaran semacam ini memiliki kekurangan karena popularitas nama pengusaha dapat menurun dan bahkan menghilang ketika pengusaha tersebut meninggal dunia.

Kegagalan bisnis batik generasi tua dari kelompok masyarakat Arab ternyata tidak menyurutkan semangat dari generasi mudanya. Meskipun sempat mengalami kemunduran setelah kepergian generasi tuanya, generasi muda dari kelompok masyarakat Arab ternyata masih menggeluti bisnis batik di Kota Pekalongan. Beberapa di antaranya mewarisi bisnis batik dari generasi sebelumnya, sementara beberapa yang lain merintis bisnis batik baru. Posisi kelompok masyarakat Arab dalam bisnis batik ini dapat dipastikan sebagai pemilik usaha yang mampu mempekerjakan banyak karyawan, mulai dari pembatik hingga penjaga toko. Bisnis batik dari kelompok masyarakat Arab di Kota Pekalongan ini tidak saja melayani pasar lokal dan nasional, tetapi juga pasar internasional. Sebuah survei terhadap 349 perusahaan batik di Pekalongan, menunjukkan bahwa 95.1% pengusaha berlatar belakang etnis Jawa, 0.9% (3 Orang) merupakan keturunan Arab, 2.3% (8 Orang) adalah campuran Arab-Jawa, 0.6% (2 Orang) adalah orang Tionghoa, serta sisanya sebesar 1.2% adalah orang-orang Bugis dan Minang (Savirani, 2008: 141). Namun demikian, jumlah toko-toko batik milik orang Arab yang dapat dijumpai di Kota Pekalongan sepertinya lebih banyak. Beberapa label terkenal yang dimiliki oleh orang-orang keturunan Arab di Pekalongan saat ini, antara lain Jacky (milik Zaki Basmeleh), Huza (milik Husein dan Zakiyah Alatas), serta Qonita (milik dr. Gholib Hasan Attamimi). Saat ini, bisnis batik generasi muda dari kelompok masyarakat Arab di Pekalongan memang berkembang pesat. Yang patut dipertanyakan adalah seberapa lama bisnis batik tersebut dapat bertahan jika generasi muda kelompok masyarakat Arab ternyata masih mewarisi penggunaan nama

pengusaha alih-alih nama sebuah label dagang? Mampukah pola pemasaran dengan nama-nama pengusaha tersebut bersaing dengan pola pemasaran dengan menggunakan label dagang ternama Indonesia, seperti Danar Hadi dan Keris?

Selain bisnis batik yang memang menjadi ikon dari Kota Pekalongan, kelompok masyarakat Arab ternyata masih menekuni bisnis lain yang masih terkait dengan tekstil. Bisnis tekstil yang dimaksud adalah sarung tenun. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis ini memang menjadi salah satu andalan industri dan bahkan pendukung citra Kota Pekalongan. Dikatakan demikian karena berbeda dengan bisnis batik yang mengutamakan nama pengusaha, bisnis sarung justru menggunggulkan nama label dagang sebagai kekuatan komunikasi pemasarannya. Hal ini ditunjukkan dengan popularitas sarung tenun berlabel *Gajah Duduk* yang sangat identik dengan Pekalongan. Bisnis ini bermula dari bisnis tekstil yang diproduksi oleh PT Pismatex yang didirikan oleh Ghozi Salim sekitar tahun 70-an (Maryati, 2008: 178-179). Sepeninggal Ghozi dan putranya, Hilmi Basmeleh, di tahun 1992, kepemimpinan perusahaan diteruskan oleh Jamal Ghozi, putra tertuanya (Maryati, 2008: 179). Di tangan Jamal, popularitas sarung tenun *Gajah Duduk* terus melesat. Perusahaan yang dipimpinnnya bahkan semakin berkembang di bawah bendera Pisma Group dengan berbagai variasi anak usaha, yaitu PT Pismatex yang menghasilkan sarung, PT Pisma Gajah Putra yang bergerak di bidang properti, PT Pisma Putra Textile yang memproduksi benang, PT Pisma Medica bergerak di bidang farmasi, serta PT Pisma Inti Produk Handphone dengan merk Nexian (Maryati, 2008: 179). Penggunaan merk, baik *Gajah Duduk* maupun *Pisma Group* sebagai gaya komunikasi pemasaran modern terbukti dapat menguatkan citra dari sebuah produk sehingga dapat terus bertahan dan bahkan terus berkembang dengan berbagai variasi usaha, meskipun pendirinya sudah wafat.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kelompok masyarakat Arab memiliki peran yang sangat signifikan bagi perkembangan ekonomi Kota Pekalongan, sejak awal kedatangannya hingga saat ini.

Keberadaan kelompok masyarakat Arab bahkan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industri batik yang menjadi label dari Kota Pekalongan. Jika pada masa kolonial posisi kebanyakan orang-orang Arab dalam industri batik masih menjadi pedagang perantara, maka kini mayoritas dari mereka termasuk dalam jajaran top pengusaha batik di Kota Pekalongan. Beberapa di antaranya bahkan sudah dapat memasuki pasar internasional. Hal ini dapat dipastikan membuka lapangan kerja yang cukup besar bagi para pengrajin batik yang ada di Kota Pekalongan. Pada masa ini, potensi persaingan kemungkinan datang dari kelompok masyarakat pribumi yang sudah mampu menaikkan posisinya sebagai pengusaha batik.¹³⁸

5.4 Asy Syabaab: Diskursus Pemuda Irsyad Pekalongan Masa Kini

Al Irsyad Pekalongan merupakan salah satu cabang Al Irsyad yang sangat berkembang. Cabang Pekalongan ini didirikan pada 20 November 1917 dengan tiga pengurus inti, yaitu Said bin Salmin Sahaq sebagai ketua, Muhammad bin Mubarak Haidarah sebagai sekretaris, dan Abdullah bin Rayyis an Nahdi sebagai bendahara. Mengikuti jejak perhimpunan perguruan pusatnya di Jakarta, perguruan Al Irsyad Pekalongan mendirikan sekolah dengan bantuan guru dari Jakarta, yaitu Umar bin Sulaiman Najji, murid dari Surkati yang merupakan pendiri Al Irsyad. Keberadaan sekolah tersebut ternyata tidak mudah dan bahkan pernah dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (*Asy Syabaab* Edisi I/April/2008, hlm. 5-6). Berangkat dari sejarah tersebut, Al Irsyad Pekalongan kini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan kepemilikan sekolah dan rumah sakit seperti yang sudah disebutkan. Saat ini, kepemimpinan Al Irsyad cabang Pekalongan berada di bawah dr. Gholib Hasan Attamimi (2006-2010). Bersama-sama dengan Al

¹³⁸ Uraian lebih rinci tentang pengusaha Jawa-Muslim dapat dilihat pada tulisan Riwanto Tirtosudarmo (2010), "Pengusaha dan Buruh Jawa-Muslim dalam Industri Kreatif di Pekalongan dan Jepara" dalam laporan lengkap penelitian ini.

Irsyad Jakarta dan Surabaya, Al Irsyad Pekalongan berhasil menjadi poros kekuatan Al Irsyad di Indonesia saat ini (*Asy Syabaab* Edisi I/April/ 2008, hlm. 6).

Pentingnya pengembangan wacana, khususnya bagi generasi muda, memotivasi Al Irsyad Pekalongan untuk menciptakan sebuah media. Sejak tahun 2008, Al Irsyad Pekalongan menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama *Asy Syabaab*. Majalah ini diproduksi oleh divisi pengkaderan yang ada dalam Lajnah Pemuda dan Pelajar, salah satu lajnah yang ada di bawah Al Irsyad Pekalongan. Sesuai dengan motonya, “Mengembangkan Pola Pikir dan Wacana Masyarakat”, *Asy Syabaab* ditujukan untuk membuka dan mengembangkan wacana dari anggota organisasi, khususnya generasi mudanya sehingga nantinya mampu meneruskan kepemimpinan Al Irsyad dan ikut memajukan Islam. *Asy Syabaab* merupakan majalah triwulan yang didistribusikan hanya untuk kalangan internal. Sebagai majalah yang terbilang “muda”, rubrikasi dalam *Asy Syabaab* tergolong beragam, mulai dari surat pembaca, sosok, sejarah, info Irsyadi, kajian utama, dakwah, kesehatan, fitur, *tarikh*, mutiara hikmah, hingga fiksi (cerita pendek dan puisi).¹³⁹ Lantas, bagaimana pemuda Irsyadi menciptakan pesan-pesannya dalam *Asy Syabaab*? Bagaimana mereka mengonstruksi identitas melalui pesan-pesan tersebut?

Penanda *pertama* yang menjadi petunjuk cara pemuda Irsyadi menciptakan pesan adalah penggunaan bahasa Arab. Pemilihan *Asy Syabaab* sebagai judul majalah menjadi penanda utamanya. Tidakkah bahasa Indonesia memiliki padanan katanya? Tentu ada jawabnya. Dalam bahasa Indonesia, *Asy Syabaab* berarti pemuda atau generasi penerus. Secara implisit, melalui pesan ini pemuda Irsyadi sepertinya

¹³⁹ *Tarikh* dalam bahasa Indonesia berarti sejarah. Jika demikian, mengapa terdapat dua nama rubrik yang sama, sejarah dan *tarikh*? Setelah diamati, kedua rubrik tersebut berbeda, meskipun memiliki definisi yang hampir sama. Rubrik sejarah lebih memfokuskan pada sejarah Al Irsyad Pekalongan. Sementara itu, rubrik *tarikh* mendeskripsikan sejarah dalam perjuangan Islam.

ingin menunjukkan identitasnya sebagai keturunan Arab di Indonesia. Meskipun pengakuan terhadap keberadaan Indonesia sudah diberikan sejak 17 Agustus 1945, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah warga Negara Indonesia yang “keturunan Arab”. Selain itu, beberapa kosa kata dalam bahasa Arab juga menghiasi pesan-pesan yang ada dalam *Asy Syabaab*. Penggunaan kata-kata dalam bahasa Arab ini tidak disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia karena kata-kata tersebut sepertinya sudah menjadi bagian dari percakapan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya antara lain, *antum* (Anda laki-laki), *anti* (Anda perempuan), *ghiroh* (semangat), *jum'iyah* (perkumpulan atau perhimpunan), *tahni'ah* (penghormatan), *ber-tahkim* (memutuskan perkara), *aitam fuqora* (anak-anak yatim yang fakir), dan *mau'idhah hasanah* (nasihat yang baik).¹⁴⁰

Pemilihan tokoh yang menjadi pengisi rubrik “Sosok” menjadi penanda *kedua*. Melalui rubrik ini pemuda Irsyadi ingin mengemas pesan yang sarat dengan informasi berharga tentang tokoh-tokoh Al Irsyad, termasuk tokoh-tokoh Al Irsyad Pekalongan. Namun demikian, pesan yang disampaikan menyiratkan bahwa tokoh-tokoh yang dapat diberitakan di sini hanyalah “tokoh-tokoh Irsyadi yang keturunan Arab”. Dari delapan edisi yang sudah diterbitkan, tokoh-tokoh yang pernah menghiasi rubrik “Sosok” adalah 1) Ahmad bin Muhammad Assorkattiy Al Anshary; 2) Umar Salim Hubeis; 3) Muhammad Munief; 4) Said Thalib Al Hamdani; 5) Abdullah Ahmad Basleman; serta 6) Ahmad Syawie. Mungkinkah hal ini dikarenakan sumber data yang terbatas serta generasi pertama dan kedua Al Irsyad yang lebih banyak diisi oleh cendekiawan dan guru yang masih asli dari Hadramaut (*walaiti*) maupun keturunan pertamanya? Pertanyaan ini segera terjawab dengan sebuah edisi yang menampilkan rubrik “Profil” yang hanya muncul sekali pada *Asy*

¹⁴⁰ Dalam menerjemahkan berbagai kosa kata dan konsep-konsep Islami berbahasa Arab dalam majalah *Asy Syabaab*, penulis banyak dibantu oleh Usman, S.Ag., peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI).

Syabaab Edisi II/Juli/2008. Profil yang disajikan adalah Muhammad Basyir Ahmad Syawie yang merupakan alumni dari SD AL Irsyad yang menjabat sebagai Walikota Pekalongan (*Asy Syabaab* Edisi II/Juli/2008, hlm. 4-8). Jika demikian, tidak adakah alumni Al Irsyad di Pekalongan yang “bukan keturunan Arab” dan berprestasi yang dapat dijadikan topik untuk rubrik ini? Dalam salah satu berita yang ada di rubrik “Info Irsyadi”, ternyata ada seorang alumni SD Al Irsyad bukan keturunan Arab yang diberitakan. Alumni tersebut bernama EH. Kartanegara. Alih-alih bercerita tentang kiprahnya sebagai alumni yang berprestasi, berita lebih mengedepankan tim redaksi *Asy Syabaab* yang belajar ilmu jurnalistik darinya. *Asy Syabaab* hanya menyebut, “EH. Kartanegara, seorang jurnalis berskala nasional ternyata alumni SD Al Irsyad Pekalongan” (*Asy Syabaab* Edisi VI/Agustus/2009, hlm. 17). Bagaimana perbedaan semacam ini dijelaskan? Apakah judul profil Muhammad Basyir Ahmad Syawie yang berbunyi “Sang Dokter yang Menjadi Walikota” seolah-olah ingin menyiratkan “Sang Arab yang Menjadi Walikota”?

Berbeda dengan dua penanda terdahulu, penanda *ketiga* menunjukkan adanya hubungan yang cukup erat antara Irsyadi dengan masyarakat Pekalongan. Hal ini dapat ditemukan dalam rubrik “Info Irsyadi” yang sepertinya dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada warga Irsyadi tentang kegiatan mutakhir dari lajnah Al Irsyad yang berjumlah lima, yaitu (1) Lajnah Pendidikan dan Pengajaran; (2) Lajnah Dakwah; 3) Lajnah Sosial dan Ekonomi; (4) Lajnah Wanita dan Putri; serta (5) Lajnah Pemuda dan Pelajar. Pesan yang disampaikan bukan sekedar menunjukkan aktivitas, melainkan juga keikutsertaan Al Irsyad dalam pembangunan Kota Pekalongan. Berikut ini pesan-pesan yang disampaikan secara eksplisit.

- (1) Lajnah Pendidikan dan Pengajaran Al Irsyad yang menyelenggarakan pendidikan mulai dari KB hingga SMA berupaya kembali untuk menjadi salah satu perguruan yang berkualitas unggul di Kota Pekalongan (*Asy Syabaab* Edisi I/April/2008, hlm. 9-10).

- (2) Lajnah Dakwah Al Irsyad Pekalongan mengadakan pengajian umum bertema “Keutamaan Generasi Muda yang Berjalan di Atas Sunnah” serta “Malam Pertama di Alam Kubur” (*Asy Syabaab* Edisi VI/Agustus/2009, hlm. 12).
- (3) Lajnah Sosial dan Ekonomi memiliki cakupan program kerja yang luas dan beragam, seperti halnya penyelenggaraan khitanan massal, penerimaan dan pendistribusian zakat dan kurban setiap Idul Fitri dan Idul Adha, pemberian subsidi bagi siswa perguruan Al Irsyad dan pasien RS Siti Khodijah yang tidak mampu, penyediaan bantuan beras bagi kaum *dhuafa* setiap bulan, bantuan bencana alam, dan lain-lain (*Asy Syabaab* Edisi V/Mei/2009, hlm. 14).
- (4) Lajnah Wanita dan Putri Al Irsyad memusatkan program kerjanya pada upaya peningkatan peranan wanita dan putri Al Irsyad Pekalongan di tengah masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah pengkajian aspek kewanitaan, meliputi seminar “Kesehatan Alat Reproduksi Wanita”, “Seminar Kesehatan Ibu dan Anak”, dan sebagainya (*Asy Syabaab* Edisi I/April/2008, hlm. 13).
- (5) Lajnah Pemuda dan Pelajar menggelar pawai drum band Pemuda Al Irsyad untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT-RI) yang ke-63 (*Asy Syabaab* Edisi III/September/2008, hlm. 18).

Semua berita di atas membentuk pesan yang berisi kepedulian Al Irsyad terhadap pembangunan kota. Oleh karena itu, melalui berbagai kegiatannya Al Irsyad Pekalongan berupaya seaktif mungkin ikut serta membangun kotanya, khususnya melalui pembangunan sumber daya manusianya (SDM). Hal ini sekaligus menandai posisi pemuda Irsyadi yang mengidentifikasi dirinya sebagai warga Kota Pekalongan sehingga ikut berpartisipasi aktif dalam membangun kotanya.

Keindonesiaan menjadi penanda *keempat* dari pesan yang disajikan *Asy Syabaab*. Seperti disebutkan pada bagian pengantar,

kelompok masyarakat Arab di Indonesia, khususnya *muwallad*, sempat mengalami guncangan identitas dengan munculnya nasionalisme Indonesia. Melalui berita-berita yang dimuat, *Asy Syabaab* ternyata secara implisit juga menciptakan diskursus-diskursus tentang hal tersebut. *Asy Syabaab* Edisi I/April/2008, hlm. 4 menyebutkan bahwa “Perjuangan Surkati untuk Al Irsyad dan sebaliknya merupakan perjuangan yang tak terpisahkan. Lewat dirinya, Al Irsyad telah melahirkan tokoh-tokoh masyarakat dan pejuang bangsa”. “Bung Karno pernah menyatakan bahwa beliau (baca Surkati) telah ikut mempercepat lahirnya gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia” (*Asy Syabaab* Edisi I/April/2008, hlm. 4). Selain itu, disebut pula bahwa “Surkati telah menjadi “sumber ilham” bagi generasi muda Islam terpelajar yang bangkit terorganisir pada tahun 1925 lewat wadah Jong Islamieten Bond (JIB)” (*Asy Syabaab* Edisi II/Juli/2008, hlm. 10). Pesan-pesan tersebut menyiratkan kiprah dan semangat nasionalisme Indonesia yang ada dalam diri Surkati yang kemudian diwariskan kepada generasi penerusnya di Al Irsyad. Dalam konteks kekinian, Al Irsyad Pekalongan tetap mewarisi semangat keindonesiaan. Dalam berita disampaikan bahwa “Al Irsyad telah menjelma menjadi sebuah ormas yang modern dan terbuka yang diterima luas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia, terlebih di Pekalongan” (*Asy Syabaab* Edisi I/April/2008, hlm. 4). Selain itu, melalui sebuah artikel yang dikutip dari Ruwaifi bin Sulaimi (dalam *Asy Syariah*), Al Irsyad Pekalongan ingin menegaskan pentingnya bagi umat untuk taat kepada pemerintah dalam hal kebaikan. Sangat disayangkan ketika umat Islam meninggalkan prinsip untuk memuliakan dan menaati penguasa (pemerintah) dalam hal yang *ma'ruf* (kebaikan) sehingga di Indonesia seringkali terjadi perpecahan dalam penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri (*Asy Syabaab* Edisi III/September/2008, hlm. 31). Paparan ini sekaligus menggambarkan cara pemuda Irsyadi Pekalongan yang mengidentifikasi dirinya bukan hanya sebagai warga Pekalongan, melainkan juga warga Indonesia.

Diskursus tentang terorisme, persoalan mutakhir yang menyorot Islam dan Indonesia, menjadi penanda *kelima* yang menggambarkan posisi Al Irsyad. Isu terorisme ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, cenderung menyudutkan umat Islam. Lantas, bagaimana Al Irsyad sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia menyikapinya? Bagaimana diskursus yang dibentuk? Pembina Yayasan Al Irsyad Pekalongan menjawabnya melalui sebuah artikel berjudul “Bahaya Amalan Tanpa Ilmu” (*Asy Syabaab* Edisi VII/Januari/2010, hlm. 31-34). Menurut mereka, “...aneh ketika bom-bom tersebut meledak di negara muslim yang tidak dalam situasi penindasan atau penjajahan seperti di Indonesia...” Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa, “...adanya fatwa-fatwa yang menyesatkan dan menjerumuskan sebagian generasi muda yang **tidak memiliki ilmu agama yang cukup**, bahwa merusak dan membunuh kaum muslimin dan orang-orang asing yang dijamin keamanannya oleh negara adalah sebagai tindakan “**ji**had”. Hal ini adalah **bentuk pemberian nama yang salah**” (cetakan tebal ditambahkan). Melalui diskursus ini Al Irsyad ingin menekankan pentingnya ilmu dalam menjalankan amalan, termasuk jihad. Tanpa ilmu, pelaksanaan amalan dapat jadi merupakan sebuah pemahaman yang keliru. Jika demikian, pertanyaan tentang kemungkinan Al Irsyad sebagai salah satu ormas Islam terbesar yang memiliki banyak anggota keturunan Arab, mendukung atau bahkan memiliki kaitan dengan terorisme di Indonesia, dapat dijawab.

Uraian di atas menggambarkan cara pemuda Irsyadi Pekalongan menciptakan pesan-pesan yang kemudian menjadi diskursus. Perdebatan terhadap diskursus pasti terjadi untuk mengembangkan pola pikir dan wacana masyarakat seperti yang dimaksudkan oleh majalah *Asy Syabaab*. Melalui diskursus-diskursus tersebut dapat dibaca tentang cara pemuda Irsyadi mengidentifikasi dirinya. Pada hakikatnya, pemuda Irsyadi sebagai representasi Al Irsyad Pekalongan memperlihatkan pengakuannya sebagai warga Kota Pekalongan dan tentunya Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini dibuktikan dengan berbagai kiprah mereka dalam kegiatan yang

dimaksudkan untuk ikut memperjuangkan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi maupun membangun kota dan negara di masa kini. Sementara itu, penggunaan “atribut-atribut berbau Arab,” seperti penggunaan bahasa Arab maupun keteladanan terhadap tokoh-tokoh Arab dan keturunannya semata-mata menjadi bagian dari identitas besar sebagai WNI. Hal ini dapat dibaca bahwa mereka ingin menyatakan dirinya sebagai “WNI keturunan Arab Pekalongan”.

Lantas, adakah kaitan antara Al Irsyad dengan batik sebagai industri kreatif di Pekalongan? Dilihat dari penerbitan *Asy Syabaab* dan kegiatan Al Irsyad lainnya, ternyata ada beberapa pengusaha batik dan sarung yang mengiklankan produknya maupun mensponsori sebuah kegiatan. Salah satunya adalah Qonita yang sudah disebutkan sebelumnya. Sang pemilik ternyata tidak sekedar keturunan Arab, tetapi ia juga Ketua Pimpinan Al Irsyad Cabang Pekalongan (Irsyadi) yang gemar menyumbangkan tenaga maupun materinya untuk Al Irsyad dan berbagai kegiatannya. Pemilik batik Jacky, Zaki Basmeleh, pun ternyata seorang Irsyadi. Sepertinya, kebanyakan dari Irsyadi ini banyak yang menjadi pengusaha batik. Selain menyerap banyak tenaga kerja, pengusaha batik Irsyadi juga cenderung mendermakan sebagian dari keuntungannya untuk kepentingan Al Irsyad yang tentunya dapat diartikan sebagai kepentingan umat karena kegiatan-kegiatan Al Irsyad dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada umat, baik Irsyadi maupun warga Pekalongan secara umum.

5.5 Mohammad Basyir Ahmad Syawie: “Orang Arab Nomor 1” di Kota Pekalongan

Basyir begitu warga Pekalongan menyebutnya. Kepopulerannya sering menjadikannya sebagai bahan pemberitaan di media komunitas (seperti *Asy Syabaab* yang sudah disebutkan), media lokal, dan bahkan media nasional. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan laki-laki bernama lengkap Mohammad Basyir Ahmad Syawie sebagai Walikota Pekalongan. Sejak tahun 2005, warga Kota Pekalongan berkesempatan untuk memilih walikotanya secara

langsung. Sejak saat itu pula, Basyir terpilih sebagai Walikota Pekalongan. Basyir tidak saja orang Pekalongan pertama yang berhasil menjadi walikota di 'Kota Batik', tetapi ia juga seorang keturunan Arab. Jika demikian, siapa sebenarnya Basyir? Bagaimana ia mengonstruksi identitasnya sebagai pemimpin dalam sebuah ruang bernama Kota Pekalongan? Siapa sebenarnya yang direpresentasikan olehnya? Apakah kepemimpinannya dapat diartikan sebagai keberhasilan kelompok masyarakat Arab dalam mendominasi pengisian "ruang-ruang kosong" yang ditinggalkan oleh orang-orang Eropa di Pekalongan masa kolonial? Beragam hal tersebut menjadi menarik untuk dibaca. Salah satu media untuk membacanya adalah buku biografi Basyir yang berjudul *Mengabdikan Tanpa Henti* yang diterbitkan oleh Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Pekalongan.

Keluarga dan pendidikan menjadi salah satu tolak ukur yang menentukan kualitas sekaligus latar belakang pemikiran seseorang. Basyir merupakan keturunan Arab dari pasangan Ahmad Abdurrahman Syawie dan Aminah Said Basalamah (Kusuma, 2008: 3). Komitmen ayah yang sangat tinggi terhadap pendidikan yang dapat dilihat dari profesinya sebagai guru SD Al Irsyad hingga keberhasilannya mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universitas Al Azhar, Mesir, serta keberadaan ibu yang penuh dengan motivasi menjadi teladan yang besar bagi Basyir dalam mewujudkan cita-citanya. Setelah menyelesaikan sekolahnya di SD Al Irsyad, SMP Ma'had Islam, dan SMA Negeri 1 Pekalongan, Basyir atas "paksaan" dari ibunya melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (Kusuma, 2008: 5).

Sebagai warga 'Kota Batik', kehidupan Basyir tidak dapat dilepaskan dari batik. "Setelah duduk di bangku SMA, Basyir mulai sering membantu pekerjaan ibu. ...Basyir mengambil barang dagangan batik dari seorang pengusaha besar untuk dibawa ke rumahnya. Di lain waktu ia membawa barang-barang dagangan batik tadi ke pelanggan atau pengecer..." (Kusuma, 2008: 5). Hal ini berarti bahwa batik sudah menyatu dengan kehidupan Basyir. Melalui

pengalaman tersebut, Basyir tentu banyak belajar cara menjadi pengusaha batik yang sukses.

Profesi dokter membuat Basyir semakin dekat dengan warga Pekalongan. Berawal dari dokter di RS Siti Khodijah, Basyir kemudian mencoba menjalani profesi sebagai dokter di instansi pemerintah, dan pada akhirnya membuka praktik sendiri di rumah. Sebagai seorang dokter, Basyir menyatakan bahwa “Saya bahagia dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya selalu memohon kepada Allah SWT, semoga dijauhkan dari sifat takabur. Semakin banyak kepercayaan diberikan oleh masyarakat kepada saya, semakin berhati-hati saya untuk bekerja” (Kusuma, 2008: 12). Selain itu, Basyir juga mengatakan bahwa, “...hidup tidak harus berorientasi pada materi. ...Kerja di mana pun, ada duitnya atau tidak ada duitnya *happy* saja. Tombok itu biasa” (Kusuma, 2008: 16). Melalui pernyataan-pernyataan tersebut dapat dibaca bahwa Basyir adalah seseorang yang sangat religius di mana ia selalu menyandarkan hidupnya kepada Tuhan sehingga dalam bekerja ia sangat bertanggung jawab dan mengedepankan kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila warga Pekalongan memberinya label sebagai “dokter yang sangat dermawan”.

Kedermawanan mengantarkan Basyir menjadi “orang Arab nomor 1” di Kota Pekalongan. Pribadi yang bersih dengan banyak jaringan, aktif dalam kegiatan sosial, serta baik dalam berpolitik sebagai anggota legislatif menjadi alasan bagi Partai Golkar untuk menetapkan Basyir sebagai Ketua Partai Golkar sekaligus calon Walikota Pekalongan (Kusuma, 2008: 20). Pinangan Partai Golkar ini sebenarnya menjadi kelemahan bagi Basyir karena Kota Pekalongan sangat terkenal sebagai daerah basis NU dan partai-partai Islam. Kelemahan lain adalah keberadaan Basyir sebagai keturunan Arab (Kusuma, 2008: 23). Kelemahan tersebut kemudian dicoba ditutupi oleh tim suksesnya. “Kami tidak mengusung lambang partai dan atribut Golkar. Kami justru menggunakan seragam serba putih,” kata M. Bowo Leksosno Ah. T., Ketua Tim Sukses Kemenangan Basyir-Almafachir. Menurutnya, warna putih memiliki banyak kesan yang

menguntungkan, yaitu 1) menyampaikan pesan netral yang menerima pemilih dari latar belakang partai apapun; 2) memberikan citra identik dengan dokter sebagai profesi Basyir yang sangat dikenal masyarakat; 3) mengesankan sesuatu yang bersih, suci, agamis; serta 4) menunjukkan koalisi Partai Golkar dengan partai berwarna putih, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Kusuma, 2008: 127). Dengan strategi tersebut, warga Pekalongan yang selama ini menjadi daerah basis partai-partai Islam, ternyata menerjang sejarah itu dengan memilih Basyir yang keturunan Arab dan Ketua Partai Golkar. Artinya, jiwa sosial Basyir memang sangat terkenal dan dapat “memenangkan” hati warga Pekalongan sehingga warga Pekalongan memberikan kepercayaan terbesarnya kepada sang dokter untuk memimpin Kota Pekalongan, tanpa mementingkan latar belakangnya sebagai Ketua Partai Golkar maupun keturunan Arab.

Keberadaan sebagai keturunan Arab yang menjadi kelemahan Basyir sebenarnya menunjukkan bahwa kelompok masyarakat Arab, khususnya di Kota Pekalongan, masih mengalami marjinalisasi dalam kehidupan politiknya. Jika demikian, lantas bagaimana kiprah Basyir sebagai Walikota Pekalongan yang “keturunan Arab”?

Latar belakang identitas sangat mempengaruhi visi dan tiga program utama Basyir untuk Kota Pekalongan. Visi yang diusung Basyir adalah “Terwujudnya Kota Pekalongan yang **lebih religius** berbasis perdagangan, industri, dan pariwisata, membangun kebersamaan, kerukunan menuju masyarakat sadar dan taat hukum, sehat, aman, adil, dan sejahtera” (*Warta Kota Batik* Edisi Khusus, hlm. 5, cetakan tebal ditambahkan). Dambaan kota yang religius ini tentunya sangat dipengaruhi oleh jiwa Basyir yang religius serta latar belakang pendidikan agama yang kuat, baik dari keluarga, sekolah, dan lingkungannya. Bagi pemeluk nonmuslim, Basyir memberikan kebebasan, sedangkan untuk pemeluk muslim, ia mengajak siswa-siswa sekolah untuk mengenakan busana muslim, termasuk jilbab, serta meminta mereka untuk berdoa dan membaca ayat-ayat kitab suci sebelum mulai belajar di sekolah (Kusuma, 2008: 45). Sementara itu, tiga program utama Basyir adalah 1) Memperbaiki mutu dan

kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; serta 3) Menekan jumlah penduduk miskin di Pekalongan (Kusuma, 2008: 32-33). “Saya hidup untuk anak-anak saya agar mereka dapat hidup lebih baik dari saya di waktu mendatang. Demikian pula halnya dengan penduduk Pekalongan yang saat ini masih muda, pada hitungan 3-4 tahun lagi baru dapat merasakan arti pembenahan dan peningkatan mutu pendidikan yang saya lakukan hari ini”, kata Basyir (Kusuma, 2008: 35). Berdasarkan pengalamannya sebagai dokter, Basyir sangat yakin bahwa kualitas kesehatan seseorang akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan (Kusuma, 2008: 37). Mengenai program ketiganya, Basyir menyatakan bahwa, “Saya akan perhatikan kebutuhan dasar orang miskin. Mereka juga punya kebutuhan. Perda tentang retribusi, banyak kita jumpai. Tapi perda tentang kewajiban pemerintah terhadap orang miskin belum ada. Saya akan membuatnya” (Kusuma, 2008: 37). Selain itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan terkait jumlah pengangguran, Basyir berupaya untuk menghidupkan kembali industri batik. Hal ini dilakukan dengan berbagai strategi, mulai dari menyelenggarakan program pelayanan perizinan usaha satu atap, mengundang 20 desainer Finlandia untuk mengetahui desain batik yang digemari pasar Eropa, mengajak pengusaha sukses Pekalongan untuk bersama-sama membangkitkan industri batik Pekalongan, hingga melobi bantuan khusus dari pemerintah pusat (Kusuma, 2008: 39-40). Bersama dengan istrinya, Balqis Diab, Basyir kini juga menjadi pengusaha batik dengan nama perusahaan Gies Batik (Kusuma, 2008: 78). Uraian di atas menggambarkan cara Basyir dalam mengonstruksi identitasnya sebagai WNI yang keturunan Arab Pekalongan. Alih-alih mengedepankan kelompok masyarakat Arab yang memang termarginalkan dalam kehidupan politiknya, Basyir justru merepresentasikan semua kelompok masyarakat Pekalongan. Dari hal ini dapat dibaca bahwa sebenarnya Basyir ingin mengatakan bahwa, “orang keturunan Arab dapat memimpin dan bahkan memajukan seluruh warga Pekalongan, meskipun pada awalnya sempat diremehkan”.

Kecintaan Basyir terhadap Pekalongan menjadi bukti kecintaannya kepada Indonesia. “Kalau saya tidak dapat mengubah Indonesia, mungkin saya dapat mengubah Pekalongan menjadi lebih baik. Kalau Pekalongan berubah ke arah lebih baik, nantinya dicontoh oleh kota-kota lain. Sama juga artinya tujuan mengubah Indonesia mungkin dapat tercapai, Indonesia akan berubah ke arah lebih baik,” papar Basyir (Kusuma, 2008: 63). Di sini, terlihat tidak adanya keraguan bagi Basyir mengakui dirinya sebagai WNI. Lebih dari sekedar pengakuan, ia memiliki komitmen yang besar untuk memperjuangkan yang terbaik bagi negerinya atau setidaknya kotanya. Bukan sekedar kata-kata, Basyir berupaya untuk mewujudkan pernyataannya tersebut. Sesuai dengan namanya yang berarti pembawa berita gembira, maka sangat wajar jika masyarakat kota batik menunggu dan seolah-olah hendak berkata, “Semoga engkau (baca Basyir) benar-benar membawa berita gembira untuk kami!” (*Asy Syabaab*, Edisi II/Juli/2008, hlm. 8). Basyir tidak saja menjadi kebanggaan dari kelompok masyarakat Arab, tetapi juga seluruh warga Kota Pekalongan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Basyir kembali terpilih menjadi Walikota Pekalongan (2010-2015) berpasangan dengan Achmad Alf Arslan Djunaid, setelah sebelumnya berpasangan dengan Abu Almafachir (2005-2010).

5.6 Membaca Kelompok Masyarakat Arab di ‘Kota Ukir’ Jepara dari ‘Kota Batik’ Pekalongan

Jepara dan Pekalongan ternyata memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal administratif. Jika Pekalongan merupakan sebuah wilayah administratif kota, maka Jepara merupakan sebuah wilayah administratif kabupaten. Wilayah yang dapat dikatakan sebagai ‘Kota Jepara’ hanya dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jepara, ibukota Kabupaten Jepara, dan Kecamatan Tahunan, pusat industri ukir Jepara. Dengan demikian, ‘Kota Jepara’ dipastikan luas areanya lebih sempit dibanding dengan Kota Pekalongan yang mencakup empat kecamatan. Perbedaan lain adalah tidak dibangunnya Jepara sebagai ‘kota kolonial’. Kendati Jepara pada abad ke-16 pernah

terkenal dengan galangan-galangan kapalnya karena sangat dekat dengan hutan-hutan jati, potensi daerah ini semakin surut, terlebih dengan peralihan dari kapal kayu menjadi kapal uap besi (Lombard bagian II, 2008: 54). Melihat kondisi pantai Jepara yang banyak mengalami pendangkalan serta potensi ekonomi Jepara yang semakin menurun, pemerintah kolonial kemudian menenggelamkan wilayah ini dan membangun ‘kota kolonial’ sekaligus pusat ekonomi baru di dekat Jepara, yaitu Semarang.

Potensi ekonomi menjadi hal utama yang menarik kehadiran pendatang di sebuah daerah. Tanpa adanya potensi ekonomi yang “menjanjikan”, sangat mustahil bagi para pendatang untuk memasuki daerah tersebut. Tidak ada potensi ekonomi berarti tidak ada pendatang. Fenomena inilah yang sepertinya terjadi di ‘Kota Jepara’. Berbeda dengan Kota Pekalongan yang memiliki kampung Arab, ‘Kota Jepara’ tidak memiliki kawasan pemukiman Arab. Bahkan, keberadaan kelompok masyarakat Arab sangat sulit ditemukan di ‘Kota Jepara’. Hal ini kemungkinan disebabkan karena menyurutnya potensi ekonomi Jepara sehingga ia tidak dibentuk sebagai ‘kota kolonial’. Akibatnya, para pendatang, khususnya kelompok masyarakat Arab, sangat enggan untuk menjadi penghuni ‘Kota Jepara’.

Hal ini kemudian berubah ketika Jepara mengalami lonjakan ekonomi yang sangat dahsyat pada akhir abad ke-20. Ketika kota-kota lain di Indonesia “menggelepar” karena adanya krisis ekonomi, Jepara dengan industri ukirnya justru mengalami “puncak perkembangan ekonomi”. Ukiran Jepara sangat terkenal dan bahkan menjadi wujud konsep diri dari masyarakatnya (Lombard bagian II, 2008: 190-191). Meskipun ukiran Jepara sudah eksis sejak lama, setelah berakhirnya produksi kapal kayu, industri ukir Jepara ini baru “meledak” pada tahun 1997. Pada tahun tersebut, industri ukir Jepara secara tiba-tiba berhasil menguasai perekonomian di Indonesia karena keberhasilannya dalam mengeksport ukiran secara besar-besaran. Rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar pada masa itu menjadi keuntungan yang sangat besar bagi para pengrajin ukir di Jepara.

Tidak mengherankan apabila kemudian Jepara menjadi sebuah daerah yang “menjanjikan” secara ekonomi. Industri ukir berhasil mengangkat kehidupan masyarakat Jepara secara keseluruhan.

Potensi ekonomi Jepara pada akhir abad ke-20 menjadi daya tarik terbesar bagi para pendatang, khususnya kelompok masyarakat Arab. Kelompok masyarakat Arab yang memang terkenal sebagai perantau dan pedagang mulai memasuki Jepara untuk mencari kehidupan yang lebih baik karena Jepara “menjanjikan” secara ekonomi dengan “ledakan” industri ukirnya. Oleh karena itu, pada satu dekade terakhir ini banyak orang-orang keturunan Arab di Indonesia, khususnya yang berasal dari Jawa Timur, seperti Bangil dan Malang, serta Jawa Tengah, seperti Solo, berdatangan ke Jepara.¹⁴¹

Berdagang dan berdakwah menjadi dua tumpuan ekonomi dari kelompok masyarakat Arab yang ada di Jepara. Profesi sebagai pedagang sepertinya memang sudah melekat dengan kelompok masyarakat Arab di manapun mereka berada. Melalui profesi ini, mereka perlahan-lahan sebenarnya mencoba untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. “Saya dan istri pindah dari Solo ke Jepara pada tahun 1997. ‘Ledakan’ industri ukir Jepara menjadi peluang yang besar bagi kami untuk memulai usaha. Saya berdagang jamu, sementara istri saya berdagang kain,” begitulah yang disampaikan oleh Habib Husein Idrus Al Hadad.¹⁴² Semangat dakwah kemudian muncul seiring dengan munculnya kesadaran akan kondisi lingkungan yang masih dianggap “belum Islami” serta semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap kelompok masyarakat Arab sebagai juru agama. Oleh karena itu, kelompok masyarakat Arab mulai mendirikan pondok pesantren, sekolah agama, atau setidaknya menggelar

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan berbagai sumber dari kelompok masyarakat Arab selama penelitian lapangan di Jepara pada 25 s.d. 30 Juni 2010.

¹⁴² Hasil wawancara dengan Habib Husein Idrus Al Hadad pada 28 Juni 2010.

pengajian rutin yang mendatangkan massa. Hal ini salah satunya dilakukan oleh Habib Husein Idrus Al Hadad yang mendirikan pondok pesantren dan *madrasah* (sekolah agama) Ar Riyadh di Kecamatan Bangsri. Hal yang sama juga dialami oleh Habib Ali Assegaff.¹⁴³ Berdagang busana muslim, sarung, dan peralatan muslim lainnya, Habib Ali Assegaff dan keluarga memulai kehidupan di Kecamatan Tahunan. Ia juga dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi guru agama dan mengadakan pengajian rutin di belakang rumahnya yang sengaja didesain untuk kepentingan tersebut. Namun demikian, beberapa di antara para *habib* sudah menghuni Jepara untuk waktu yang lama. Salah satunya adalah Habib Ismail Abu Bakar Al Kaff di Kecamatan Pecangaan.¹⁴⁴ Meneruskan usaha yang sudah dirintis ayahnya, Habib Ismail Abu Bakar Al Kaff kini mengelola perguruan Raudlatul Atfal di bawah Yayasan Al Alawiyah yang didirikan sekitar tahun 1900-an. Gambaran ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat Arab di Jepara kurang menyatu dengan industri ukir. Kendati “ledakan” industri ukir menjadi alasan kedatangan mereka di Jepara, sangat sedikit dari mereka yang menekuni bisnis ukir.¹⁴⁵ Lamanya perputaran modal dalam bisnis ukir ditengarai menjadi penyebabnya. Berbeda dengan bisnis tekstil, termasuk bisnis batik Pekalongan, perputaran modal dari bisnis ukir membutuhkan waktu yang lebih lama karena kebanyakan industri ukir menghasilkan berbagai perabot rumah tangga yang bukan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, industri ukir jarang ditekuni oleh para pendatang dari kelompok masyarakat Arab.

Kebanyakan kelompok masyarakat Arab di Jepara berasal dari golongan *sayyid*. Hampir semua sumber yang ditemui di

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Habib Ali Assegaff pada 29 Juni 2010.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Habib Ismail Abu Bakar Al Kaff pada 27 Juni 2010.

¹⁴⁵ Selama penelitian lapangan di Jepara, sangat disayangkan peneliti belum dapat menemui kelompok masyarakat Arab yang menekuni bisnis ukir. Hal ini kemungkinan dikarenakan jumlah orang Arab di Jepara yang masih terbatas, terlebih yang menekuni bisnis ukir.

lapangan merupakan para *habib*. Para *habib* di Jepara ini memang tinggal menyebar di Jepara dan umumnya berada di luar ‘Kota Jepara’. Hal ini lebih dikarenakan lebih besarnya kesempatan ekonomi dan dakwah di luar ‘Kota Jepara’. Menyadari semakin banyaknya jumlah *habib* di Jepara pada satu dekade terakhir, golongan *habib* ini membentuk perkumpulan *habib* di Jepara sekitar tiga tahun yang lalu.¹⁴⁶ Jumlah anggota perkumpulan tersebut masih terbatas lebih kurang seratus kepala keluarga (KK). Tujuan dari perkumpulan ini adalah (1) saling mengenal dan menjaga persaudaraan di antara sesama *habib* yang tinggal di Jepara; (2) menyelenggarakan pengajian bersama; serta (3) memberikan bantuan-bantuan sosial kepada para *habib* dan keluarganya yang membutuhkan. Perkumpulan ini dibentuk oleh para *habib* di Jepara dan memang diperuntukkan untuk para *habib* dengan motonya “dari *habaib* untuk *habaib*”. Seperti halnya golongan *habib* yang ada di Kota Pekalongan, golongan *habib* di Jepara ini cenderung berafiliasi dengan NU.

Kelompok masyarakat Arab Jepara dapat dikatakan “relatif baru terbentuk” pada satu dekade terakhir. Kendati demikian, keberadaan mereka mulai signifikan bagi Jepara. Seperti halnya kelompok masyarakat Arab di kota-kota lain di Indonesia, kelompok masyarakat Arab di Jepara juga mulai berkiprah dalam perdagangan dan pendidikan.

5.7 Penutup

Kunci utama dalam kehadiran pendatang di sebuah kota adalah potensi ekonomi. Potensi ekonomi menjadi sangat penting karena hanya potensi ekonomi yang “menjanjikan” yang dapat menarik minat para pendatang untuk memasuki daerah tersebut. Dengan alasan potensi ekonomi ini, pemerintah kolonial kemudian membangun ‘kota kolonial’ di Pekalongan dan “menenggelamkan”

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan berbagai sumber dari kelompok masyarakat Arab selama penelitian lapangan di Jepara pada 25 s.d. 30 Juni 2010.

Jepara. Sebagai konsekuensinya, pendatang, khususnya kelompok Timur Asing dengan kekhasannya, termasuk pola pemukimannya, hanya ditemukan di Pekalongan dan tidak dapat dijumpai di Jepara. Kampung Arab, khususnya, hanya dapat dijumpai di Pekalongan hingga kini. Pendatang baru memasuki Jepara ketika Jepara melalui industri ukirnya mengalami “ledakan” ekonomi di tengah krisis yang terjadi di Indonesia. Pada satu dekade terakhir inilah pendatang, termasuk orang-orang keturunan Arab, mulai hadir dan menyemarakkan Jepara.

Konstruksi identitas kelompok masyarakat Arab memang menarik untuk dibaca. Konstruksi identitas ini sangat mempengaruhi partisipasi kelompok masyarakat Arab, baik bagi kota maupun negaranya. Melalui paparan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat dilihat cara pengidentifikasian diri kelompok masyarakat Arab di Pekalongan yang lebih tegas dan jelas daripada kelompok masyarakat Arab di Jepara. Kelompok masyarakat Arab di Pekalongan dapat dengan tegas menyatakan dirinya sebagai “orang Indonesia keturunan Arab Pekalongan”. Sementara itu, hal ini agak sulit ditemui di Jepara. Pengakuan diri kelompok masyarakat Arab sebagai warga Jepara masih sulit ditemukan karena mayoritas dari mereka berasal dari berbagai daerah dan baru menghuni Jepara selama satu dekade terakhir. Akibatnya, terdapat perbedaan peran kelompok masyarakat Arab dalam pengembangan industri kreatif di Pekalongan dan Jepara.

Industri kreatif ternyata tidak selalu dapat melekat pada kelompok masyarakat Arab. Kendati berdagang menjadi pekerjaan yang paling banyak diminati oleh kelompok masyarakat Arab, mereka ternyata memilih komoditas yang diperdagangkan. Komoditas yang banyak mereka perdagangkan adalah tekstil sebagai komoditas utama serta perlengkapan ibadah muslim dan barang-barang khas Timur. Oleh karena itu, produk industri kreatif sangat mempengaruhi keterlibatan kelompok masyarakat Arab di dalamnya. Batik Pekalongan sebagai salah satu produk tekstil sekaligus kebutuhan dasar masyarakat sangat menarik bagi kelompok masyarakat Arab sehingga keberadaan kelompok masyarakat Arab memiliki peran

yang sangat signifikan bagi pengembangan industri batik Pekalongan. Sementara itu, ukir Jepara yang membutuhkan waktu perputaran modal yang lama bukanlah komoditas yang diminati oleh kelompok masyarakat Arab sehingga keberadaan kelompok masyarakat Arab kurang signifikan bagi pengembangan industri ukir Jepara. Sebagai konsekuensinya, batik sudah ‘mendarah daging’ bagi kelompok masyarakat Arab di Pekalongan, sedangkan ukir justru ‘memisah’ dari kehidupan kelompok masyarakat Arab di Jepara.

BAB VI

BAHASA JAWA PESISIRAN DAN PERKEMBANGANNYA DI PEKALONGAN DAN JEPARA¹⁴⁷

6.1 Pengantar

tonomi Daerah (selanjutnya disebut Otda) telah memberi peluang yang besar bagi daerah untuk kembali memposisikan identitas kedaerahannya. Salah satu alat reposisi identitas itu ialah bahasa karena ia menjadi penanda identitas kelompok masyarakat yang khas. Soal hubungan antara bahasa dan identitas ini, Kramsch (1998: 65) berpendapat bahwa *[i]t is widely believed that there is a natural connection between the language spoken by members of a social group and that group's identity.*¹⁴⁸ Pendapat tersebut memberikan gambaran adanya kaitan yang erat, karena sifatnya yang alamiah, yang terjadi antara bahasa dan identitas suatu kelompok masyarakat.

Sebagai salah satu contohnya ialah bahasa Jawa sebagai sebuah identitas kejawaan. Sudah menjadi pengetahuan umum, ketika berbicara tentang orang Jawa, maka bahasa Jawa menjadi salah satu pencirinya. Tidak jarang pula, orang-orang Jawa dikenal, bukan karena pengakuannya, tetapi karena bahasa Indonesia yang khas dengan bunyi-bunyi dari bahasa ibunya (baca: bahasa Jawa).

Saat ini bahasa Jawa yang dikenal luas dan diajarkan di sekolah-sekolah di Jawa-Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur-ialah bahasa Jawa *Kromo*.¹⁴⁹ Bahasa ini dianggap sebagai dialek bahasa Jawa yang pantas

¹⁴⁷ Ditulis oleh Imelda

¹⁴⁸ Dalam [] ditambahkan penulis.

¹⁴⁹ Biasa juga ditulis *Kromo* (KBBI, 2008: 817).

diajarkan karena mengandung nilai-nilai yang adiluhung dan kesopanan tingkat tinggi, selain juga memberikan gambaran soal status sosial pembicaranya. Dalam konteks Otda yang memberikan peluang bagi daerah (baca: kota dan kabupaten) untuk menunjukkan identitasnya, khususnya di Jawa, bahasa Jawa *Kromo* ini kembali dipertanyakan legitimasinya, terutama oleh kota dan kabupaten yang berada di pesisir Jawa yang berbahasa Jawa *Ngoko*. Contohnya, lewat sebuah artikel di Kompas¹⁵⁰ berjudul Represi pada bahasa Jawa “*Ngapak*”, Sumarno menyoal pembakuan dan legalisasi bahasa Jawa *Kromo* yang dianggapnya lebih berkelas dari pada bahasa Jawa *Ngapak* yang dituturkan oleh masyarakat pesisiran di Tegal dan Banyumas. Di dalam artikelnya, ia memaparkan anggapan umum bahwa “[b]ahasa *Ngapak* ini umum dianggap sebagai bahasa yang kasar serta secara “kasar” ditautkan dengan bahasa yang berkelas “rendahan”, bahasanya kaum proletar.”¹⁵¹ Terhadap pandangan umum itu, ia berpendapat bahwa “bahasa Jawa *Ngapak* adalah bahasa yang relatif bersih dari telikungan kepentingan kekuasaan atau politik. Artinya, bahasa *Ngapak* sebenarnya lebih egaliter dan demokratis karena mencerminkan kesetaraan” Artikel yang ditulis oleh Sumarno tersebut boleh jadi merupakan sebuah reaksi terhadap kekuasaan sebagian ‘bahasa’ (baca: Jawa *Kromo*) yang diakomodasi di masa pemerintahan Orde Baru.

Pada masa Otda sekarang ini, dapat dikatakan bahwa ‘puncak-puncak kebudayaan’ provinsi yang salah satunya ditandakan dengan keberadaan bahasa daerah, dipertanyakan ulang karena “wilayah sebuah provinsi adalah produk dari sistem nasional dan dibuat untuk kepentingan administrasi pemerintahan itu, dan bukan produk suatu kelompok etnik” (Kleden-Probonegoro, 2006: 178-9). Ini berarti bahwa ada pertimbangan kembali untuk eksis, terutama bagi kelompok-kelompok etnik yang identitasnya tidak muncul sebagai ‘kebudayaan’ pada era Orde Baru.

¹⁵⁰ Artikel Teoka pada Kompas, Sabtu, 17 Juli 2010.

¹⁵¹ Cetak miring dan tanda [] ditambahkan penulis.

Menyoal kebahasaan yang kaitannya sangat erat dengan keberadaan sebuah kelompok etnik, tulisan ini akan mempertanyakan eksistensi bahasa Jawa Pesisiran¹⁵² di Provinsi Jawa Tengah yang selama ini berkiblat pada bahasa (baca: kebudayaan) Yogya-Solo (Quinn 2010: 209). Pertanyaannya, dalam konteks Otda yang lebih terbuka bagi tampilnya kelompok-kelompok pinggiran, mengapa bahasa Jawa *Ngoko* di Pekalongan dan Jepara diangkat menjadi wacana identitas orang Jawa Pesisiran?

6.2 Jawa Pekalongan dan Jepara dalam Peta Kebudayaan

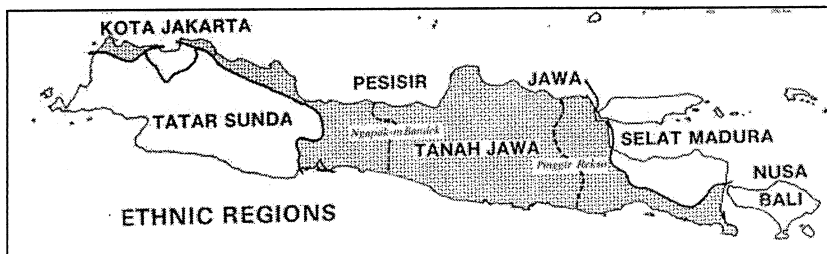
Untuk memahami posisi bahasa Jawa di Pekalongan dan Jepara, akan dijelaskan terlebih dahulu dua tempat tersebut dalam peta kebudayaan Jawa. Gambaran umum tersebut akan memberikan informasi mengenai bahasa Jawa seperti apa yang dituturkan di dua daerah tersebut, termasuk juga wilayah provinsi tempat bahasa tersebut dituturkan. Hal ini penting karena akan memberikan panduan kepada kita mengenai asal mula tarik-menarik identitas orang Jawa Pesisiran yang di dalamnya termasuk Pekalongan dan Jepara, dan orang Jawa Yogya-Solo yang selama ini menjadi standar kejawaan.

6.2.1 Lokasi dan Orang Jawa

Kata *jawa* bisa merujuk pada dua hal yang berbeda, yakni, sebuah pulau dan kelompok etnis. *Pertama*, *jawa* untuk nama sebuah pulau, Pulau Jawa. Ini adalah salah satu pulau utama di Indonesia yang berada di antara Pulau Sumatera, Madura, dan Bali. Saat ini pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia.

¹⁵² Kata *bahasa* digunakan pada kata *bahasa Jawa Pesisiran/ Ngoko* dan *bahasa Jawa Kromo* bukan berdasarkan pertimbangan objektif linguistik yang dibuktikan dengan teknik *leksikostatistik*, tetapi sebagai sebuah pengakuan umum yang dipakai oleh para penuturnya. Mereka biasa menyebut bahasa Jawa *Ngoko* atau bahasa Jawa *Kromo* dibandingkan dengan dialek Jawa *Ngoko* atau dialek Jawa *Kromo*.

Pulau Jawa adalah pulau terpadat di dunia,¹⁵³ yaitu tempat, kira-kira 60% penduduk Indonesia yang luasnya hanya tujuh persen dari seluruh wilayah RI. Begitu banyaknya orang-orang yang tinggal sehingga di pulau tersebut bukan hanya orang Jawa yang ada. Dengan mengabaikan para pendatang dari pulau-pulau lain, di pulau Jawa terdapat suku Jawa, Betawi, Sunda-Banten, dan Cirebon.¹⁵⁴ Dengan gambaran yang kurang lebih sama, Hatley (1984: 3) menyebut ada empat regional etnis di Pulau Jawa, antara lain Kota Jakarta, Tatar Sunda, Pesisir Jawa, dan Tanah Jawa (perhatikan Gambar 6.1).



Gambar 6.1 Peta Wilayah Etnis di Pulau Jawa

Dari peta tersebut, Pesisir Jawa dan Tanah Jawa merupakan dua tempat orang Jawa tinggal dan berasal. Pesisir Jawa ialah daerah pinggiran Jawa yang menghadap pantai Utara. Sementara itu, wilayah Tanah Jawa ialah wilayah pedalaman sampai pantai Selatan Jawa.

¹⁵³ Dikutip dari Laman Koran Baru (<http://koranbaru.com/indonesia-miliki-36-rekor-dunia/>)

¹⁵⁴ Suku Banten dan Cirebon baru-baru saja muncul sebagai identitas yang berbeda dari Sunda, setelah Otda yang menjadikan Provinsi Banten sebagai provinsi dan Cirebon sebagai kota otonom. Salah satu yang menjadi alasan pemekaran mereka adalah bahasa. Provinsi Banten yang sekarang terpisah dari Provinsi Jawa Barat mengklaim bahwa bahasa mereka berbeda dari bahasa Sunda. Demikian juga dengan Cirebon, mereka mengaku berbahasa Cirebon yang tidak sama dengan bahasa Sunda (Wawancara 2009).

Kedua wilayah itu memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Hatley (1984: 4) menjelaskan bahwa Tanah Jawa memiliki karakter budaya pedalaman (*inland*) dan Pesisir Jawa memiliki karakter budaya maritim. Ia juga menambahkan bahwa,

"[t]he pusering Tanah Jawa (navel of the land of Java) is in the terraced inland rice plain of south central Java near Magelang, The ancient and spiritual homeland of the ethnic Javanese. In this core region two Mataram courts set the standards of what we know as Javanese culture. Apart from peasants' preservation of Austronesian and extra-Kraton custom, Java's northern littoral—Pesisir Jawa--, the internationalized gateway through which the outside world has come to Java, has been the chief rival to the Tanah Jawa heart land [...] in shaping Java's identity."

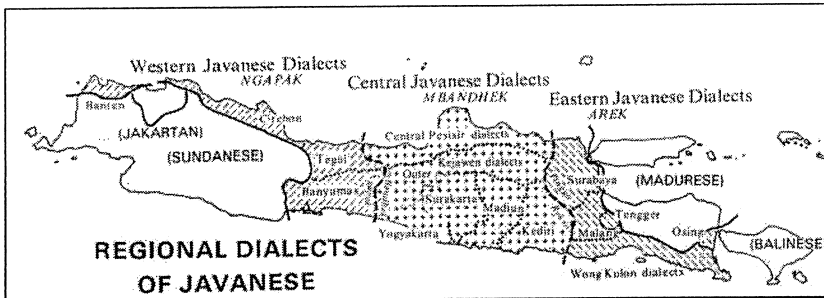
Kutipan itu memaparkan bahwa Tanah Jawa yang akrab dengan kehidupan pertanian (padi) menjadi pusat kebudayaan Jawa karena di dalamnya ada pusat Kerajaan Mataram. Selain itu, dipaparkan pula bahwa daerah Pesisir Jawa menjadi pintu gerbang dunia luar bagi Jawa secara keseluruhan. Namun demikian, ada sebuah catatan penting yang tidak lupa ditambahkan oleh Hatley (*ibid.*) bahwa bagi Tanah Jawa, *things Pesisiran are coarse, durung Jawa, uncivilized.*

6.2.2 Bahasa di Tanah Jawa dan Pesisir Jawa

Seperti halnya kebudayaan Jawa yang beragam, dialek-dialek bahasa Jawa juga demikian. Secara garis besar, ada tiga bagian besar dialek bahasa Jawa, yaitu *Ngapak* di bagian Barat, *Mbandhek* di bagian tengah, dan *Arek* di bagian timur (Hatley, 1984:7).¹⁵⁵ *Pertama,*

¹⁵⁵ Sebagai perbandingan, ada pula pendapat yang berbeda mengenai klasifikasi dialek bahasa Jawa, yaitu klasifikasi dialek geografi oleh E.M. Uhlenbeck (1964). Menurutnya, bahasa Jawa itu ada tiga kelompok, yaitu (1) Barat (dialek Banten, dialek Cirebon, dialek Tegal, dialek Banyumasan, dan dialek Bumiayu (peralihan Tegal dan Banyumas); (2) Tengah (dialek Pekalongan, dialek Kedu, dialek Bagelen, dialek

dialek Jawa di bagian barat disebut *Ngapak* karena memiliki ciri mengucapkan bunyi ‘o’ menjadi ‘a’ dan membunyikan konsonan ‘k’ secara jelas. Bahasa Jawa *Ngapak* ini dituturkan di daerah Cirebon, Tegal, dan Banyumas.¹⁵⁶ *Kedua*, bahasa Jawa *Mbandhek* dituturkan di wilayah tengah dari bagian pesisir pantai utara (Pekalongan, Jepara, Rembang) sampai pantai selatan (Yogyakarta, Madiun, dan Kediri). Bahasa Jawa *Mbandhek* memiliki ciri penggunaan bunyi nasal ‘n’ dan ‘m’ sebelum bunyi ‘d’ dan ‘b’, juga bunyi ‘h’ setelah bunyi ‘d’ dan ‘t’. Terakhir, bahasa Jawa *Arek* digunakan di sebelah timur Jawa, meliputi daerah Surabaya dan Malang. Gambaran lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 6.2 yang dikutip dari Hatley (1984: 20) berikut ini.



Gambar 6.2 Peta Dialek-dialek Bahasa Jawa

Selain pemahaman mengenai tiga kelompok dialek dalam bahasa Jawa, ada pula satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam

Semarang, dialek Pantai Utara Timur (Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati), dialek Blora, dialek Surakarta, dialek Yogyakarta, dan dialek Madiun); 3) Timur (dialek Pantura Jawa Timur (Tuban, Bojonegoro), dialek Surabaya, dialek Malang, dialek Jombang, dialek Tengger, dan dialek Banyuwangi/Bahasa Osing). [dari Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa#Variasi_dalam_bahasa_Jawa].

¹⁵⁶ Tambahan, menurut peta dialek yang dibuat Hatley (1984:24), bahasa Banten juga termasuk bahasa Jawa Ngapak. Namun dalam paparan ini tidak dimasukkan, karena Banten termasuk Tatar Sunda. Ini karena Banten sebelum Otda termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat.

memahami bahasa Jawa, yaitu *undhak-undhuk basa* (selanjutnya disebut UUB). UUB¹⁵⁷ ini setara dengan tata krama berbahasa Jawa. Ada tiga bentuk tata krama berbahasa Jawa, yaitu *ngoko* ("kasar"), *madya* ("biasa"), dan *kromo* ("halus") dan setiap bentuk tersebut terdapat "penghormatan" (*ngajengake, honorific*) dan "perendahan" (*ngasorake, humilific*).

Dalam penggunaannya, UUB ini digunakan bergantung kepada status lawan bicara. Apakah lawan bicara tersebut lebih muda, lebih tua, lebih dihormati, dan lain-lain. Sebagai contoh, anak-anak tidak mungkin menggunakan *Ngoko* terhadap orang tua, karena dianggap tidak sopan. Sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menggunakan *Ngoko* kepada anak-anak dan dianggap sopan.

UUB tidak digunakan di semua tempat yang dianggap tempat asal orang Jawa (dari bagian barat hingga ke timur). Namun, UUB hanya digunakan secara ketat di Surakarta, Yogyakarta, dan Madiun. Sementara itu, tempat-tempat berbahasa Jawa lainnya tidak begitu ketat menggunakan UUB *kromo*, tetapi cenderung menggunakan *Ngoko*.

Berbedanya perilaku berbahasa orang-orang Pesisir dan Tanah Jawa, diduga, disebabkan oleh karakter pesisiran dan pedalaman yang berbeda. Orang pesisiran berkarakter lebih terbuka dibandingkan dengan daerah pedalaman Jawa. Ini karena kota pesisir lebih kerap berinteraksi dengan para pendatang, sehingga penduduk kota pesisir lebih heterogen dibandingkan kota-kota pedalaman (Damayanti, Rully dan Handinoto, 2005: 35).

6.2.3 Bahasa Jawa di Pekalongan dan Jepara

Pekalongan dan Jepara yang menjadi fokus dalam kajian ini berada di daerah pesisiran, tepatnya di Pantai Utara Jawa. Secara administratif, daerah Pekalongan dan Jepara berada di dalam wilayah

¹⁵⁷ Semua paparan diambil dari Laman Wikipedia mengenai Bahasa Jawa yang sudah dirujuk sebelumnya.

Provinsi Jawa Tengah. Provinsi yang beribukota Semarang ini relatif dekat dengan pusat kebudayaan Jawa: Solo-Yogyakarta. Selain dekat, Pekalongan dan Jepara pernah menjadi tempat kedudukan Belanda sebelum sampai ke daerah *Vorstenlanden* 'wilayah-wilayah kerajaan'. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai posisi Pekalongan dan Jepara terhadap Solo-Yogya, dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 6.3 Peta Provinsi Jawa Tengah¹⁵⁸

Ikhwal kedekatan Pekalongan dan Jepara dengan Solo-Yogya dapat ditelusuri lewat sejarah kedudukan dua lokasi tersebut ketika Mataram masih berkuasa. Menurut sejarah, Pekalongan pernah menjadi bagian penting dari Kerajaan Mataram.¹⁵⁹ Tempat itu, oleh Sultan Agung selain digunakan untuk perdagangan laut juga menjadi kantong perbekalan ketika akan melakukan penyerangan melawan Belanda ke Batavia. Sementara itu, Jepara juga pernah menjadi

¹⁵⁸ Sumber: <http://budidarma2009.blogspot.com/>

¹⁵⁹ Diringkas dari http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=105&lang=id

bandar Mataram untuk ekspor dan impor, selain untuk mempertahankan daerah kekuasaan Mataram dari penjajah Belanda saat Batavia runtuh di tahun 1619.¹⁶⁰

Kedekatan Pekalongan dan Jepara dengan pusat kebudayaan Jawa saat ini, disadari atau tidak, dipengaruhi kiblat kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah “dikenal sebagai *pusat budaya Jawa*, di mana di Kota Surakarta dan Yogyakarta terdapat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini”.¹⁶¹ Salah satu bukti kedekatan dalam hal kebahasaan ialah diajarkannya bahasa Jawa dialek Solo-Yogya dengan *undhak-undhuk basa* untuk pelajaran bahasa Jawa di sekolah-sekolah di Pesisir Jawa yang sebenarnya tidak begitu ketat menggunakan UUB dalam kehidupan sehari-hari.

6.3 Dinamika Bahasa Jawa: dari Kolonial hingga Orde Baru

Bahasa Jawa ‘jatuh’ menjadi bahasa daerah sudah sejak berakhirnya *cultuurstelsel*, 1830-1870 (Anderson, 1990).¹⁶² Disebut jatuh karena bahasa Jawa yang dituturkan oleh mayoritas penduduk¹⁶³ jajahan Belanda di Hindia Belanda tidak bisa diangkat menjadi bahasa *lingua-franca*, karena kolonial Belanda membutuhkan bahasa yang dimengerti secara luas di seluruh wilayah Nusantara yang memiliki beragam bahasa etnik. Selain itu, pada kehidupan nyata, bahasa Melayu sudah menjadi *lingua-franca* secara lisan dan tulisan.¹⁶⁴

Sebagai ‘bahasa daerah’, oleh **kolonial Belanda**, bahasa Jawa masih tetap dipakai sebagai alat komunikasi di pulau Jawa, sekaligus

¹⁶⁰ <http://www.ukirjepara.com/benteng-portugis/>

¹⁶¹ http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jawa_Tengah&oldid=3549773

¹⁶² Dikutip dari buku terjemahan Benedict R.O’G. Anderson berjudul *Language Power*. Buku terjemahan berjudul *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia*. Revianto Budi Santosa (Penerjemah).

¹⁶³ Saat ini bahasa Jawa dituturkan oleh 84,300,000 orang di Indonesia (Lewis 2009).

¹⁶⁴ Untuk bahasa tertulis, Anderson (1990) menyebutnya *kapitalisme cetak*.

alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu contoh yang paling menarik dari penggunaan bahasa Jawa digambarkan oleh Anderson (1990: 278-282) pada sosok seorang bupati. Bupati digambarkan sebagai sosok yang menjaga kekuasaan Belanda melalui bahasa. Karena keterbatasan pemerintah kolonial berbahasa, akhirnya bupati yang bilingual/multilingual dan penguasa daerah menjadi wakil Belanda untuk mengatur di daerah yang berbahasa Jawa. Bahasa Jawanya digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama pribumi, sementara bahasa Belanda digunakan untuk berkomunikasi dengan pemerintah kolonial. Dengan keadaan yang demikian, otomatis, bupati menjadi agen yang cukup kuat untuk menghubungkan masyarakat pribumi dan pemerintah kolonial karena ia sendiri merupakan seorang *priyayi* yang dihormati oleh masyarakatnya. Keadaan demikian sangat menguntungkan Belanda dan untuk menjaga posisinya itu penggunaan bahasa *Kromo* dan *Ngoko* yang menggambarkan stratifikasi dalam kebudayaan Jawa dipakai secara amat ketat.

Jawa *kromo* yang menjadi bahasa resmi kaum *priyayi* “dikembangkan terutama untuk menekankan penghierarkian dalam masyarakat Jawa dan “ditumbuhkan di dalam” bangunan besar bahasa Jawa” (Anderson, 1990: 281). Jawa *Kromo* yang merupakan bahasa kehormatan memerlukan pendidikan yang tinggi untuk penguasaan kosa katanya. Prestise sosial yang diindikasikan lewat berbahasa terejawantah dalam penggunaan bentuk *kromo* ini. Di sisi lain, bentuk *Ngoko* yang digunakan secara lebih leluasa dan lugas meniadakan hierarki sosial. Dengan kata lain, diperkuatnya perbedaan kedua jenis wacana bahasa Jawa ini membantu Belanda menguasai Jawa.

Selanjutnya, **pada masa revolusi**, bahasa Jawa menemui masa yang amat tertekan, karena para nasionalis muda yang beretnis Jawa tidak lagi senang dengan bahasanya. Bagi mereka bahasa Jawa tidak mewujudkan semangat egaliterisme yang menjadi salah satu modal kemerdekaan. Sebagai gantinya, mereka menggunakan bahasa Melayu karena dianggap lebih egaliter dan digunakan secara luas di Nusantara. Penggunaan yang luas ini dapat membantu memupuk

persatuan di berbagai wilayah untuk melawan kekuasaan kolonial. Ujung dari penggunaan bahasa Melayu ini ialah “Bahasa ‘Indonesia’ yang mempunyai peran yang sangat penting bagi pembentukan kesadaran nasional di kalangan anak muda Indonesia (Anderson 1990: 265)”.

Pada masa Orde Baru kebudayaan Indonesia seolah-olah mendapatkan tempat yang terhormat dengan dicantumkannya semangat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara Indonesia. Namun demikian, bayang-bayang terpecah belahnya bangsa yang menjadi hambatan kemerdekaan tampaknya masih melekat, sehingga “[k]ebudayaan daerah-termasuk kebudayaan Jawa-dianggap seolah-olah menjadi ancaman terselubung terhadap keutuhan bangsa dan kukuhnya kekuasaan pusat (Quinn, 2010: 207).

Salah satu implementasi proses simbolisasi kebudayaan Indonesia pada komunitas Jawa ialah dengan mengangkat Solo-Yogya sebagai ‘puncak kebudayaan’ Jawa. Secara otomatis, bahasa yang diangkat juga bahasa Jawa Solo-Yogya. Di dalam kurikulum nasional, siswa, khususnya yang berada di sekitar pusat kerajaan Mataram-Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur diberikan pelajaran bahasa Jawa Solo-Yogya yang mengutamakan ragam *Kromo*. Tidak mengherankan bila, kemudian, mereka sibuk mempelajari *unggah-ungguh* berbahasa khas keraton Yogya dan Solo. Sementara itu, ragam bahasa Jawa lainnya yang *Ngoko*-Banyumas, Tegal, Pekalongan, dan lain-lain-cenderung diabaikan.

6.4 Bahasa Jawa Pesisiran Era Otonomi Daerah

Istilah *Bahasa Jawa* mengandung makna yang beragam tergantung pada siapa yang mengatakan. Bagi orang di luar Jawa, bahasa Jawa itu adalah bahasa daerah yang dipakai oleh etnis Jawa, tidak peduli itu *Ngoko* atau *Kromo*. Sementara itu, bagi orang Jawa sendiri, istilah bahasa Jawa tidak selalu melekat pada semua tataran UUB bahasa Jawa. Dengan kata lain, yang disebut dengan bahasa Jawa hanyalah untuk bahasa Jawa *kromo* yang dianggap bahasa yang

bertatakrama dan beretika tinggi. Dengan begitu, bahasa Jawa yang tidak mengenal UUB yang biasanya dipakai di wilayah Jawa pesisiran disebut *durung Jawa*.¹⁶⁵ Untuk kesimpangsiuran penggunaan istilah itu, tulisan ini akan menggunakan istilah *Bahasa Jawa-Pekalongan*, *Bahasa Jawa-Solo/Yogya* dan *Bahasa Jawa-Jepara*, tanpa mengindahkan UUB yang menjadi syarat eksistensi suatu bahasa. Singkatnya, mereka semua dianggap patut disebut bahasa, meskipun sebagian orang Jawa menganggapnya sebagai suatu jenis bahasa yang tidak sopan. Hal lain yang menjadi alasan penggunaan kata *bahasa*, bukan *dialek* (meskipun secara objektif-linguistik disebut dialek), ialah karena melalui penggunaan istilah dialek dikhawatirkan satu kelompok dialek tertentu akan mensubordinasi satu kelompok dibandingkan dialek lainnya.¹⁶⁶

Kemudian, dalam paparan berikutnya akan dibahas persepsi dan tanggapan serta wacana-wacana yang muncul di Pekalongan dan Jepara mengenai bahasa Jawanya, sejak diterapkannya Otda. Dalam keterbatasan data, terutama di Jepara, tulisan ini akan mencoba menguraikan hal-hal penting yang akan membantu memahami bagaimana wacana kebahasaan sebagai wacana identitas kota atau kabupaten.

6.4.1 Bahasa Jawa-Pekalongan Membangun Wacana

Bahasa Jawa-Pekalongan, bagi orang Pekalongan, memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa Yogya-Solo. Yahya (2008: 167), seorang yang mengaku asli Pekalongan berpendapat bahwa “bahasa yang digunakan oleh masyarakat Pekalongan bukanlah bahasa Jawa halus.” Ia menambahkan bahwa bahasa Pekalongan adalah bahasa yang tanggung karena ada di antara bahasa Jawa di timur (Semarang,

¹⁶⁵ “... *from the dominant kejawen interior of Java, things pesisiran are coarse, durung Jawa, uncivilized*” (Hatley, 1984: 4).

¹⁶⁶ Dialek adalah sub dari bahasa, sehingga penyebutan dialek dikhawatirkan sebagai simbol subordinat dari suatu bahasa yang dilegitimasi secara politis.

Yogya, dan Solo) dan bahasa Jawa di barat (Tegal, Brebes, dan Banyumas).

Pendapat lain, Iyeng Santoso,¹⁶⁷ salah seorang penulis *Kumpulan Kata-Kata yang Terlupakan dari Pekalongan*, menyatakan bahwa “bahasa Jawa-Pekalongan lebih tepat disebut dialek dan tidak berhierarki karena hanya ada satu tataran, yaitu *Ngoko*. Lebih jauh lagi, Yahya menambahkan bahwa bahasa Jawa Pekalongan “tidak se’ngapak-ngapak’ Tegal, dan tidak sehalus Semarang.” Di sisi lain, Iyeng berpendapat bahwa bahasa Pekalongan mirip dengan Tegal dan Pemalang. Terlepas dari perbedaan persepsi kemiripan bahasa, keduanya sepakat bahwa Bahasa Jawa-Pekalongan itu *Ngoko* dan bersifat egaliter serta demokratis.

Mendukung pendapat Iyeng dan Yahya tersebut, Masyhudi Sa’an berpendapat bahwa “bergaul dengan orang Pekalongan tidak harus dengan kesopanan. *Ngoko*, *blak-blakan*, tak perlu banyak basa-basi, diselingi kelucuan-kelucuan, tak perlu *unggah-ungguh*, tak ada perbedaan derajat, semua orang dalam kedudukan yang sama” (2008:17). Secara praktik, Iyeng memberikan contoh, di Pekalongan, buruh batik bisa berdiskusi teknik pewarnaan batik dengan tuannya hanya dengan bahasa *Ngoko*. Akan tetapi, di Yogya-Solo hal tersebut pasti tidak terjadi. Dengan demikian, bagi Yahya, Iyeng, dan Mashudi, ciri *Ngoko* bahasa Jawa-Pekalongan merupakan kelebihan karena tidak mensegmentasi orang dalam kelompok-kelompok sosial tertentu ketika berbahasa.

Menyoal wacana identitas Pekalongan yang dibentuk lewat bahasa, ada dua buah buku yang menarik untuk diamati di Pekalongan, yaitu (1) *Pekalongan Inspirasi Indonesia* dan (2) *Kumpulan Kata yang Terlupakan di Pekalongan*. Buku-buku tersebut menarik karena beberapa alasan. *Pertama*, buku tersebut diterbitkan

¹⁶⁷ Data dari Iyeng sebagian didapat dari hasil wawancara *via Facebook* pada tanggal 4 September 2010.

ketika Ulang Tahun Kota Pekalongan ke-102, 2008.¹⁶⁸ *Kedua*, buku tersebut diberi kata sambutan oleh Walikota Pekalongan yang mengindikasikan buku tersebut dianggap penting bagi Kota Pekalongan, yaitu sebagai bagian dari proses pembentukan identitas kota. *Ketiga*, keduanya berisi wacana bahasa sebagai identitas, terutama buku *Kumpulan Kata yang Terlupakan di Pekalongan*.

Buku pertama, *Pekalongan Inspirasi Indonesia* berisi tulisan-tulisan orang Pekalongan mengenai kotanya. Dari fiksi hingga nonfiksi dan dari mitos hingga isu-isu terkini yang hangat terkait dengan Kota Pekalongan. Salah satu wacana yang diangkat, yang berhubungan dengan bahasa, ialah tulisan yang dibuat oleh Mashudi Sa'an. Ia menuliskan pengalamannya mengajar agama Islam di Pekalongan dalam karangan "Bahasa Pengantar di Sekolah Dasar".

Ada catatan penting yang dituliskan oleh Mashudi Sa'an untuk menggambarkan pengalamannya mengajar di Pekalongan bersama teman-temannya. Simpulan itu dituliskan berdasar pada pengalamannya di lapangan yang menemui anak-anak didiknya kebingungan dan tidak komunikatif ketika berbahasa *kromo*.

"Bahasa pengantar pembelajaran adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Ibu. Bahasa Ibu paling komunikatif untuk rata-rata sekolah dasar di Kota Pekalongan adalah bahasa *Ngoko* khas Pekalongan. Artinya, bukan bahasa Jawa halus dan *Kromo Inggil* (2008:19)".¹⁶⁹

Ia seolah menggugat pembuat kebijakan yang lebih mengutamakan bahasa *kromo* untuk pengajaran, karena penggunaan bahasa Jawa halus hanya memberi jarak bagi murid untuk memahami. Selain itu, ia juga seperti menggugat realitas orang Pekalongan yang merasa

¹⁶⁸ Hari Jadi Kota Pekalongan merujuk pada 1 April 1906. (Lihat Paparan mengenai hari ulang tahun Kota Pekalongan pada bab 1 yang berjudul "Menuju Masa Lalu: Catatan-Catatan Mengenai Ruang Sosial Bernama Pekalongan Dan Jepara", yang ditulis oleh Soewarsono).

¹⁶⁹ Dalam *italic* diubahsuaikan oleh penulis

malu dan minder dengan budayanya sendiri. Secara tegas, ia mempertanyakan

“Apakah pembelajaran Bahasa Jawa [Solo-Yogya] harus dipaksakan untuk menjadi salah satu mata pelajaran sekolah? Apakah konsep budi pekerti masyarakat Pekalongan harus ditunjukkan pada kelancaran dalam berbahasa Jawa, sehingga, anak yang tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik dianggap tidak memiliki sopan santun, tidak berbudi luhur? Tentu akan menyalahi prinsip-prinsip keadilan dalam pendidikan (2008:22)”.¹⁷⁰

Untuk membuat pembalikan yang akan berguna bagi dunia pendidikan, terutama anak didik, Mashudi berpendapat diperlukan kesadaran dari bawah, dari orang-orang Pekalongan, untuk bangga dengan bahasanya sendiri dan mulai memikirkan bagaimana cara mengoptimalkan kekhasan kultur masyarakat Pekalongan yang *Ngoko*, terutama untuk proses belajar mengajar. Ia juga mengusulkan untuk dipikirkan bagaimana “melegalkan Bahasa *Ngoko* khas Pekalongan (Bahasa Ibu) sebagai Bahasa Pengantar resmi di Sekolah Dasar, untuk mendampingi Bahasa Indonesia (2008:23)”.

Wacana lain dalam bentuk tercetak yang ada hubungannya dengan kebahasaan ialah diterbitkannya buku *kamus kecil* bahasa Pekalongan, kalau boleh disebut demikian. Buku tersebut hadir hasil dari urun rembuk orang-orang Pekalongan yang ada di luar Kota Pekalongan. Mereka mendirikan OPEK (orang Pekalongan) di tahun 2006 dan melakukan seminar di akhir tahun 2007. Musyawarah tersebut dilakukan untuk menghimpun orang-orang asal Pekalongan yang berada di luar kota untuk ikut memikirkan pembangunan kotanya. Buku itu adalah salah satu hasil dari rembukan OPEK.

Iyeng Santoso¹⁷¹ yang berprofesi dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dan tinggal di Semarang mengaku

¹⁷⁰ Dalam [] ditambahkan penulis.

¹⁷¹ Data-data yang dipaparkan ini didapat dari hasil wawancara dengan Iyeng Santoso, salah seorang penulis buku *Kumpulan Kata-Kata yang*

sebagai penggagas adanya buku ungkapan khas Pekalongan di tahun 1990. Ada beberapa alasan yang mendorongnya membuat buku tersebut. *Pertama*, karena ia prihatin terhadap semakin punahnya bahasa/dialek daerah. *Kedua*, ia merindukan masa kecil di Pekalongan. Waktu itu, ia dilarang berbahasa Pekalongan karena dianggap kasar oleh orang tuanya. *Ketiga*, ia juga terdorong oleh keyakinan bahwa karena bahasa Jawa Pekalongan sangat egaliter sehingga ia memiliki potensi untuk menjalin keakraban dan jaringan di kalangan orang Pekalongan.

Menurutnya, yang paling berperan ialah Askarlo,¹⁷² karena Askarolah yang menyediakan milis bagi alumni SMA Kartini Pekalongan (alumni SMAN I) untuk berkomunikasi secara intens. Dengan adanya milis tersebut, ia menjadi rutin berkontak dengan teman-teman, termasuk Asikin yang saat ini bermukim di Belanda. Dari kontak dengan teman-teman inilah kata demi kata zaman dulu yang sudah terlupakan bermunculan kembali. Sehingga, ketika Iyeng melontarkan ide bikin kamus itu pada tahun 2006, mereka semua mendukung dan banyak menyumbangkan kosa kata. Setelah mengumpulkan selama satu setengah tahun dari berbagai sumber, akhirnya, kerja itu menarik perhatian Bapak Sarwono Hardjomuljadi Sarwono dan Walikota Pekalongan. Mereka kemudian mendukung penerbitan ini melalui pemerintah kota (Pemkot).

Bagi Iyeng, penerbitan buku tersebut bertujuan menyokong agar bahasa Pekalongan bisa populer dan menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah di Pekalongan. Untuk itu, ia bersama teman-temannya masih terus berupaya untuk menyiapkan edisi keduanya yang tidak hanya memuat 3000 kata istilah bahasa Pekalongan, tetapi juga melengkapinya dengan contoh kalimat dan ilustrasi komik lelucon beraudio. Nantinya, setelah terbit, sebanyak 500 eksemplar

Terlupakan dari Pekalongan (2008). Wawancara dilakukan via Facebook pada 4 September 2010, karena beliau tinggal di Semarang.

¹⁷² Himpunan Alumni SMAN 1 Jl. Kartini Pekalongan disebut Askarlo.

kamus akan disumbangkan kepada pemkot untuk dibagikan ke sekolah-sekolah di Pekalongan.

6.4.2 Bahasa Jawa-Jepara: Masih Setia pada Masa Lalu

Bahasa Jawa di Jepara memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan bahasa Jawa Yogya-Solo. Dirgo Sabardiyanto dan tim penelitian yang melakukan penelitian di Kabupaten Jepara menemukan bahwa masyarakat Jepara “lebih banyak mengenal ragam *Ngoko* daripada ragam *Kromo*” (1985:18). Bahasa *Kromo* hanya digunakan pada saat-saat tertentu, seperti perkawinan dan khitanan. Sementara itu, bahasa *Ngoko* digunakan saat santai atau di rumah. Mengenai bahasa ini juga ditambahkan pula oleh salah seorang informan¹⁷³ bahwa generasi muda, saat ini, cenderung berbahasa *Ngoko* dan hanya pegawai, pendidik, dan pekerja formal yang masih menggunakan bahasa *Kromo*.

“Masyarakat Jepara pada umumnya mengatakan bahwa bahasa Jawa dialek Jepara lebih kasar daripada bahasa Jawa baku (Dirgo, 1985:18). Pendapat yang dijangkit pada era Orde Baru itu tidak berubah hingga sekarang, di masa Otda. Alamsyah, salah seorang responden yang ditemui, berpendapat bahwa bahasa Yogya-Solo itu bahasa yang halus, sementara bahasa Jawa di Jepara tidak.¹⁷⁴ Ia juga menambahkan informasi bahwa bahasa Jawa-Jepara memang tidak sama dengan Yogya-Solo, tetapi dekat dengan bahasa Jawa di Semarang, Pekalongan, Kendal, Demak, Kudus, Pati, Purwodadi, dan Blora. Sementara dengan Brebes, Tegal, dan Banyumas, bahasa Jawanya jauh berbeda.

Pada era Otda ini, bahasa Jawa-Jepara sebagai identitas belum mendapat respon dari pemerintah daerah, institusi pendidikan daerah, maupun masyarakatnya. Contohnya di ranah pendidikan, bahasa Jawa-Jepara masih belum mendapatkan tempat di hati

¹⁷³ Data lapangan 2010.

¹⁷⁴ Wawancara 2010.

pendidikannya untuk diangkat sebagai bahasa daerah yang berbeda dari bahasa Jawa Yogya-Solo. Bapak Ell Sunoto, seorang Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk pengajaran muatan lokal di Provinsi Jawa Tengah yang bertugas di Jepara, berpendapat bahwa bahasa Jawa sebagai muatan lokal memang masih berkiblat pada Solo-Yogya. Masih menurutnya, meskipun provinsi sudah memberikan kelonggaran kepada daerah untuk mengembangkan bahasa yang Jawa di kota atau kabupaten, di Jepara masih belum bisa karena belum ada dokumentasi bahasa yang mendukung penyusunan bahan ajar hingga pengadaan tes bahasa. Karena itu, bahasa baku yang khas Solo-Yogya itu yang dipakai sebagai bahan ajar.

6.5 Wacana Identitas Kebahasaan di Kota Batik-Pekalongan dan Kota Ukir-Jepara dalam Konteks Otonomi Daerah

Penggunaan istilah *peisir* dan *pedalaman* untuk membagi daerah di pulau Jawa (lihat gambar 6.1) merupakan alat kolonial Belanda untuk lebih mengukuhkan kekuasaannya dengan mengangkat Yogya-Solo di pedalaman sebagai daerah pusat yang berkedudukan lebih ‘tinggi’ daripada wilayah pesisiran (termasuk Pekalongan dan Jepara) yang berkelas lebih ‘rendah’. Hal ini ditekankan oleh temuan Carrey (1992: 101) yang meneliti kebudayaan masyarakat Jawa di pesisir dan pedalaman pada periode 1600-1830. Ia menyimpulkan bahwa ... *there was no culture ‘centre’ in pre-1825 Java, only competing daerah (regions) each influencing the other.* Ia juga menambahkan bahwa

“ ... right up to the outbreak of the Java War (1825-30), South Central Java, today regarded as the epitome of all that is most refined in Javanese culture, was deeply influenced by passir, particularly East Javanese, art forms. Although this influence may have begun to weaken somewhat with the declain of the great East Javanese emporia like Surabaya and Gresik in the late seventeenth and early eighteenth centuries, it nevertheless remained a

dynamic force until the artificial severance of the core apanage areas of the Central Javanese courts from mancanegara provinces in 1830-31.

Hal lain mengenai ‘pesisir’ yang juga penting dikemukakan ialah pendapat yang dikemukakan oleh Vickers (1993: 72) yang membandingkan gambar kapal pada lukisan di Bali dan kain di Lampung untuk merefleksikan kebudayaan di daerah pesisir. Ia berpendapat bahwa pesisir tidak bisa dipakai sebagai *a definition of the uniform type of society or culture*, tetapi *[i]t is rather a framework or matrix in which certain elements are constant, and others change according to locality*. Ia menegaskan bahwa kebudayaan pesisir itu merupakan penanda kebudayaan yang plural.

Yang terjadi kemudian pada masa Otda di Kota Pekalongan ialah memberikan penekanan pada istilah ‘pesisir’ untuk mengangkat identitas kotanya. Batik yang menjadi ciri khas Kota Pekalongan sekaligus sebagai sumber ekonomi yang penting diangkat dengan menekankan ciri pesisir ini. Oktabirawa, seorang pengusaha batik yang cukup penting di Pekalongan, mengangkat wacana batik pesisiran ini lewat tulisannya “Kota Batik Pekalongan, Bukan Yogya, Bukan Solo ...” di buku *Pekalongan Inspirasi Indonesia* (2008) yang merupakan buku penting bagi bangkitnya Kota Batik Pekalongan. Dalam tulisannya, Oktabirawa (2008: 257-8) berargumen bahwa,

“Batik Pekalongan merupakan bagian dari “Batik Pesisiran”, di samping Cirebon, Tegal Semarang, Juana, Lasem, dan Sidoarjo. Batik pesisiran biasanya bercirikan pada warna yang beraneka ragam dan pemanfaatan motif yang beragam pula, seperti bunga, hewan, ikon, dan lain sebagainya. Sedangkan Batik Solo dan Yogyakarta disebut dengan “Batik Pedalaman” atau “Batik Kerajaan”.

Batik Pedalaman atau Kerajaan mempunyai aturan tersendiri dalam pemanfaatan motif, seperti motif *teruntum*, *sido mukti*, dan *sekar jagad*. Pada zaman dahulu, motif-motif ini hanya bisa dikenakan oleh orang tertentu pula. Dan dalam pewarnaannya pun tidak memanfaatkan

banyak warna. Hanya beberapa warna baku saja yang digunakan, seperti coklat (*sogan*), hitam, dan putih.”

Wacana identitas batik pesisiran yang diangkat pada masa Otda ini kemudian diikuti juga dengan wacana kebahasaan, meskipun bentuknya masih bersifat embrional. Bahasa ini penting untuk diangkat karena memberikan legitimasi bagi keliyanaan dirinya dari Jawa Pedalaman. Walikota Pekalongan (2008: iii), Basyir Ahmad S., dalam sambutan Walikota Pekalongan di buku *Kumpulan Kata-Kata yang Terlupakan dari Pekalongan* menekankan bahwa “[b]uku ini akan sangat berarti karena akan membawa kembali romantisme kita ke masa lalu, ke akar budaya kita sendiri, juga menyadarkan generasi muda untuk menggali kembali, meneruskan, dan mengembangkan identitas kita yang sudah terbentuk sejak dulu tetapi mulai terlupakan”. Sifat embrional yang berhubungan dengan legitimasi identitas maksudnya ialah bahwa Kota Pekalongan menggunakan bahasa masih pada tahap awal karena ‘mulai terlupakan’. Selain itu, dibandingkan dengan keberadaan bahasa Jawa Yogya-Solo, bahasa Jawa Pekalongan belum memiliki buku struktur bahasa yang memadai untuk dipakai di sekolah-sekolah sebagai bahan ajar muatan lokal. Hal lain juga yang masih berhubungan dengan sifat embrional ialah tanggapan dari orang asli Pekalongan yang tidak saja menyimpan rasa malu terhadap bahasanya, tetapi juga mengkhawatirkan kepunahan bahasa mereka. Ningsih (dalam Santoso dan Sukmadiputra 2008: xviii), seorang pegawai karcis bus Semarang-Pekalongan asal Kergon, Pekalongan, menulis kesannya terhadap penerbitan buku *Kumpulan Kata-Kata yang Terlupakan dari Pekalongan*

“hidih, lucu sekali, ada kamus bahasa Pekalongan ... padahal banyak yang menganggap bahasa Pekalongan itu bahasa yang ndeso, kampungan, pokoknya bahasanya rakyat. Ini malah dibuat buku ... saya ikut senang dan ingin memilikinya. Memang sayang kalau bahasa Pekalongan sampai punah”.

Terbitnya buku yang mengangkat kebahasaan yang khas Jawa Pekalongan ini masih akan terus berlanjut dengan edisi revisi yang akan terbit pada tahun 2010. Ini artinya bahwa bahasa sebagai identitas Pekalongan di era Otda masih akan terus diangkat sebagai isu penting. Apalagi, batik sebagai produk andalan ekonomi Kota Pekalongan mendapatkan peran strategis dengan diangkatnya batik sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009.

Berbeda dari Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara yang juga memiliki industri kreatif ukir mengalami kemunduran pascakrisis ekonomi tahun 1999. Hasil ukir Jepara yang mengalami *booming* pada tahun 1999, ternyata menghadapi kendala karena bahan baku kayu sulit didapat dan harganya sangat mahal seiring dengan meningkatnya harga dollar terhadap rupiah. Dengan demikian, pada masa Otda ini, citra Jepara sebagai Kota Ukir tidak bisa dipertahankan lagi dan sebagai alternatif, Kabupaten Jepara mengangkat identitas 'baru tetapi lama', yaitu Jepara Bumi Kartini yang seolah 'mengembalikan' Jepara pada masa kolonial.

BAB VII

KESIMPULAN¹⁷⁵

Transformasi sosial di wilayah perkotaan sangat terkait erat dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada komunitas yang tinggal di wilayah itu yang bertumbuh menjadi sebuah “komunitas urban”. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya di bagian Pendahuluan (Bab I), kota --seperti dikatakan Kotkin (2006)-- merupakan sebuah hasil karya terbaik (*masterpiece*) dari peradaban manusia karena merupakan sebuah ruang yang mampu merepresentasikan keindahan ekspresi ide, keyakinan, serta keterampilan manusia. Artinya, kota bukan sebuah ruang fisik yang kosong dan mati, melainkan sebuah ruang yang hidup, khususnya sebagai sebuah arena yang memungkinkan proses sosial dan hasil interaksi yang berkesinambungan antara manusia penghuni kota dengan lingkungan tempat tinggalnya berlangsung. Dari proses itu selanjutnya dihasilkan produk-produk kebudayaan yang juga merupakan hasil kreasi dan ketrampilan manusia warga kota. Dalam hal ini, identitas kota Pekalongan dan Jepara sebagai ‘Kota Batik’ dan ‘Kota Ukir’ adalah penanda bagaimana hubungan penghuni kedua kota tersebut dengan tempat tinggalnya diikat oleh produk kebudayaan hasil karya mereka, yaitu batik dan ukir.

Beragamnya warga sebuah kota dilihat dari variabel etnis, agama, profesi, dan kriteria lainnya merefleksikan betapa kompleksnya relasi kekuasaan dalam sebuah kota. Pada dasarnya, ada dua bentuk kekuasaan yang sangat mempengaruhi interaksi sosial di dalam ruang kota, yaitu kekuasaan individu dan juga kekuasaan kelompok. Yang terakhir ini, menurut pandangan kaum strukturalis, umumnya terbagi dalam kelompok pemerintah (negara), kelompok borjuis, dan kelompok proletar. Fenomena pembangunan sebuah kota

¹⁷⁵ Ditulis oleh Aulia Hadi dan Thung Ju Lan.

menunjukkan bahwa pemerintah sebagai wakil negara kerap kali mendominasi kekuasaan yang ada, dan ini tampak dari berbagai peraturan yang dibuatnya. Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah serta UU revisinya No. 32 Tahun 2004, misalnya, memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan sebuah ruang yang bernama ‘kota’.

Otonomi Daerah telah memicu terjadinya pemekaran atau pemisahan ruang-ruang yang sebelumnya ada. Pekalongan yang menjadi objek dalam penelitian ini, misalnya, mengalami pemisahan antara kabupaten dan kota. Akibatnya, Kabupaten Pekalongan harus memindahkan ibukotanya dari wilayah yang kini disebut ‘Kota Pekalongan’ ke daerah baru bernama Kajen yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kedua wilayah, baik kota maupun kabupaten, harus berbagi nama, yaitu Pekalongan, sehingga keduanya berupaya untuk merepresentasikan diri dengan identitas yang ‘berbeda’, salah satunya melalui penetapan hari jadi. Kota Pekalongan menetapkan hari jadinya berdasarkan tanggal pembentukan *gementee-gementee* oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu pada 1 April 1906. Oleh sebab itu, hari jadi Kota Pekalongan menjadi sama dengan hari jadi Kota Blitar yang juga menggunakan penetapan pembentukan *gementee* oleh Belanda tanggal 1 April 1906 itu sebagai hari jadinya. Sementara itu, Kabupaten Pekalongan memilih hari jadinya pada tanggal 25 Agustus sesuai dengan hari pengangkatan Bupati Pekalongan I, Kyai Mandoeraredja, oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Islam pada 25 Agustus 1622. Kendati Kota dan Kabupaten Pekalongan menetapkan hari jadi yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam menentukan hari jadi, yaitu “menuju masa lalu” yang sangat jauh ke belakang hingga di luar konteks Negara Indonesia Merdeka. Persoalan ini dibahas secara lebih rinci pada Bab II yang berjudul “Menuju Masa Lalu: Catatan-catatan Mengenai Ruang Sosial Bernama Pekalongan dan Jepara”.

Menilik sejarah masa lalu, Pekalongan dan Jepara dapat disandingkan karena sama-sama menjadi salah satu pusat peradaban Islam di Jawa, serta menjadi kota bandar yang sangat termasyhur.

Akan tetapi, jika kini Kota Pekalongan berbangga dengan kehadiran Belanda di masa lalu di kotanya yang dibuktikan dengan penetapan hari jadi sesuai dengan hari pembentukan *gementee*, maka kehadiran Belanda di Jepara di masa lalu justru menjadi penanda kemunduran bagi Jepara. Hal ini terjadi karena Pemerintah Hindia Belanda memindahkan lokasi pelabuhan dari Jepara ke Semarang sehingga secara perlahan-lahan Jepara meredup.

Di era pembangunan Orde Baru, kedua kota tersebut berhasil mengembangkan industri kreatif yang cukup maju, yaitu industri batik dan industri ukir. Hasil penelitian tentang Pekalongan dan Jepara melalui basis perekonomiannya tersebut berhasil melihat keterjalinan antara tempat dan kebudayaan. Seperti telah dijelaskan di Bab III, produk kebudayaan yang dihasilkan oleh sebuah kota -- seperti dikatakan Scott (1997) -- bisa berawal dari sektor-sektor manufaktur yang bersifat tradisional yang mengalami transformasi dari bahan mentah menjadi produk yang berkualitas (seperti pakaian, mebel, dan perhiasan) setelah melalui proses produksi tertentu. Jasa-jasa turisme, teater, iklan, penerbitan buku, dan film adalah beberapa contoh dari produk kebudayaan yang kehadirannya seringkali memiliki hubungan khusus dengan kota di mana produk kebudayaan itu diproduksi. Untuk Pekalongan dan Jepara, batik dan ukir adalah produk kebudayaan dimaksud.

Pengklaiman dan penguatan identitas “kota” atas dasar warisan budaya itu memang bisa memberikan keuntungan kompetitif yang lebih besar kepada kota yang bersangkutan, dan hal inilah yang terjadi pada Pekalongan sebagai sebuah kota lintasan di jalur Pantura bagian tengah. Ungkapan batik adalah ‘jiwa’ Kota Pekalongan secara jelas menunjukkan betapa pentingnya keberadaan batik sebagai sumber penggerak ekonomi masyarakat Kota Pekalongan, bahwa tanpa batik Kota Pekalongan akan mati. Walaupun tidak ada ungkapan yang sama untuk Jepara, tapi fungsi industri ukir di kota ini pun kurang lebih sama saja, karena industri ukir adalah sumber penggerak ekonomi kota Jepara yang utama. Ulasan tentang kaitan identitas kota dengan derap kehidupan ekonominya di kedua tempat

tersebut diuraikan pada Bab III dengan judul “Pekalongan dan Jepara, Kota-Kota Pantai yang ‘Berbatik’ dan ‘Berukir’: ‘Modern-isasi’ Warisan Tradisional”. Kemunculan supermarket-supermarket, bank-bank, serta jasa-jasa warung. Internet di antara toko-toko lama sekitar sepuluh tahun terakhir ini menandakan perubahan dan kemajuan yang cukup pesat telah terjadi di kota Pekalongan. Akan tetapi perubahan fisik tersebut belum menunjukkan suatu transformasi sosial yang signifikan, karena tidak banyak yang berubah dalam hal masyarakatnya, khususnya karakteristik orang Pekalongan sebagai pedagang dan pengusaha batik. Gerak transformasi sosial yang lebih lambat lagi terlihat di Jepara. Ia bahkan bisa disamakan dengan apa yang dikatakan Hans-Dieter Evers sebagai "*a city without urbanism*".

Globalisasi yang memudahkan arus orang, barang, maupun modal di tingkat internasional semakin meningkatkan kompetisi antarkota, baik di tingkat nasional dan tentunya internasional. Artinya, arus modal baik nasional maupun internasional sangat sulit untuk dihindari dalam perkembangan kota masa kini. Akan tetapi, sesungguhnya hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja dalam sebuah kota tidak sepenuhnya ditentukan oleh modal semata, tetapi juga oleh pola hubungan antar kelompok-kelompok penghuni kota yang telah disebutkan di atas. Itulah sebabnya pembahasan di bagian selanjutnya difokuskan pada dua komponen utama dalam struktur tenaga kerja yang terlibat dalam industri batik Pekalongan dan mebel-kayu Jepara, yaitu kelompok pengusaha dan kaum pekerja atau buruh, yang apabila mengikuti istilah kaum strukturalis di atas dikelompokkan sebagai kelompok borjuis dan kelompok proletar. Pembahasan tentang hal ini dipaparkan dalam Bab IV dengan judul "Pengusaha dan Buruh Jawa-Muslim dalam Industri Kreatif di Pekalongan dan Jepara". Secara umum tampak bahwa pola pemilikan modal dan sistem manajemen pada kedua industri tersebut masih bertumpu pada keluarga dan struktur wirausaha kecil (*small scale entrepreneur*), sehingga menjadikan hubungan antara pemilik dan buruh dalam industri batik dan mebel-kayu bersifat "kekeluargaan", "negotiable", dan cenderung bersifat "*patron-client relationship*".

Dalam hubungan seperti ini, buruh tidak memiliki posisi tawar, dan nasibnya sepenuhnya tergantung pada pemilik atau pengusaha industri di mana mereka bekerja. Oleh karena itu mereka tidak berdaya menolak sistem kerja borongan atau “*sub-contracting*” yang diterapkan banyak pengusaha karena menguntungkan bagi perusahaan, walaupun sistem tersebut sangat merugikan buruh. Posisi tawar yang lemah dan ketergantungan yang tinggi kepada pengusaha mempengaruhi rendahnya kesadaran buruh untuk berorganisasi. Negara – dalam hal ini pemerintah daerah – juga memiliki ketergantungan secara politik dan ekonomi terhadap kelompok pengusaha, karena organisasi sosial maupun partai politik dikuasai oleh para pengusaha Jawa-Muslim. Oleh karena itu, sulit untuk dibantah bahwa buruh industri batik di Pekalongan dan mebel kayu di Jepara – sebagai bagian dari mayoritas warga kota – merupakan kelompok penduduk yang paling tereksplotasi secara ekonomi dan termarginalisasi secara politik di Pekalongan dan Jepara. Dengan demikian, menjadi jelas pula bahwa dalam hal pola hubungan antara pemilik modal dan buruh pekerja belum terjadi transformasi sosial ke arah hubungan industrial yang lebih kompleks yang biasa mengikuti perkembangan sebuah kota menjadi “kota modern” (seperti Jakarta dan Surabaya) yang mempunyai peran yang signifikan dalam jaringan nasional dan global.

Perbincangan tentang “penguasa kota” merupakan sebuah topik yang menarik dan merupakan salah satu fokus dari penelitian ini. Diskusi tentang hal tersebut bertambah menarik ketika membicarakan keberadaan kelompok masyarakat Arab dalam “ruang-ruang” kota. Berbeda dengan kelompok masyarakat Cina, kelompok masyarakat Arab memiliki irisan identitas dengan kelompok masyarakat pribumi sebagai “Muslim” yang membuat hubungan keduanya lebih “cair”. Akan tetapi, adanya sebuah wilayah yang disebut sebagai “kampung Arab”, khususnya di kota Pekalongan, menunjukkan adanya “ruang sosial” yang cenderung tertutup dan mengindikasikan penguasaan sebagian “ruang kota” oleh kelompok tertentu. Hal tersebut juga memperlihatkan adanya pola

hubungan kekuasaan atas dasar etnis di antara penduduk kota yang perlu dicermati lebih jauh.

Konstruksi identitas komunitas Arab menarik untuk dibaca karena konstruksi identitas tersebut sangat mempengaruhi partisipasi mereka, terutama bagi kota tempat tinggalnya. Melalui paparan di Bab V yang berjudul “Konstruksi Identitas Masyarakat Arab di Pekalongan dan Jepara: Signifikansinya terhadap Industri Kreatif”, dapat dilihat cara pengidentifikasian diri kelompok masyarakat Arab di Pekalongan yang lebih tegas dan jelas daripada kelompok masyarakat Arab di Jepara. Kelompok masyarakat Arab di Pekalongan dapat dengan tegas menyatakan dirinya sebagai “orang Indonesia keturunan Arab Pekalongan”, sementara hal itu tidak tampak pada orang-orang Arab di Jepara karena memang kebanyakan dari mereka berasal dari berbagai daerah di luar Jepara dan baru menghuni Jepara selama satu dekade terakhir. Akibatnya, terdapat perbedaan dalam peran kelompok masyarakat Arab di kedua tempat tersebut. Batik Pekalongan sebagai salah satu produk tekstil sekaligus kebutuhan dasar masyarakat sangat menarik bagi kelompok masyarakat Arab sehingga keterlibatan mereka pun menjadi nyata dan cukup signifikan dalam pengembangan industri batik Pekalongan. Sementara itu, ukir Jepara yang membutuhkan waktu perputaran modal yang lama bukanlah komoditas yang diminati oleh kelompok masyarakat Arab, sehingga peran kelompok masyarakat Arab kurang signifikan dalam pengembangan industri ukir Jepara.

Otonomi Daerah telah memberi peluang yang besar bagi daerah untuk kembali memposisikan identitas kedaerahannya. Sebagai salah satu alat reposisi identitas, bahasa menarik untuk dipelajari karena ia menjadi penanda identitas kelompok masyarakat yang khas. Wacana identitas batik pesisiran di Pekalongan yang diangkat mengikuti Otonomi Daerah, misalnya, diikuti pula dengan berkembangnya wacana kebahasaan, meskipun bentuknya masih bersifat embrional. Dalam Bab VI secara khusus dibahas masalah bahasa ini, tepatnya tentang “Bahasa Jawa Pesisiran dan Perkembangannya di Pekalongan dan Jepara”. Berbeda dari Kota

Pekalongan, Kabupaten Jepara yang juga memiliki industri kreatif ukir mengalami kemunduran pascakrisis ekonomi tahun 1999. Hasil ukir Jepara yang mengalami *booming* pada tahun 1999, ternyata menghadapi kendala karena bahan baku kayu sulit didapat dan harganya sangat mahal seiring dengan meningkatnya harga dollar terhadap rupiah. Dengan demikian, pada masa Otonomi Daerah ini, citra Jepara sebagai Kota Ukir, walaupun tidak hilang tetapi tidak bisa dipertahankan sebagai identitas kota yang secara politik signifikan. Oleh karena itu, sebagai alternatif, Kabupaten Jepara mengangkat identitas ‘baru tetapi lama’, yaitu Jepara Bumi Kartini, sehingga Jepara seolah-olah telah ‘dikembalikan’ pada masa lalu yang “lebih baik”. Padahal, pada kenyataannya hal itu sama sekali tidak terjadi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian yang dirangkum dalam lima bab dalam topik-topik yang beragam tersebut telah berhasil memperlihatkan transformasi yang terjadi di Pekalongan dan Jepara, khususnya dalam keterjalinan antara tempat dan budaya sebagaimana direfleksikan melalui identitas kota. Pada dasarnya transformasi yang terjadi --khususnya untuk masyarakat Kota Pekalongan-- baru sebatas perubahan fisik karena pola hubungan yang ada, seperti antara buruh dan penguasa, masih mengikuti pola lama. Perubahan secara simbolik melalui pengukuhan maupun perubahan identitas kota pun pada praktiknya belum diikuti oleh transformasi sosial yang mencakup perubahan-perubahan yang lebih mendasar. Hal itu dikarenakan pengukuhan tersebut dilakukan oleh pemerintah kota, tanpa memperhatikan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Hal itu terlihat lebih jelas lagi dalam kasus Jepara, karena seperti telah kita diskusikan di atas, tidak terlalu jelas keterkaitan antara identitas Jepara sebagai “Bumi Kartini” dengan dinamika kehidupan komunitas Jepara yang bertumpu pada pengembangan seni ukir. Mengapa identitas “Bumi Kartini” itu yang dikedepankan jika gerak hidup kota sama sekali tidak ditentukan oleh hal itu? Memang ada masa lalu yang membanggakan, akan tetapi hal itu tidak mempunyai kesinambungan dengan masa depan kota. Dengan demikian, simbol kota menjadi sesuatu yang tidak benar-benar berarti atau semu.

Sebagaimana hasil penelitian kami di Cirebon dan Gresik di tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa untuk kasus Pekalongan dan Jepara pun penguasaan dan pemaknaan kota yang sangat menentukan perkembangan sebuah kota sepertinya masih sangat didominasi oleh elit pemerintah, sehingga belum bisa dikembangkan sesuai kebutuhan warga kota. Hal ini dikarenakan warga kota kelas bawah, khususnya kaum buruh atau kelompok proletar yang jumlahnya di Pekalongan dan Jepara cukup besar tidak mempunyai posisi tawar yang kuat untuk ikut “mengatur” kota, walaupun mereka lah yang sesungguhnya “mewarnai” kota dalam kehidupan keseharian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidy. 2005. "Pola Penyebaran Taman Kota Dan Peranannya Terhadap Ekologi Di Kota Jepara." Skripsi Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1 Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan, Jurusan Teknik SIPIL Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
- Abdullah, Taufik (ed.). 1979. *Agama, Etos Kerja dan Pembagunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, Yayasan Obor dan LEKNAS-LIPI.
- Adji, Murtomo, B. 2008. "Arsitektur Kolonial Kota Lama Semarang". *Enclosure* Vol. 7. No. 2. [http://eprints.undip.ac.id/20151/1/ 1.pdf](http://eprints.undip.ac.id/20151/1/1.pdf) (Diakses November 2010).
- Affandi, Raga. 2008. "Memandang Pekalongan dari Tanah Abang". dalam Aka, Emirul Chaq, dkk. (ed.). *Pekalongan Inspirasi Indonesia*. Pekalongan: Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Bekerja Sama dengan The Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia.
- Aka, Emirul Chaq, Ibnu Novel Hafidz, Imam Budhi Santosa, dan Taufiq Emich (ed.). 2008. *Pekalongan: Inspirasi Indonesia*. Pekalongan: Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, The Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia.
- Anderson, Benedict R. O'G. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Andrés, Perezalonso. 2006. *Not Just about Oil: Capillary Power Relations in the US as the Motives behind the 2003 War on Iraq*. <http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/perezalanso.pdf>. (Diakses April 2010).

- Astuti, Sri Puji. 2002. "Rumah Tinggal Etnis Keturunan Arab di Pekalongan: Kajian Organisasi Ruang Rumah Tinggal Etnis Keturunan Arab di Kelurahan Sugihwaras, Kampung Arab, Pekalongan". Tesis Universitas Diponegoro. Tidak diterbitkan. <http://eprints.undip.ac.id/11781/1/2002MTA1370.pdf>. (Diakses Oktober 2010).
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan. 2009. *Kota Pekalongan dalam Angka 2008*. Pekalongan: Bappeda dan BPS Kota Pekalongan.
- Bale, Djanen (ed.). 1995. *Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota Pelabuhan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bruner, Edward M. 1974. "The Expression of Ethnicity in Indonesia," dalam Abner Cohen (ed.). *Urban Ethnicity*. London: Tavistock Publications Limited.
- Cahyono, Edi. Tanpa Tahun. "Karesidenan Pekalongan Kurun Cultuurstelsel: Masyarakat Pribumi Menyongsong Pabrik Gula." <http://members.fortunecity.com/edicahy/thesis/bab3.htm>. (Diakses Juli 2010).
- Carey, Peter. 1992. "Core and Periphery, 1600-1830: The Pasisir Origins of Central Javanese 'High Court' Culture," dalam Bernhard Dham (ed.). *Regions and Regional Developments in the Malay-Indonesian World*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Castles, Lance. 1967. *Religion, Politics and Economic Behaviour in Java: The Kudus Cigarette Industry, Cultural Report Series No. 15*. New Haven: Yale University, Centre for Southeast Asian Studies.
- Coppel, Charles A. 1983. *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur & New York: Oxford University Press.

- Damayanti, Rully dan Handinoto. 2005. "Kawasan 'Pusat Kota' dalam Perkembangan Sejarah Perkotaan di Jawa", dalam *Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol.33:1, Juli 2005.
- Darma Budi. 2010. "Peta Jawa Tengah," dalam Laman *Tokoh Sastra Bandingan 2003*. <http://budidarma2009.blogspot.com/>. (Diakses Sepetember 2010).
- Dinas Kominparda Kota Blitar. 2003. "Sejarah Kota Blitar" dalam *Blitarkota.go.id*.
http://www.blitar.go.id/v7/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=53. (Diakses Juli 2010)
- Dirgo Sabardiyanto, Suwandji, Slamet Riyadi, Leginem, dan Samid Sudira. 1985. *Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Jepara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- EHAKA. 2006. "Kecelakaan Sejarah yang Indah, Rabu. http://www.kospinjasa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=46. (Diakses Oktober 2010)
- Evers, Hans-Dieter. 2007. "The end of Urban Involution and the Cultural Construction of Urbanism in Indonesia," dalam *Internationales Asienforum*, Vol. 38 (2007), No. 1-2, pp. 51-65. http://mpira.ub.uni-muenchen.de/7566/1/MPRA_paper_7566.pdf. (Diakses April dan Oktober 2010)
- Geertz, Clifford. 1963. *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns (Comparative Studies of New Nations)*. London: The University of Chicago Press.
- Handinoto. 1998. "Perubahan Besar Morfologi Kota-Kota Di Jawa Pada Awal dan Akhir Abad ke-20," dalam *Dimensi Arsitektur*, Vol. 26.
- Handinoto & Samuel Hartono. Tanpa Tahun. "Pengaruh Pertukangan Cina pada Bangunan Masjid Kuno di Jawa abad 15-16".

http://pportfolio.petra.ac.id/user_files/81005/MASJID%20KUNO%20DI%20JAWA%20ABAD%2016.pdf. (Diakses Oktober 2010)

- Hatley, Ron. 1984. "Mapping Cultural Regions of Java". Dalam *Other Javas Away From The Keraton*. Monash: Monash University.
- Hayati, Chusnul. 2010. "Perkembangan Industri Batik Pekalongan tahun 1860-1970", dalam Sri Margana dan Widya Fitriyaningsih (eds.) *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global. Persembahan Untuk 70 Tahun Prof. dr. Djoko Suryo*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- _____. 2009. "Perkembangan Industri Batik Pekalongan Tahun 1860-1970," dalam Margana, Sri, dkk. (ed.). *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern*. Sleman: STPN Press bekerja sama dengan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta.
- Iim Mulyana. 2010. "Pengaruh Pertukangan Cina pada Bangunan Masjid Kuno di Jawa. <http://humaspdg.wordpress.com/2010/06/01/pengaruh-pertukangan-cina-pada-bangunan-masjid-kuno-di-jawa/>. (Diakses Oktober 2010)
- Ilyas, Achmad. 2008a. "Dari Kwijan sampai Sarung Encim". dalam Emirul Chaq Aka, dkk. (Ed). *Pekalongan Inspirasi Indonesia*. Pekalongan: Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Bekerja Sama dengan The Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia.
- _____. 2008b. "Wajah Kosmopolitan dan Batik Pekalongan" dalam *BatikJlamprang*. <http://batikJlamprang.multiply.com/journal/item/1>. (Diakses Oktober 2010)
- Indra. 2009. "Pekalongan Kota Batik" dalam *Tentang Indonesia: Kolom Umum*. <http://indonesia-life.com/kolom/wforum.cgi?>

no=432&reno=no&oya=432&mode=msgview&list=new.
(Diakses Juli 2010).

- Kesheh, Natalie Mobini. Tanpa Tahun. *Hadrami Awakening*. Diterjemahkan oleh Ita Mutiara dan Andri. 2007. Hadrami Awakening: Kebangkitan Hadhrami di Indonesia. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Kleden-Probonegoro, Ninuk. 2006. "Tanda Budaya Provinsi dan Politik Identitas," dalam *Wacana Politik dan Budaya di Masa Transisi*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Koenthi, Ishviati Joenaini. 1999. "Persepsi Masyarakat Perajin dan Industri Ukir Kayu Jepara terhadap Investasi Asing dan Posisi Tawar Menawar dalam Perjanjian Kerjasama", Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kotkin, Joel. 2006. *The City: A Global History*. <http://books.google.com/books?id=Nfu4AAAAIAAJ&q=Kotkin&dq=Kotkin&cd=2>. (Diakses April 2010)
- Kramsch, Claire. 1998. *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Kulmala, Anuchit, Paiboon Boonchai & Kantapon Samdaengdecha. 2009. "Developing Value Added Bamboo Handicraft in the Lower Northern Provinces in Thailand," dalam *European Journal of Social Sciences, Volume 10:3*, hal 374-381. http://www.eurojournals.com/ejss_10_3_04.pdf. (Diakses September 2010)
- Kusuma, Ganjar Triadi Budi (Ed). 2008. *Mengabdikan Tanpa Henti*. Pekalongan: Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Pekalongan.
- Lefebvre, Henri. 1974. *The Production of Space*. http://www.iaacblog.com/2008term01/course03/wp-content/uploads/2008/11/lefebvre_presentation_part2. (Diakses Januari 2010)

- Lewis, M. Paul (ed.). 2009. *Ethnologue: Languages of the World*, Edisi 16. Dallas, Texas: SIL International. Dalam Laman: <http://www.ethnologue.com/>. Diakses September 2010.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu, Bagian II: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, Forum Jakarta-Paris, École Française d'Extrême-Orient.
- Maier, H.M.J. 1993. "From Heteroglossia to Polyglossia: The Creation of Malay and Dutch in the Indies." dalam *Indonesia*, No. 56.
- Makhasin, Luthfi. 2006. "[Re]-Interpreting Javanese Society: Cultural Determinism and Political Economy". Tidak Diterbitkan, Forum Lafadl.
- Maryati. 2008. "Gajah Duduk dan Citra Kota Pekalongan". dalam Aka, Emirul Chaq, dkk. (ed.). *Pekalongan Inspirasi Indonesia*. Pekalongan: Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Bekerja Sama dengan The Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia.
- Masyudi Sa'an. 2008. "Bahasa Pengantar di Sekolah Dasar". Dalam *Pekalongan: Inspirasi Indonesia*. Pekalongan: Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, The Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia.
- McGee, Terry.G. 1967. *The Southeast Asian City*. London: G. Bell and Sons.
- Murod, Abdul Choliq. 2010. "Tarekat Qadiriah wa Naqsyabandiah di Mranggen Demak dan Pandangan Kiai Tarekat tentang Nasionalisme Tahun 1945 – 2005". Tesis Master. Universitas Diponegoro. Tidak Diterbitkan.

- Nas, Peter J.M. 1984. *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Nas, Peter J. M. & Pratiwo. 2002. *Java and De Grootte Postweg, La Grande Route, the Great Mail Road, Jalan Raya Pos*, www.kitlv-journals.nl. (Diakses Maret 2010)
- Oktabirawa, Romi. 2008. "Kota Batik Pekalongan, Bukan Jogja, Bukan Solo," dalam Aka, Emirul Chaq, dkk. (ed.). *Pekalongan Inspirasi Indonesia*. Pekalongan: Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Bekerja Sama dengan The Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia.
- Pantura Community. 2010. "Asal-usul Kota Pekalongan" dalam *Pantura*. <http://pantura.org/berita-menarik/asal-usul-kota-pekalongan/>. (Diakses Juli 2010).
- _____. 2010. "Sejarah Singkat Penentuan Hari Jadi Kota Pekalongan 1 April 1906" dalam *Pantura*. <http://pantura.org/berita-menarik/asal-usul-kota-pekalongan/10/?PHPSESSID=5eafb6837a54d8900e1f74dd4f78879c:wap2>. (Diakses Juli 2010).
- Para kontributor Wikipedia. 2010. "Kota Pekalongan," dalam *Wikipedia*., http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Pekalongan&oldid=3669120. (Maret 2010)
- _____. 2010. "Kabupaten Jepara," dalam *Wikipedia* [.http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Jepara&oldid=3653647](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Jepara&oldid=3653647). (Maret 2010).
- Para Kontributor Wikipedia. 2010. "Bahasa Jawa," dalam Laman *Wikipedia*. http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Jawa&oldid=3499405. (Diakses September 2010).
- _____. Tanpa Tahun. "Jawa Tengah," dalam Laman *Wikipedia*. http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jawa_Tengah&oldid=3549773. (Diakses September 2010).
- Patji, Abdul Rachman. 2009. "Peranan Masyarakat Arab Hadrami di Pantai Utara Jawa," dalam Riwanto Tirtosudarmo (ed.).

Transformasi Sosial: Studi Perbandingan Dua Kota: Cirebon, Jawa Barat dan Gresik, Jawa timur). Draft laporan yang segera diterbitkan.

- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 2006. "Day Become Pekalongan Regency," dalam *Kabupaten Pekalongan*. http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=105. (Diakses Juli 2010).
- _____. 2006. "Sejarah Kabupaten Pekalongan," dalam *Sejarah*. http://www.pn-jepara.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5:sejarah-kab-jepara&catid=67:sejarah-jepara&Itemid=78. (Diakses Juli 2010).
- _____. 2006. "Meninjau Hari Jadi Pekalongan" dalam *Kabupaten Pekalongan*. http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=82. (Diakses Juli 2010).
- _____. 2006. "Masa Mataram Islam," dalam Laman Kabupaten *Pekalongan*. http://www.pekalongankab.go.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=105&lang=id. (Diakses September 2010).
- Piccione, Michele dan Razin Ronny. 2009. *Coalition Formation under Power Relations*. <https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/17330/1/447-2288-1-PB.pdf>. (Diakses April 2010)
- Pratiwo. 2004. "The City Planning of Semarang 1900-1970". The 1st International Urban Conference, Surabaya, 23rd-25th 2004. <http://www.indie-indonesie.nl/content/documents/papers-urban%20history/pratiwo.pdf>. (Diakses Juli 2010).

- Probonegoro, Ninuk Kleden, dan Zultanawar, 1996, "Etos Kerja Pengrajin Batu Permata Banjar: Pendekatan Antropologi". Laporan Penelitian PMB-LIPI.
- Quinn, George. 2010. "Kesempatan dalam kesempitan? Bahasa dan Sastra Jawa Sepuluh Tahun Pasca-Ambruknya Orde Baru," dalam *Geliat Bahasa Selaras Zaman*. Mikihiro Moriyama dan Manneke Budiman (ed.). Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies.
- Riyanto DC. 2009. *KIM Kelompok Informasi Masyarakat Kota Pekalongan*. Pekalongan: Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Pekalongan.
- . 2008. *Pekalongan Membatik Dunia*. Pekalongan: Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Pekalongan.
- . 2007. *Memory Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kota Pekalongan*, Pekalongan: Bagian Humas dan Protokol Pemkot Pekalongan.
- Roda, Jean-Marc dkk. 2007. *Atlas Industri Mebel Kayu di Jepara, Indonesia*. Bogor: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD) and Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Rudyansjah, Tony. 2009. *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan: Sebuah Kajian tentang Lanskap Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rutz, Werner. 1987. *Cities and Towns in Indonesia: Their development, current positions and functions with regard to administration and regional economy*. Stuttgart – Berlin: Gebruder Borntraeger.
- Safuan, Akhmad. 2010. "Mengintip Eksotisme Khas Jepara," dalam *Media Indonesia*, 11 Agustus 2010. http://mirror.unpad.ac.id/koran/mediaindonesia/2010-08-11/media_indonesia_2010-08-11_028.pdf. (Diakses Oktober 2010)

- Saidi, Anas. 2000. "Kewirausahaan Industri Kecil dalam Masa Krisis: Kasus Industri Mebel di Jepara", dalam *Pengembangan Kewirausahaan Industri Kecil dalam Masa Krisis*, hlm. 15-83. Laporan Penelitian PMB-LIPI.
- _____. 1998. "Pedagang Pasar dan Orientasi Keagamaan: Studi Kasus Industri Kecil di Sidoarjo". Laporan Penelitian PMB-LIPI.
- Santoso, Iyeng dan Asikin Sukatmasaputra. 2008. *Kumpulan Kata-kata yang Terlupakan dari Pekalongan (Jik Kilingan Kojahan 'Kalongan?')*. Pekalongan: Tanpa Penerbit.
- Savirani, Amalinda. 2010. "A revolution in the making", *Inside Indonesia*, Vol. 102, October-December.
- _____. 2009. "Business and Politics in an intermediate town of Pekalongan, Central Java, Indonesia," paper presented at "In Search of Middle Indonesia" Conference, Pontianak, 13-15 July, KNAW. <http://www.onderzoekinformatie.nl/en/oi/nod/onderzoek/OND1316803/>. (Diakses Oktober 2010).
- _____. 2008. "Etos Entrepreneurship Pengusaha Batik Pekalongan Masa Kini: Bertahannya Perilaku 'Wong Kaji'?", dalam *Pekalongan Inspirasi Indonesia*, hlm. 127-144. Pekalongan: Pemda Pekalongan, Kirana Pustaka Indonesia dan The Pekalongan Institute.
- Schiller, Jim. 2007. "Civil Society in Jepara, Fractious but Inclusive", dalam Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (eds.) *Negotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, pp. 327-348. Leiden: KITLV.
- Schiller, Jim. Tanpa Tahun. "Mencari Masyarakat Sipil di Indonesia: Reformasi dan Pemilu 1999 di Jepara", dalam Jim Schiller (ed.) *Jalan Terjal Reformasi Lokal, Dinamika Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada.

- Schiller, Jim. 2007. "Masyarakat Sipil di Jepara: Mudah Terpecah Tapi Inklusif," dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2000. "Inside Jepara: Tensions between state, society and business," dalam *Inside Indonesia*, 63: Jul-Sep. <http://www.insideindonesia.org/edition-63/inside-jepara>. (Diakses tanggal 28 September 2010)
- Scott, Allen. 1997. "The cultural economy of cities". Oxford: Blackwell Publishers.
- Scott, Allen J. 1997. "The Cultural Economy of Cities". Tanpa Tempat: Joint Editors and Blackwell Publishers. http://www.geog.psu.edu/courses/geog497b/Readings/Scott_Allen.pdf. (Diakses 8 Oktober 2010)
- Simamora, Johan. 2010. "Indonesia Memiliki 36 Rekor Dunia," dalam Laman *Koran Baru*. <http://koranbaru.com/indonesia-miliki-36-rekor-dunia/>. Diakses 19 September 2010.
- Sidel, John T. 2007. *Riots Pogroms Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Soekardi, Astuti. 2009. *Arsitektur Heritage di Kelurahan Sugihwaras Pekalongan, Kampung Arab Pekalongan, Mau Dikemanakan*. http://www.askarlo.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=62:arsitektur-heritage-di-kelurahan-sugihwaras-kampung-arabpekalongan-mau-dikemanakan-2&catid=45:edukasi&Itemid=82. (Diakses Oktober 2010).
- Sossouvi, Kokoevi. Tanpa Tahun. "Handicraft, Indigenous Knowledge and Commercialization." http://www.adkn.org/assets/adkn_10.pdf. (Diakses September 2010)
- Sudrajat, Iwan. 2000. "Diskursus Posmodernisme Seorang Geografer Marxis" dalam *Basis* No 01-02, tahun ke-49.

- Sumarno. 2010. "Teroka: Represi pada Bahasa Jawa 'Ngapak'," Dalam *Kompas*. Sabtu, 17 Juli 2010.
- Suryo, Djoko. 2009. *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern*. Yogyakarta: STPN Press.
- _____. 2009. "Pekalongan, dari Desa Pesisir ke Kota Modern: Melacak Perjalanan Sejarah sebuah Kota di Daerah Pesisir Utara Jawa," dalam *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern*. Yogyakarta: STPN Press.
- Tanpa Nama. 2009. "Benteng Portugis," dalam Laman *Ukir Jepara (Jepara Bumi Kartini)*. <http://www.ukirjepara.com/benteng-portugis/>. (Diakses September 2010).
- _____. 2009. *Profil Potensi Investasi Kota Pekalongan*. Pekalongan: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan. <http://www.batikzoela.com/menu.php?idx=45>. (Diakses Oktober 2010).
- Tanpa Nama. 2003. "Kota Malang 89 Tahun: Masih Menikmati Tata Ruang Kuno," dalam *Harian Kompas*, 31 Maret. <http://www.arsitekturindis.com/?p=8>. (Diakses Juli 2010).
- Tanpa Nama. 1977. "The Liang Gie" dalam *Kumpulan Bahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Karya Kencana.
- Tanpa Nama. Tanpa Tahun. "Batik Pesisir pun Memiliki Ciri Khas," dalam *KainIndonesia.Com*. <http://kainindonesia.com/batik-pesisir-pun-memiliki-ciri-khas/> 165. (Diakses Oktober 2010).
- Tanpa Nama. Tanpa Tahun. *Memori Hari Jadi Kota Pekalongan*. Pekalongan: Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Pekalongan.
- Tanpa nama. Tanpa tahun. *Sejarah Sarung Gajah Duduk*. Diunduh dari http://www.gajahduduk.com/textbox/i_texthistory.htm. (Diakses Oktober 2010).

- Thung, Ju Lan, Maunati, Yekti, dan Kedit, Peter Mulok. 2004. *The (Re)construction of the 'Pan Dayak' Identity in Kalimantan and Sarawak*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI.
- Tim Penerbit Kompas. 2008. *Ekspedisi Anjer-Panaroekan: Laporan Jurnalistik Kompas*. Jakarta: Kompas.
- Tim Perumus. 2006. "Penelusuran Hari Jadi Kota Pekalongan," dalam Kota Pekalongan: Pemerintah Kota Pekalongan. Tidak diterbitkan.
- Tirtosudarmo, Riwanto, dkk. 2009. *Draft Laporan Transformasi Sosial di Perkotaan Pantai Utara Jawa: Studi Perbandingan Cirebon dan Gresik*. Segera Diterbitkan.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2008. *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Van den Berg, L.W.C. Tanpa Tahun. *Le Hadhramout et les Colonies Arabes dans l'Archipel Indien*. Diterjemahkan oleh Rahayu Hidayat. 1989. Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara. Jakarta: INIS.
- Vickers, A.H. 1993. "From Bali to Lampung on the Pasisir" dalam *Archipel* 45. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique et de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. (hal 55-76)
- Wertheim, W.F. 1969. *Indonesian Society in Transition a Study of Social Change*. London: van Hoeve ltd. The Hague.
- Widigdo, Anon Kuncoro. 1997. "Koleksi Ukiran," dalam *Mpu Tantular Museum Negeri Jawa Timur*. <http://mputantular.tripod.com/ukiran.html>. (Diakses Oktober 2010)
- Yahya, Labibah Zain. 2008. "Dengan Pengelolaan Onformasi yang Sistematis: Pekalongan bukan Sebatas Kota Kenangan," dalam *Pekalongan: Inspirasi Indonesia*. Pekalongan:

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, The Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia.

Yulianti, Dewi. 2009. "Terbentuknya Provinsi Jawa Tengah," dalam *Dr. Dewi Yulianti, M.A.* <http://staff.undip.ac.id/sastra/dewiyulianti/2009/04/29/terbentuknya-propinsi-jawa-tengah/>. (Diakses Juli dan September 2010).

Zuhdi, Susanto. 2002. *Cilacap: Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa, 1830-1942*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Majalah:

Achmad bin Muhammad Assorkattiy Al Anshary. *Asy Syabaab* Edisi I/ April/ 2008, hlm. 4.

Al Irsyad Al Islamiyyah Pekalongan. *Asy Syabaab* Edisi I/ April/ 2008, hlm. 5-6.

Mengungkap Potensi yang Tersirat dalam Perguruan Al Irsyad Al Islamiyyah Pekalongan. *Asy Syabaab* Edisi I/ April/ 2008, hlm. 9-10.

Lajnah Wanita dan Putri. *Asy Syabaab* Edisi I/ April/ 2008, hlm. 13.

Al Irsyad..., Syurkati..., Inspirasiku... *Asy Syabaab* Edisi II/ Juli/ 2008, hlm. 9-12.

Sang Dokter yang Jadi Walikota. *Asy Syabaab* Edisi II/ Juli/ 2008, hlm. 4-8.

Al Irsyad..., Syurkati..., Inspirasiku... *Asy Syabaab* Edisi II/ Juli/ 2008, hlm. 9-12.

Drum Band Al Irsyad Mengukir Sejarah. *Asy Syabaab* Edisi III/ September/ 2008, hlm. 18.

Sulaimi, Ruwaifi'. Berpuasa dan Berhari Raya Bersama Penguasa: Syiar Kebersamaan Umat Islam. *Asy Syabaab* Edisi III/ September/ 2008, hlm. 31.

- Al Ustadz Umar Salim Hubeis: Ulama dan Pejuang Islam Indonesia. *Asy Syabaab* Edisi IV/ Januari/ 2009, hlm. 4-6.
- Al Ustadz Muhammad Munief: Pengabdiannya dalam Dunia Pendidikan. *Asy Syabaab* Edisi V/ Mei/ 2009, hlm. 5-7.
- Eksistensi Lajnah Sosial dan Ekonomi di Masyarakat. *Asy Syabaab* Edisi V/ Mei/ 2009, hlm. 14.
- Al Ustadz Said Thalib Al Hamdani: Ahli Fiqih yang Penuh Kerendahan Hati. *Asy Syabaab* Edisi VI/ Agustus/ 2009, hlm. 5-6.
- Lajnah Dakwah Suguhkan 3 Pengajian Umum Sebelum Ramadhan. *Asy Syabaab* Edisi VI/ Agustus/ 2009, hlm. 12.
- Asy Syabaab Menimba Ilmu. *Asy Syabaab* Edisi VI/ Agustus/ 2009, hlm. 17.
- Ustadz Abdullah Ahmad Basleman. Guru Khat. *Asy Syabaab* Edisi VII/ Januari/ 2010, hlm. 5-6.
- Bahaya Amalan Tanpa Ilmu. *Asy Syabaab* Edisi VII/ Januari/ 2010, hlm. 31-34.
- Ustadz Ahmad Syawie: Pengabdiannya pada Dunia Pendidikan. *Asy Syabaab* Edisi VIII/ Mei/ 2010, hlm. 5-7.
- Walikota Pekalongan, Dr. H. Basyir Ahmad. *Warta Kota Batik* Edisi Khusus, hlm. 5.